

**PENGARUH PROGRAM KEMITRAAN BUMN
TERHADAP PENINGKATAN PDB
USAHA KECIL MIKRO**



TESIS

T
27708

Oleh

Wimba Adhirabrata
0606012131

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
UNIVERSITAS INDONESIA
Depok
2008

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : **Wimba Adhirabrata**
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 15 Agustus 1982
NIM : 0606012131
Judul Thesis : **Pengaruh Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN Terhadap Peningkatan PDB Usaha Kecil Mikro**

Depok, 25 Juli 2008

Menyetujui Pembimbing

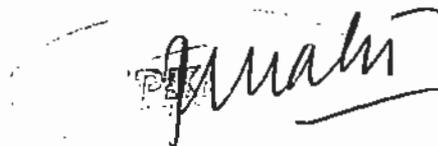


(Dr. Nining I. Soesilo)

Mengetahui :

Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Ketua,



(Dr. B. Raksaka Mahi)

NIP. 131.923.199

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) beberapa dekade terakhir mulai menjadi sorotan di berbagai belahan dunia, disebabkan permasalahan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks sebagai akibat meningkatnya proses produksi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan. BUMN sebagai perusahaan pemerintah, sejak awal pembentukannya sudah seharusnya memperhatikan isu tentang tanggung jawab sosial ini. Sehingga dalam visi misinya bertujuan untuk lebih mengutamakan maksimalisasi output yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dibandingkan profit perusahaan semata.

Keberadaan BUMN yang tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Melalui program PKBL, BUMN berusaha untuk membina skala Usaha Kecil Mikro (UKM) dan memberikan sumbangan untuk pemberdayaan lingkungan setempat. Dilihat dari fungsi BUMN yang cukup kompleks dan menguasai lini perekonomian dari tingkat hulu sampai dengan hilir, terlihat bahwa beban BUMN cukup berat namun juga memiliki peluang dimana mampu menjadi motor penggerak bagi skala Usaha Kecil Menengah sehingga menciptakan pertumbuhan pasar UKM di lingkungan BUMN setempat yang dalam jangka panjang diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap perekonomian nasional.

Dari hasil penelitian antara tahun 1998 hingga 2006, diketahui bahwa kinerja Program Kemitraan BUMN dalam membina UKM di lingkungan sekitar BUMN menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan memberikan sumbangan bagi pertumbuhan PDB UKM. Namun masih terdapat inefisiensi dalam pembinaan UKM karena tidak terjadi transfer informasi teknologi secara langsung dari BUMN Pembina, yang mampu memanfaatkan UKM binaan sebagai bagian dari faktor produksi dan memberikan nilai tambah bagi output BUMN pembina. Pelaksanaan program kemitraan masih dilakukan sebatas pemberian modal namun belum menyentuh arahan pengembangan usaha dalam jangka panjang. Selain itu juga masih terjadi tumpang tindih dalam implementasi antara alokasi Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL) yang perlu diselesaikan dengan optimalisasi penyisihan laba BUMN.

Kata Kunci : CSR, PKBL, BUMN, GDP UKM

*Katakanlah : “Kalau sekiranya lautan menjadi tinta
untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh
habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku,
meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula”
(Q.S. Al-Kahfi: 109)*

*Bermimpilah untuk menggantungkan cita-cita
Bacalah untuk membuat jalan kearahnya
Tulislah untuk membuatnya nyata
Lakukankah dengan konsisten saat ini juga
Bersyukur dan mendekatlah pada-Nya selama kita masih diberi usia
(Adhira: July 2008)*



*Karya ini penulis persembahkan untuk :
Kedua orangtua tercinta Mama Widayanti dan Ayahanda Mahadi
yang senantiasa mendorong putranya untuk
menjadi orang yang bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa
Terima kasih atas do'a serta segala dukungan tulus
yang senantiasa diberikan kepada Ananda*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridho dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada program Pasca Sarjana Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Alhamdulillah Robbil'aalamiin.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, saat penulisan dalam menempuh studi S2 program Pasca Sarjana MPKP FE-UI dan proses penyempurnaan tesis ini. Secara khusus penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ibu **Dr. Nining I. Soesilo** selaku pembimbing tesis bagi penulis, yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan untuk lebih melengkapai penulisan tesis.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Parikesit selaku Staf Ahli Mentri BUMN bidang Kemitraan Usaha Kecil dan Bapak Raynok selaku Kabag Perbankan II Kementerian BUMN bidang PKBL. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk penelitian tesis ini sebagai salah satu bentuk pelaporan kinerja BUMN bidang PKBL dan bantuan ketersediaan informasi, data mengenai PKBL BUMN sebagai sumber penelitian.
2. Bapak Yudi Risman dari FEIE-UI. Terima kasih atas bantuan ketersediaan data makro UKM di Indonesia.
3. Ibu Dr. Sulastri Saronu selaku ketua sidang dan Bapak Dr. Arianto Patunru Ir. selaku penguji, yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan pada tahap akhir penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Raksaka Mahi dan Ibu Hera Susanti SE. M.sc selaku ketua dan sekretaris program Pasca Sarjana MPKP FE-UI.
5. Bapak Prof. Dr. Heru Subiantoro, selaku dosen seminar tesis. Terima kasih atas ilmu dan motivasi yang senantiasa dicurahkan dengan bijaksana.
6. Mas Hasis dan Tetta dari MM-UI, terima kasih atas masukan model yang diberikan dalam menyempurnakan tesis ini.

7. Seluruh staf Pengajar pada Program Pascasarjana MPKP FE-UI, yang telah memberikan bimbingan dan materi serta membuka cakrawala ilmu pengetahuan kepada penulis dan rekan-rekan di MPKP angkatan XIV / 2006 selama mengikuti perkuliahan.
8. Bapak Drs. H. Sarwoko M.Si di Jogja terima kasih atas buku karangannya yang cukup menambah wawasan penulis tentang dasar ekonometri.
9. Ari Christian atas semua dukungan dan toleransinya selama masa perkuliahan sehingga proyek-proyeknya tetap dapat terealisasi.
10. Rekan-rekan MPKP angkatan XIV 2006 Pagi dan Malam, Mas Maulana, Pak Adcha, Pak Roni, Pak Memed, Pak Soleh, Mas Rizky, Mas Eden, Mas Syahrui, Mas Ivan, Mas Haris, Mba Yenny, Mba Ocha, Mba Pipit, Mba Sulis, Mba Lutfi, Mba Yanti, Mba Febri, Robby, Setiawan, Mas Dedi, Mas Cakra, Mba Tress, Galuh, Anin, Wahyudi, Neri, Didi, Supran dan lainnya. Terima kasih atas kekompakannya selama menjalani masa perkuliahan.
11. Seluruh staf Administrasi MPKP (Mba Siti, Mas Dedi dan lainnya) serta staf Perpustakaan Pascasarjana FE-UI Depok (Jali, Wahyu dan lainnya) yang membantu penulis dalam memperoleh bahan, informasi dan juga menyediakan tempat selama masa perkuliahan proses penulisan Tesis berlangsung.
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Meskipun demikian, penulis tetap berharap bahwa tesis ini bisa bermanfaat bagi penulis, para peminat dan pemerhati UKM baik akademisi maupun praktisi serta para pembaca lain pada umumnya.

Depok, 25 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.5 Hipotesis.....	11
1.6 Metodologi Penelitian.....	11
1.7 Kerangka Pemikiran.....	12
1.8 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	
TINJAUAN LITERATUR.....	14
2.1 Definisi <i>Corporate Social Responsibilities (CSR)</i>	14
2.2 Konsep Dasar PKBL BUMN	16
2.3 Implementasi CSR dalam PKBL BUMN.....	19
2.4 Regulasi vs Implementasi PKBL BUMN.....	19
2.5 Dasar Hukum Program PKBL dalam Pengembangan UKM.....	20
2.6 Definisi Usaha Kecil Mikro (UKM)	22
2.6.1 Permasalahan UKM.....	24
2.6.2 Pengembangan UKM.....	26
2.7 Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Pengertian Metode Penelitian.....	32
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	32
3.3 Rancangan Penelitian.....	32
3.4 Data dan Sumber Data.....	36
3.5 Metode Analisa Data Panel.....	38
3.5.1 Pendekatan Kuadrat Terkecil.....	41
3.5.2 Pendekatan Efek Tetap.....	41
3.5.3 Pendekatan Efek Acak.....	43
3.6 Pemilihan Metode Estimasi.....	44
3.6.1 Kuadrat Terkecil atau Efek Tetap.....	44

3.6.2	Efek Tetap atau Efek Acak.....	45
3.7	Uji Asumsi Klasik.....	47
3.7.1	Pengujian Normalitas.....	47
3.7.2	Pengujian Multikolinieritas.....	48
3.7.3	Pengujian Heteroskedastisitas.....	49
3.7.4	Pengujian Autokorelasi.....	49

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	51	
4.1	Pemilihan Model.....	53
4.1.1	Pemilihan dan Uji Model Pertumbuhan UKM Binaan BUMN.....	53
4.1.2	Pemilihan dan Uji Model Pertumbuhan Program Kemitraan BUMN Terhadap PDB UKM.....	57
4.2	Hasil Estimasi.....	60
4.2.1	Hasil Estimasi Model Pertumbuhan UKM Binaan BUMN.....	60
4.2.2	Hasil Estimasi Model Pertumbuhan Program Kemitraan BUMN Terhadap PDB UKM.....	62
4.3	Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
4.3.1	Peran Laba Terhadap UKM Binaan BUMN.....	66
4.3.2	Peran Pengembalian Pinjaman Pokok Terhadap UKM Binaan BUMN.....	68
4.3.3	Peran Deposito Terhadap UKM Binaan BUMN.....	70
4.3.4	Peran Iklim Investasi Terhadap UKM Binaan BUMN.....	71
4.3.5	Peran Dana Tersalur Terhadap PDB UKM.....	71
4.3.6	Peran Investasi Terhadap PDB UKM.....	73
4.3.7	Peran Tenaga Kerja Terhadap PDB UKM.....	74
4.3.8	Peran Jumlah Unit UKM Terhadap PDB UKM.....	77

BAB V

KESIMPULAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN SARAN.....	79	
5.1	Kesimpulan Penelitian.....	79
5.2	Rekomendasi Kebijakan.....	81
5.3	Saran Untuk Penelitian Selanjutnya.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84	

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

Tabel 1. 1	Proporsi rata-rata GDP, Investasi, Jumlah Tenaga Kerja dan jumlah unit UKM, UM dan UB 1998-2006.....	3
Tabel 2. 3	Penelitian-penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3. 1	Data dan Sumber Data Penelitian.....	38
Tabel 4. 1	Hasil Uji F pada Model Pertumbuhan UKM Binaan BUMN.....	54
Tabel 4. 2	Hasil Uji Hausman pada Model Pertumbuhan UKM Binaan BUMN.....	55
Tabel 4. 3	Hasil Uji F pada Model Pertumbuhan Program Kemitraan BUMN Terhadap PDB UKM.....	58
Tabel 4. 4	Hasil Uji Hausman pada Model Pertumbuhan Program Kemitraan BUMN Terhadap PDB UKM.....	58
Tabel 4. 5	Efek Individu Pada Model Pertumbuhan Program Kemitraan BUMN Terhadap PDB UKM.....	65
Tabel 4. 6	Proporsi Penyisihan Laba terhadap Laba Total BUMN 2002 s/d 2006.....	67
Tabel 4. 7	Proporsi Pengembalian Pokok rata-rata terhadap Jumlah Unit Binaan 1998 s/d 2006.....	69
Tabel 4. 8	Proporsi Pengembalian Pokok rata-rata terhadap Jumlah Unit Binaan Masing-masing Subsektor 1998 s/d 2006.....	69
Tabel 4. 9	Rata-rata Dana Tersalur Terhadap Total Saldo Program Kemitraan BUMN.....	72
Tabel 4. 10	Proporsi Investasi Terhadap Unit Usaha.....	73
Tabel 4. 11	Penyerapan Tenaga Kerja rata-rata antar Sektor 1998 s/d 2006.....	76
Tabel 4. 12	Produktifitas TK UK rata-rata antar Sektor 1998 s/d 2006.....	76
Tabel 4. 13	Proporsi TK Perunit antar Sektor 1998 s/d 2006.....	77
Diagram 1. 2	Sektor yang Digeluti UK tahun 2006.....	4
Diagram 1. 3	Piramida Struktur Usaha Menurut Besaran Usaha.....	5
Diagram 1. 4	Jumlah Unit Binaan BUMN 1998 s/d 2006.....	8
Diagram 2. 1	Triple Bottom Line.....	15
Diagram 2. 2	<i>Framework Analisis Partnership</i>	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam teori tentang bisnis, sasaran setiap lembaga bisnis adalah mencapai nilai keuntungan yang maksimum (*profit maximization*) dengan tujuan menciptakan laba sebanyak mungkin bagi para pemegang saham (*shareholder*). Namun semenjak beberapa tahun terakhir, pemahaman *profit maximization* diperluas mencakup beberapa hal tambahan dalam faktor produksi perusahaan, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat diserap, tingkat kesejahteraan dan kepuasan pegawai, tingkat penyerapan manfaat oleh masyarakat di sekitar lokasi kerja, perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) dan lain sebagainya.

Dalam sistem sosial yang semakin kompleks, setiap keputusan bisnis juga akan menimbulkan pengaruh pada lingkungan yang tersentuh oleh kegiatan bisnis itu. Oleh karena itu, setiap keputusan bisnis harus pula mempertimbangkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang akan terkena dampak¹. Hal tersebut dewasa ini dijabarkan dalam konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dimana tidak dapat dipungkiri lagi saat ini CSR telah menjelma menjadi isu sentral yang sebelumnya hanya dianggap sebagai isu marginal, bahkan telah menempati di posisi yang kian terhormat di berbagai belahan dunia.

CSR bukan hanya dianggap sebagai kebutuhan mendesak (*necessary condition*) karena dipaksa oleh aturan pemerintah atau tekanan masyarakat. Perusahaan tidak dapat bersifat arogan dan tidak memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitar karena mengejar profit semata bagi para *shareholder*, pembentukan hubungan antar komunitas (*Comunity Relationship*) dengan tiap-tiap *stakeholder* diperlukan juga sebagai investasi bagi keberlangsungan perusahaan

¹ Laporan Keberlanjutan 2005 PT Antam Tbk, 2006. Menyeimbangkan berbagai kepentingan belajar dari implementasi CSR PT. ANTAM Tbk. Journal EBAR, September-Desember. Hal 127

tersebut di masa mendatang. Dengan demikian CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (*cost centre*) melainkan juga sebagai investasi sentra laba (*profit centre*) di masa mendatang².

Kemitraan antara masyarakat miskin, organisasi-organisasi kemasyarakatan, pemerintah dan perusahaan besar dapat menciptakan pasar-pasar terbesar serta pertumbuhan tercepat di dunia. Kewirausahaan berskala besar dan tersebar luas adalah inti dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Salah satu upaya yang diperlukan dalam membantu masyarakat miskin adalah pendekatan kemitraan terhadap mereka dengan membangun pasar di dasar piramida perekonomian (*Bottom of Pyramid*). Tujuannya adalah untuk memulai dan mencapai skenario *win-win solution* yang berkesinambungan, dimana masyarakat miskin aktif terlibat dan pada saat yang sama perusahaan yang memberikan produk dan jasa pada mereka dapat memetik keuntungan³.

Berdasar data BPS Agustus 2007 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 36 juta orang miskin. Dimana lapisan penduduk miskin lebih banyak melakukan usaha pada sektor Menengah, Kecil dan Rumah Tangga / Mikro (UMKM). Sampai dengan 2006 data jumlah UMKM di Indonesia adalah sejumlah 48,9 juta unit usaha dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,2%⁴. Pada tahun 2006, kontribusi Usaha Kecil Mikro (UKM) dalam penciptaan nilai tambah nasional sebesar Rp 1,257.65 triliun rupiah atau sebesar 37,67% dari Struktur Permintaan Domestik / Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Dari Tabel 1.1 terlihat Sumbangan UKM terhadap PDB rata-rata antara tahun 1998 s/d 2006 adalah sebesar 39.9 persen hampir setara dengan sumbangan PDB Usaha Besar (UB) sebesar 44.2 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja UKM sebesar 71.7 juta pekerja atau setara dengan 91 % dari total angkatan kerja dengan jumlah

² Yusuf Wibisono, 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Fascho Publishing. Hal 35

³ C.K. Prahalad, 2004. The Fortune at the Bottom of the Pyramid Edisi, Edisi Indonesia. Indeks Gramedia. Hal 3-4.

⁴ <http://www.bkpk.go.id/index.php?idpage=1206&idunit=17>

unit sebesar 42.2 juta unit UKM dan penyerapan investasi sebesar 80.5 triliun rupiah atau setara dengan 19.5 % dari total penyerapan investasi. Jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja UB sebesar 2 juta pekerja atau setara dengan 3.2 % dari total angkatan kerja dengan jumlah unit 5.400 unit UB dan penyerapan investasi 232 triliun rupiah atau setara dengan 56.2% total penyerapan investasi menunjukkan bahwa skala UKM memiliki nilai tambah faktor produksi yang relatif kecil dibanding usaha besar.

Sumbangan UKM yang relatif tinggi terhadap PDB lebih dikarenakan banyaknya jumlah pekerja / padat karya, namun kinerja perorangannya menunjukkan inefisiensi dimana terlihat dari perbandingan jumlah tenaga kerja dengan jumlah unit UKM adalah dua banding satu. Sehingga menggambarkan bahwa pengusaha UKM banyak yang bekerja sendiri-sendiri dibandingkan berkelompok, hal ini juga menggambarkan lemahnya jaringan yang terjalin pada skala UKM sehingga akibat persaingan ekonomi yang cukup ketat pada pasar di dasar piramida ekonomi di Indonesia dengan nilai tambah yang kecil mengakibatkan mayoritas UKM tidak mampu bertahan dalam jangka panjang.

Tabel 1.1 Proporsi rata-rata GDP, Investasi, Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah unit UKM, UM dan UB 1998-2006

	GDP (T)	Inv (T)	TK (juta org)	unit (ribu)	Pangsa			
					GDP	Inv	TK	Unit
UKM	Rp758.8	Rp80.56	71.68	42,217.3	39.37%	19.48%	90.86%	99.79%
UM	Rp306.2	Rp100.47	4.73	81.3	15.89%	24.30%	6.00 %	0.19%
UB	Rp862.3	Rp232.49	2.48	5.4	44.74%	56.22%	3.14 %	0.01%
Total	Rp1,927.3	Rp413.52	78.89	42,304.1	100%	100%	100%	100%

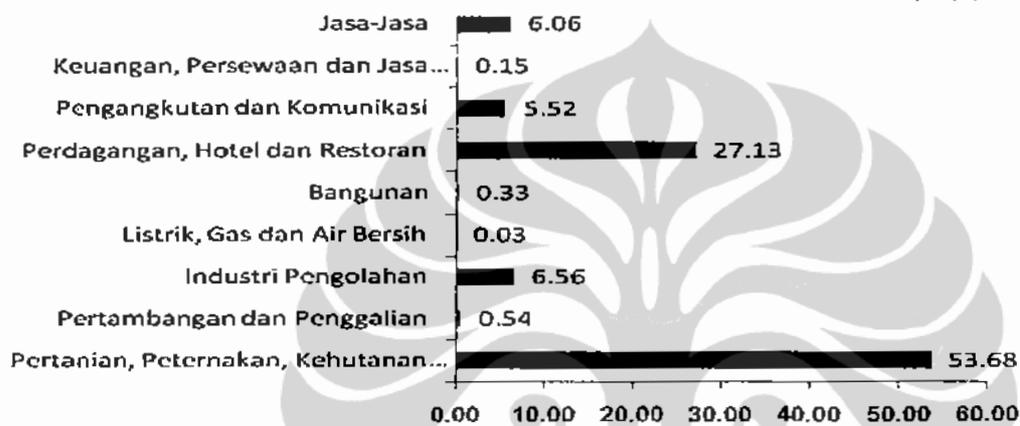
Sumber BPS dan DepKop (diolah)

Dari table 1.2 terlihat lebih dari separuh unit usaha UKM pada tahun 2006 bergerak di sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan sebanyak 27,1%, dan sektor industri sebanyak 6,6%.

Berdasar pembagian tenaga kerja 45,4% berada di sektor pertanian, diikuti sektor perdagangan sebanyak 26,0%, dan sektor jasa-jasa sebanyak 11,0%. Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan dari Rp. 110,3 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp. 122,2 triliun pada tahun 2006, peranannya terhadap total ekspor non migas nasional sebesar 20,1% pada tahun 2006.

Diagram 1.2 Sektor yang digeluti UKM tahun 2006

Sumber BPS dan DepKop (diolah)



Dengan mempertimbangkan penyebaran dan luasan masalah kemiskinan serta besarnya kontribusi UKM pada pembangunan ekonomi Indonesia, maka sudah selayaknya perhatian Pemerintah terhadap UKM semakin ditingkatkan.

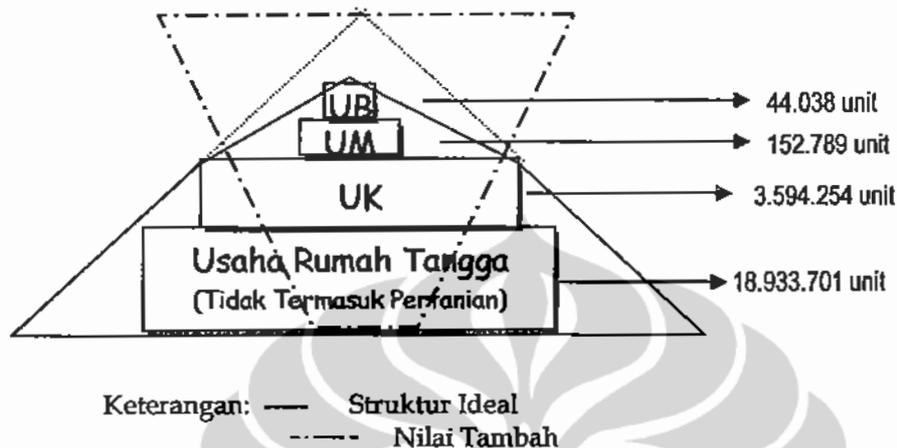
Hingga saat ini UKM telah secara efektif menjadi katup pengaman (*safety valve*)⁵ bagi perekonomian dalam penyediaan tenaga kerja dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,2% pada tahun 2006. Faktor-faktor yang menyebabkan mengapa UKM dapat bertahan, adalah karena alasan berikut: (a) tidak terkaitnya kegiatan ekonomi UKM dengan pinjaman dollar, (b) UKM mampu mengadakan langkah penghematan dengan substitusi input mahal terhadap input yang lebih murah, (c) mampu melakukan keanekaragaman usaha (*differensiasi*) dan membuka pasar baru

⁵ http://www.smecda.com/deputi7/file_infokop/edisi%202023/inagara%20tambunan.7.htm

(*diversifikasi*) dan (d) UKM mayoritas bergerak berdasarkan modal sendiri dan bukan berdasarkan pinjaman (CESS, 1999) ⁶.

Diagram 1.3 Piramida Struktur Usaha Menurut Besaran Usaha⁷

Sumber BPS dan DepKop (*dialah*)



Dari diagram 1.4 terlihat bahwa jika terdapat sistem jaringan usaha yang berkesinambungan di sektor swasta antara perusahaan Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil Mikro hendaknya dapat meningkatkan nilai tambah faktor produksi khususnya pada skala UK dan rumah tangga serta mengentaskan masalah kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem kemitraan yang kokoh dan berkesinambungan, sedangkan pada kenyataannya banyak sektor UKM yang berdiri sendiri terputus dari jaringan di atasnya dan keberadaannya ilegal sehingga hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil bagi perekonomian nasional. Hal ini berdampak pasar UKM yang potensial pada akhirnya tidak mampu bersaing di pasar global karena harus berjuang untuk mempertahankan eksistensi masing-masing UKM. Oleh karena itu keberadaan CSR di Indonesia khususnya, antara lain bertujuan untuk menjaring UKM-UKM yang dapat dijadikan mitra binaan sebagai tulang punggung bagi industri menengah dan besar yang pada akhirnya berfungsi sebagai penyokong perekonomian nasional.

Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan

⁶ Center for Economic and Social Studies (CESS)

⁷ Ibid. <http://www.smeccda.com>.

lapangan kerja dan kesempatan berusaha, perlu dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi. Kemudian usaha-usaha tersebut harus didorong untuk menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kekayaan jumlah SDA dan SDM yang besar, hendaknya memerlukan sosok korporasi besar yang menimbulkan dampak berkelanjutan (*multiplier effect*) bagi perekonomian domestik (*lokomotif powerhouse*). Dibelakang lokomotif itu berjajar ribuan UKM yang mengisi mata rantai usaha mulai dari pasokan suku cadang hingga *catering*. Hal ini salah satunya dimungkinkan oleh BUMN sebagai lokomotif ekonomi nasional, penarik gerbong-gerbong kesejahteraan bagi masyarakat⁸.

Indonesia pernah mencoba menerapkan konsep *powerhouse* swasta pada masa Orde Baru dengan nama Indonesia Inc⁹. Sosok inilah yang pada akhirnya mengantarkan Indonesia kedalam kemajuan perekonomian pada tahun 1996, dengan tingkat pertumbuhan 8%, pendapatan perkapita US \$ 1000, inflasi dibawah 10% namun berjalan diatas ketimpangan yang nyata dimana 90% dari kue perekonomian nasional dinikmati oleh konglomerat dan hanya 10% sisanya yang mampu dinikmati oleh ekonomi kecil. Dan kemudian terguncang hebat dan runtuh oleh badai krisis 1997.

Pelaksanaan CSR di Indonesia diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan swasta dan Perusahaan Umum Milik Negara (BUMN), dimana BUMN melaksanakan melalui program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional disamping usaha swasta dan koperasi.

Dalam sistem perekonomian nasional BUMN cukup berperan penting dan strategis dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden

⁸ Rhenal Kasali. Analisis Ekonomi: Sukses BUMN dan aborsi perubahan. Kompas. 10 maret 08.

⁹ <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cincorporated.pdf>

dan hasil privatisasi. Sebagai institusi bisnis BUMN dituntut untuk dapat menghasilkan laba sebagaimana layaknya perusahaan-perusahaan bisnis lainnya. Namun di sisi lain, BUMN juga dituntut berfungsi sebagai perintis sektor usaha yang belum diminati swasta, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar dan membantu membangun usaha kecil. Peran sosial ini mengisyaratkan bukan saja kepemilikan dan pengawasannya oleh publik tetapi juga menggambarkan konsep mengenai sasarannya adalah masyarakat (*public purpose*) dan orientasinya pada kepentingan masyarakat (*public interest*). Dengan demikian maka posisi perusahaan BUMN diibaratkan memiliki dua sisi mata uang. Dimana di satu sisi berperan sebagai institusi bisnis dan di sisi lain berperan sebagai institusi sosial karena merupakan alat negara¹⁰.

Pada masa Orde Baru melalui program kemitraan BUMN, mampu melahirkan dan mengembangkan lebih dari 6000 ribu Koperasi Mandiri di seluruh kecamatan di Indonesia dimana keberadaan Koperasi Mandiri tersebut terkait dengan sistem ekonomi nasional¹¹. Salah satu kriteria Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri adalah dilaksanakannya sistem akuntansi koperasi yang harus bisa diaudit dengan opini wajar tanpa syarat. Program ini merupakan program pertama akuntansi masuk desa secara besar-besaran. Pada tahun 1997, seluruh usaha koperasi tersebut secara akumulatif berhasil menghimpun dana tunai sebesar lebih dari 2 triliun rupiah. Keberhasilan ini cukup luar biasa, dimana selama 52 tahun sebelumnya belum pernah tercapai. Namun pencapaian keberhasilan yang lebih fundamental adalah bahwa Keberadaan Koperasi Mandiri mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian rakyat dimana mampu memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi berhasilnya program swasembada beras, perkembangan ekonomi pedesaan, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan

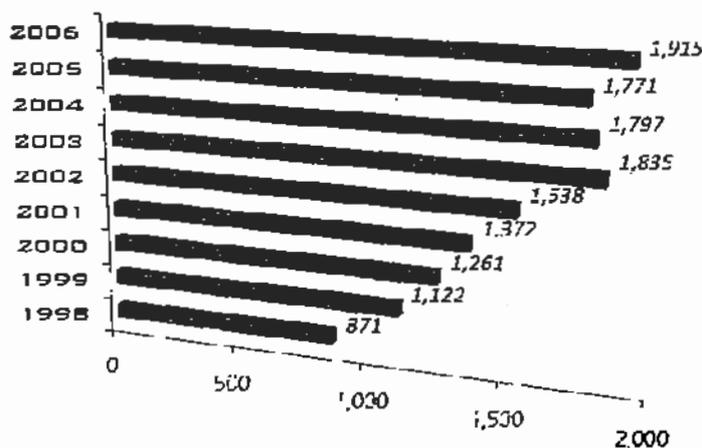
¹⁰ Yusuf Wibisono, 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing. Hal 87-88

¹¹ Ibid. <http://www.fiskal.depkeu.go.id>.

rakyat. Namun keberhasilan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan pemerintah saat ini.

Faktor yang membedakan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN dan perusahaan non-BUMN adalah, pada perusahaan BUMN terdapat instrumen pemaksa berupa kebijakan pemerintah melalui PerMen BUMN No: Per-05/MBU/2007 sedangkan instrument pelaksanaan CSR pada perusahaan swasta hanya terdapat pada pasal 74, UU PT No: 40/2007 yang masih memerlukan langkah-langkah revisi lebih lanjut dalam sifat kebijakannya yang sukarela atau diwajibkan dan sanksi hukumnya yang belum tertera langsung pada UU PT tersebut. Melalui instrumen yang memaksa, implementasi CSR merupakan hal yang bersifat mandat bagi BUMN. Sehingga sangat dimungkinkan bahwa potensi pemberian donasi perusahaan-perusahaan BUMN lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta.

Peran sosial BUMN antara lain dituangkan melalui PerMen BUMN No: Per-05/MBU/2007 yang mewajibkan penyisihan laba untuk program PKBL. PKBL adalah dana yang dihimpun dari penyisihan laba 1 hingga 5 persen dari seluruh BUMN, untuk PK (Program Kemitraan) sebesar 1 hingga 3 persen dari laba yang diperoleh setiap BUMN yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman baik untuk modal usaha maupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Bunga kredit yang diberikan pada program PK BUMN relatif rendah, yaitu 6 persen, dan syarat pengajuan kredit tidak mewajibkan adanya jaminan kredit.



**Diagram 1.4 Jumlah
Unit binaan BUMN
1998 s/d 2006**
Sumber Meneg BUMN
(diolah)

Pada umumnya, pengusaha UK yang mengajukan permohonan permodalan melalui program kemitraan BUMN berkisar Rp 10 juta. Namun, ada juga yang mengajukan sebesar Rp 30 juta-Rp 50 juta, dimana kredit yang diberikan tergantung dari kelayakan usaha yang sudah terbukti serta tingkat kemampuan mengembalikan pinjaman. BUMN tidak melakukan sita jaminan seperti yang dilakukan pada pinjaman perbankan. Sedangkan BL (Bina Lingkungan) dilakukan dengan menyisihkan laba sebesar 1 hingga 2 persen, yang bertujuan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah

Peran dan kontribusi CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, kualitas SDM dan pelestarian SDA, dalam jangka panjang memiliki peranan sebagai investasi yang cukup penting. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, BUMN melakukan penerapan CSR melalui program PKBL berupa penyisihan laba BUMN sebesar 1 sampai dengan 5 % sebagai program pembiayaan, pelatihan dan pengembangan bagi UKM disekitar perusahaan (Program Kemitraan) serta program peningkatan kesejahteraan sosial (Bina Lingkungan).

Dalam menghadapi persaingan global, agar UKM binaan BUMN mampu menghasilkan produk yang efisien dan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga dapat tetap bertahan dan memiliki nilai jual terhadap produk-produk asing. Oleh karena itu diperlukan dukungan kualitas SDM, Keterampilan, permodalan, orientasi pasar, proses pemasaran, keanggotaan dalam organisasi dagang dan keterkaitan dengan bapak angkat.

Namun akibat beban BUMN yang cukup berat, selaku Pembina senantiasa tidak mampu menghasilkan profit yang konstan setiap tahunnya. Oleh karena itu keberhasilan dari PKBL tidak bisa semata-mata mengandalkan jumlah laba yang disisihkan namun juga dari

efektifitas dan manajemen pengelolaan dana dari laba yang sudah disisihkan tersebut agar tercipta hubungan kemitraan yang optimal antar BUMN dengan UKM binaannya.

Atas dasar alasan tersebut, penelitian ini menekankan pada efektifitas kinerja program kemitraan dan bina lingkungan melalui indikator kinerjanya yaitu peningkatan jumlah unit binaan. Dan kontribusi yang dihasilkan oleh program kemitraan BUMN terhadap peningkatan PDB UKM nasional.

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian pada ulasan sebelumnya, maka penulisan tesis ini mempunyai beberapa tujuan :

1. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan PK BUMN terhadap peningkatan jumlah UKM yang dapat dibina lebih dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal.
2. Mengidentifikasi dan mempelajari karakteristik BUMN pada masing-masing subsektor dalam memberikan bantuan terhadap UKM binaannya.
3. Melihat pengaruh keberhasilan kinerja program kemitraan BUMN terhadap peningkatan PDB UKM.
4. Dalam Upaya mengoreksi dan melengkapi kekurangan dalam kebijakan PK BUMN dalam mengoptimalkan kinerjanya terhadap pemberdayaan UK dan kontribusinya terhadap PDB.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah PKBL diasumsikan identik dengan CSR, namun penelitian lebih diarahkan pada indikator pelaksanaan program kemitraan terhadap peningkatan jumlah UKM dan pertumbuhan PDB UKM. Program Bina Lingkungan tidak dimasukkan sebagai variabel penelitian karena keterbatasan tahun observasi. Objek studi yang dilakukan membagi Usaha Kecil yang menjadi unit binaan dari program kemitraan BUMN dari 132 BUMN

yang dikelompokkan dalam 21 subsektor ekonomi yang digeluti BUMN. Dua puluh satu subsektor diambil dari irisan subsektor yang digeluti oleh UKM dan BUMN. PDB, investasi, jumlah tenaga kerja dan jumlah unit yang dipergunakan pada skala usaha kecil. Adapun tahun observasi yang dipergunakan adalah antara tahun 1998 sampai dengan 2006.

1.5 Hipotesis

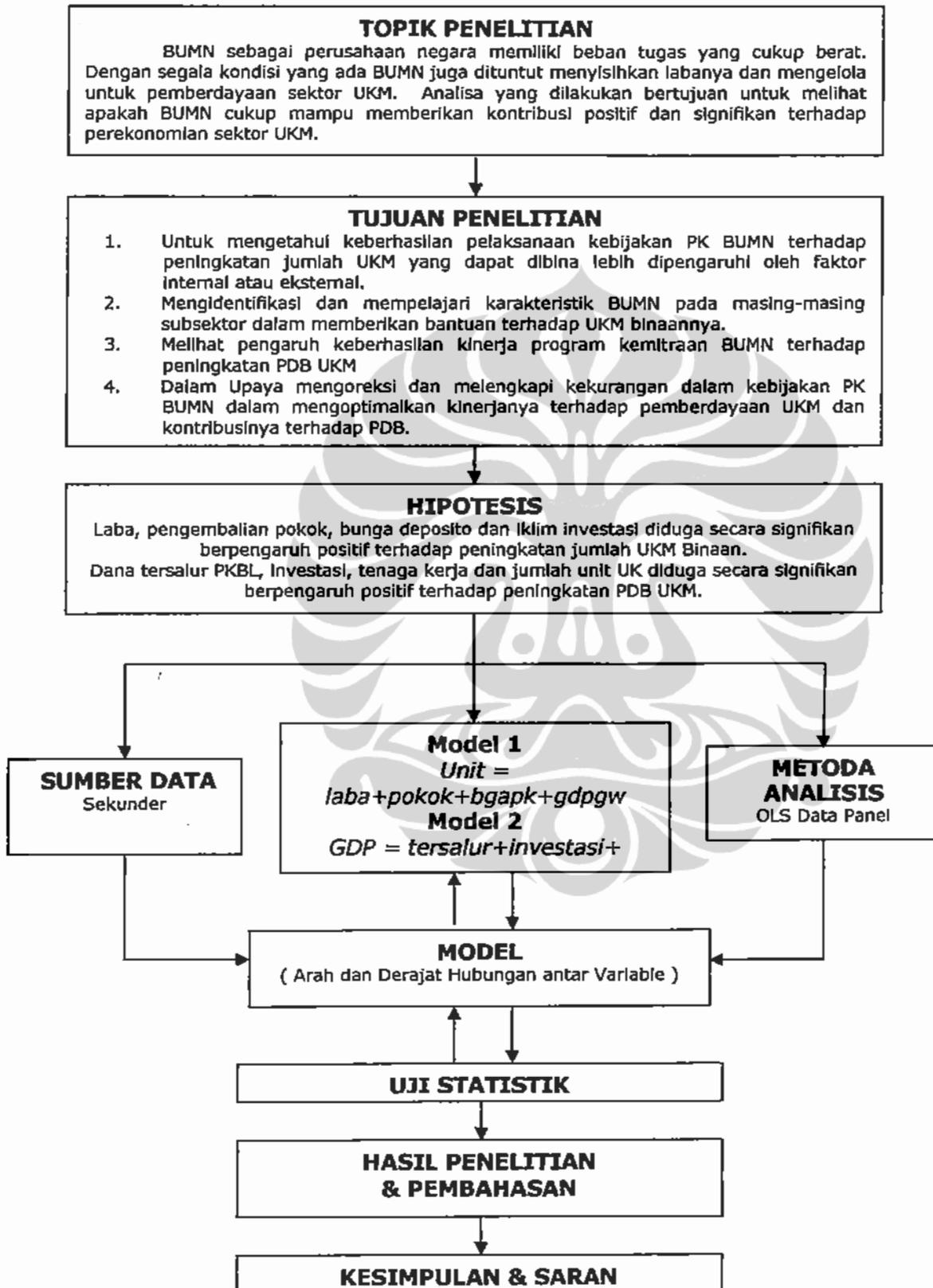
Adapun hipotesis yang akan diuji dalam studi ini yaitu :

1. Faktor Internal (peningkatan penyisihan laba BUMN untuk program kemitraan, peningkatan jumlah pengembalian pinjaman pokok dari masing-masing unit binaan BUMN dan peningkatan bunga deposito dana PK sebelum tersalurkan) dan faktor eksternal (Iklim Investasi) diduga dapat memberikan dampak positif dan signifikan pada peningkatan jumlah unit binaan BUMN.
2. Peningkatan dana tersalur program kemitraan BUMN, peningkatan investasi fisik usaha kecil, peningkatan jumlah tenaga kerja usaha kecil dan peningkatan jumlah unit usaha kecil diduga dapat memberikan dampak positif dan signifikan pada peningkatan PDB UKM.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian dan analisis akan didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terutama dari Kementrian BUMN, Meneg UMKM, BPS dan dari instansi terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel. Pendekatan ini merupakan penggabungan antara data *time series* dan data *cross section*, yang berfungsi untuk melihat pertumbuhan jumlah UKM binaan antar subsektor BUMN terhadap indikator-indikator yang berpengaruh. Dan melihat pertumbuhan PDB UKM antar subsektor terhadap indikator-indikator yang berpengaruh. Data *time series* yang dipergunakan adalah rentang waktu antara tahun 1998 sampai dengan 2006.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Sistematika Penulisan

Agar tesis ini dapat dengan mudah dipahami maka alur penulisannya disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Diawali dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan lingkup penelitian, hipotesis, metodologi penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan tesis.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi kerangka teori dan studi empiris yang memaparkan konsep pelaksanaan program PKBL oleh BUMN, faktor-faktor terkait dalam penentu keberhasilan PK terhadap peningkatan jumlah UKM binaannya, konsep dan studi kasus pembangunan UKM dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan pemaparan alasan pemilihan model, sumber data, dasar analisa model ekonometri dengan metode OLS data panel dan pengujiannya yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menguraikan alasan pemilihan model, pengujian asumsi klasik, analisa dan pembahasan dari hasil interpretasi model pertumbuhan jumlah unit UK binaan BUMN dan model pertumbuhan PK BUMN terhadap GDP UKM.

BAB V KESIMPULAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan akhir dari keseluruhan penelitian, rekomendasi terhadap kebijakan yang perlu ditempuh serta saran atas keterbatasan penelitian untuk penyempurnaan pada penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

2.1 Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

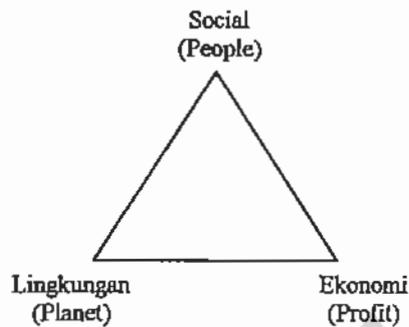
CSR yang beberapa tahun belakangan ini banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak di berbagai belahan dunia, sesungguhnya bukan merupakan konsep yang baru. Selama suatu tindak bisnis masih terjadi, maka kaitan antara pemerintah, stakeholder, LSM, masyarakat dan lingkungan akan selalu terjalin tidak dapat dipisahkan. Pada masa pertengahan abad sembilan belas, tuntutan dari masa revolusi industri adalah pembangunan perumahan secara masal dan segala fasilitas pendukungnya bagi para pekerja pabrik. Namun saat ini bisnis sudah semakin global dan membuka pasar yang semakin luas, sehingga semakin besar skala suatu perusahaan semakin meningkatkan permintaan terhadap CSR. Diantaranya untuk menyelesaikan masalah global seperti kemiskinan, air bersih dan sanitasi, keterbatasan pangan, polusi, HAM, pengangguran dan keterbatasan pendidikan dari lingkungan adalah masalah-masalah yang harus dihadapi. Bisnis adalah merupakan masalah yang kompleks namun juga sekaligus merupakan solusi masalah global meliputi permasalahan ekonomi, sosial, politik, norma, hukum, dan lingkungan. Masalah ini merupakan tantangan bagi pemerintah, masyarakat dan bisnis¹.

Salah satu isu yang tidak dapat dipisahkan dari konsep pelaksanaan CSR antara lain adalah konsep *Triple Bottom Line*. Istilah *Triple Bottom Line* dipopulerkan oleh John Elkington (1997), yang dikembangkan dalam istilah *economic prosperity, environmental quality* dan *social justice*². Elkington bahwa suatu perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan "3P", dimana selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan

¹ Zadek, S. (2001). *The civil corporation: The new economy of corporate citizenship*. London: Earthscan.

² Yusuf Wibisono, 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing. Hal 32

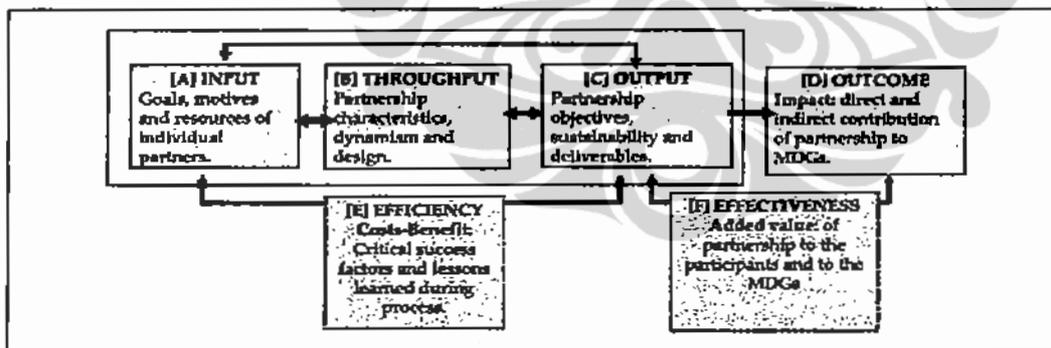
turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk berikut:



**Diagram 2. 1
 Triple Bottom
 Line**

Pada pelaksanaannya, CSR pada umumnya dilakukan berdasarkan kompetensi perusahaan namun harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur baik ditinjau dari sisi perilaku stakeholder, maupun terukur secara resiko manajemen dan dampak sosial yang dihasilkan³. Meskipun demikian pelaporan hasil pelaksanaan CSR masih memiliki kendala, baik laporan standar maupun laporan pembuktian pihak luar dimana variabel-variabel penaksirnya masih cukup kompleks.

Diagram 2.2 Framework Analisis Partnership



Dari diagram *Framework Analisis Partnership*⁴ diatas diketahui bahwa indikator evaluasi kinerja dari program kemitraan melalui CSR adalah dengan efisiensi antara *input*, *throughput* dan *output* ditinjau dari *cost-benefit* dan efektifitas dinilai dari nilai tambah untuk menghasilkan *outcome*.

³ Knox, S. and Maklan, S. (2004) Corporate Social Responsibility: moving beyond investment towards measuring outcomes; *European Management Journal* 22(5), 508–516

⁴ Ans Kolk, Rob van Tulder, Esther Kostwinder (2008), *Business and partnerships for development*, *European Manajemen Journal* 26, 262-273.

2.2 Konsep Dasar PKBL BUMN

Merujuk pada pasal 27, 33 dan 34 UUD 45, pelaksanaan ekonomi Pancasila yang berdasarkan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan merupakan landasan dalam upaya memenuhi hajat hidup orang banyak dan pencapaian cita-cita bersama menuju kesejahteraan bangsa. Dimana pada prinsipnya sistem ekonomi pancasila adalah ekonomi jalan tengah / ekonomi alternatif (*third way*) diantara sistem perekonomian sentralistik dan kapitalis. Yang lebih cenderung bersifat ramah pada pasar namun masih memiliki keberpihakan pada sektor ekonomi rakyat.

Untuk langkah implementasinya konsep trias ekonomikus dapat menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi problema bangsa dalam mengentaskan kemiskinan, dimana diperlukan intergritas hubungan kerjasama yang kuat antara tiga pelaku ekonomi (Koperasi-BUMN-Swasta) melalui program kemitraan. Pada masa orde baru, konsep kemitraan ini pernah pernah dirintis dalam bentuk Indonesia inkorporasi (*Inc*) yang ide dasarnya diadopsi dari keberhasilan Negara Jepang mengembangkan *Japan Inc.* Keberhasilan kerjasama sinergi skala besar yang di Jepang dengan praktek *keiretsu* dimotori oleh enam perusahaan besar di Jepang (Mitsubishi, Mitsui, Dai-ichi, Kangyo, Sumitomo, Sanwa, Fuyo)⁵.

Hampir semua bidang operasional, pengadaan bahan baku, pendanaan, pinjaman, asuransi, pemasaran, distribusi dan transportasi hingga kontrak kerjasama dagang, struktur kepemilikan silang serta hubungan pendanaan dilaksanakan dalam kelompok usaha terkait sehingga membentuk jaringan vertikal dan horizontal yang kokoh. Aktifitas *keiretsu* dikoordinasi oleh sogo sosha yang bergerak sebagai lembaga trading (*trading house*), dimana empat sogo sosha terbesar adalah Mitsubishi, Mitsui, Itochu dan Sumitomo. Hubungan kerjasama tersebut mampu memberdayakan ribuan perusahaan Jepang di berbagai sektor ekonomi dari skala ekonomi

⁵ <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cincorporated.pdf>

besar hingga skala industri rumah tangga. Hal tersebutlah yang menjadi landasan ingin diterapkannya Indonesia Inc, namun dengan tetap mengindahkan praktek monopoli dan persaingan usaha.

Pada masa Orde Baru beberapa perusahaan swasta besar seperti Salim, Sinar Mas, Astra, Gudang Garam dan Bimantara diharapkan mampu menjadi pelopor pembangunan melalui Indonesia Inc. Namun pada pelaksanaannya ide tersebut belum berhasil karena sifat korporasi di Indonesia masih bersifat mengejar keuntungan, lebih bersifat dagang dibanding industri dan lebih bersifat manajemen lobi dari pada manajemen profesional. Berbeda dengan implementasi yang dilakukan di Jepang dimana *Japan Inc* berisi konglomerat yang dibelakangnya disokong oleh ribuan perusahaan menengah dan kecil. Kasus yang terjadi di Indonesia, konglomerat yang ada justru berusaha menguasai pasar dari hulu sampai dengan hilir. Padahal kunci utama keberhasilan inkorporasi harus dibangun harus dibangun diatas kebersamaan usaha yang adil dan proporsional.

Berdasarkan pengalaman tersebut BUMN Inc yang ditawarkan diharapkan menjadi suatu paradigma baru yang berusaha memperbaiki kesalahan dan kelemahan dimasa lalu menuju terciptanya kesejahteraan nasional. Ditinjau dari tujuan dan fungsi pembentukannya, BUMN merupakan alat Negara yang menguasai semua sektor, khususnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Namun seiring perkembangannya BUMN harus mampu untuk bergerak ke arah kemandirian daya saing, dengan sedikit demi sedikit dilepas sahamnya pada swasta dan hanya tersisa BUMN yang vital yang wajib dikuasai oleh Negara. Sehingga dalam lima dasawarsa perubahan BUMN dari Perusahaan Negara kemudian Perjan dan Perum mulai mengarah kepada PT. Dan perubahan pola pembinaannya sejak 1998 sudah beralih tangan dari Depkeu dan Departemen Teknis kepada kementerian BUMN pada tahun 2001, sehingga semakin dapat terlihat pemisahan yang jelas antara operator, regulator dan owner.

Dibawah pembinaan Kementerian BUMN telah tersusun suatu masterplan BUMN tahun 2002-2006, dengan visi menjadikan BUMN sebagai badan usaha yang tangguh dalam persaingan plobal dan mampu memenuhi harapan stakeholder, dengan beberapa catatan⁶ :

1. BUMN sebagai Badan Usaha perlu dikembangkan sebagai pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia.
2. Sesuai azas kemanfaatan, pemilikan saham oleh negara tidak harus dipertahankan baik sebagai pemegang saham mayoritas atau minoritas.
3. Pembinaan BUMN diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan secara profesional, efisien dan tangguh sehingga mampu menghadapi persaingan global.
4. Meningkatkan kontribusi kepada negara baik dalam bentuk pajak, deviden maupun hasil privatisasi serta memenuhi harapan stakeholders.

Dari visi tersebut juga dikandung suatu misi BUMN sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi dalam ruang lingkup budaya kerja, strategi dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan pada prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMN.
2. Meningkatkan nilai perusahaan melalui restrukturisasi, privatisasi dan kerjasama usaha antar BUMN berdasar prinsip bisnis sehat.
3. Meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk menyediakan produk barang dan jasa berkualitas dengan harga kompetitif serta pelayanan bermutu tinggi.
4. Peningkatan kontribusi BUMN kepada negara
5. Peningkatan peran BUMN dalam kepedulian terhadap lingkungan, pembinaan koperasi dan UKM dalam program kemitraan.

Dari misi yang terkandung pada butir dua dan lima, merupakan dasar pembentukan BUMN Inc, yang merangkul konsep CSR dan inkorporasi. Maka BUMN Inc nantinya diharapkan mampu menjadi lokomotif terdepan bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Dimana persatuan dan pengelompokan dalam incorporated ini lebih luas maknanya dibandingkan dari sekedar perusahaan holding yang telah ada. Adapun hubungan kerjasama yang mampu untuk mengintegrasikan BUMN sesuai dengan konsep BUMN Inc adalah :

- Kerja Sama Operasi (KSO)
- Konsorsium
- Hubungan Kontraktor-Sub-Kontraktor
- Joint Venture
- Kontrak Berkaitan
- Kemitraan
- Merger

⁶ ibid

Dengan dasar itu program kemitraan dan Bina lingkungan BUMN, merupakan program implementasi dari CSR yang tengah marak namun sekaligus juga sebagai bagian dari misi BUMN dalam menarik gerbong perekonomian nasional.

2.3 Implementasi CSR dalam PKBL BUMN

Berdasarkan pada konsep triple bottom line (Profit, People and Planet), Jika dikaitkan dengan visi dan misi BUMN dan PerMen BUMN No: Per-05/MBU/2007 maka fungsi profit dengan jelas terlihat bahwa BUMN sebagai perusahaan diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan secara profesional, efisien dan tangguh sehingga mampu menghadapi persaingan global dan mampu meningkatkan kontribusi kepada negara baik dalam bentuk pajak, deviden maupun hasil privatisasi serta memenuhi harapan *stakeholders* yaitu pemerintah, masing-masing perusahaan dan masyarakat.

Fungsi people dan planet terlihat dari kontribusi BUMN dalam program kemitraan untuk pembinaan koperasi dan UKM nasional yang mencakup dari sisi pendanaan berupa pinjaman umum maupun khusus untuk memperkuat permodalan. Mengingat kendala yang dihadapi oleh sektor UKM tidak hanya pada masalah permodalan namun juga pada masalah keterbatasan SDM, lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar maka program kemitraan juga secara khusus melakukan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal lainnya untuk peningkatan produktifitas UKM binaan.

Sedangkan kepedulian terhadap lingkungan melalui program bina lingkungan yang disalurkan bagi korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana prasarana umum serta ibadah, dan pelestarian alam.

2.4 Perbedaan Regulasi dan Implementasi PKBL BUMN

Implementasi PKBL BUMN tidak semuanya berfokus pada penyaluran dana saja dalam usaha meningkatkan produktivitas

kinerja UK binaan, namun sampai dengan 2007 indikator keberhasilannya masih terbatas dalam melihat peningkatan jumlah unit yang dapat dibantu sehingga tidak mampu melihat peningkatan kinerja ekonomi pada masing-masing unit UKM binaannya. Hal ini yang perlu mendapat revisi lebih lanjut pada PerMen BUMN selanjutnya.

Pelaksanaan PKBL di tingkat lembaga penyalur cukup bias terhadap ketentuan dalam PerMen BUMN No: Per-05/MBU/2007, dimana dalam pelaksanaannya program kemitraan hanya merupakan pinjaman pada masing-masing unit binaan. Namun beban pembinaan yang terdiri dari pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal lainnya yang seharusnya bersifat khusus pada masing-masing UKM binaan yang seharusnya diambil dari maksimal 20% dana PK dikelompokkan pada program BL yang seharusnya lebih bersifat umum sebagai bentuk keperdulian sosial yang besarnya bisa mencapai sepertiga bagian dari alokasi dana BL. Besarnya bunga pinjaman pokok sebesar 6%, pada dasarnya tidak mampu menutupi biaya administrasi bagi lembaga penyalur sehingga secara tidak langsung memotong dana BL untuk menutupi kas administrasi. Hal ini perlu pembenahan manajemen lebih lanjut dalam upaya meningkatkan kinerja dan efisiensi PKBL BUMN.

2.5 Dasar Hukum Program PKBL dalam Pengembangan UKM

Dalam pengejawantahan konsep CSR melalui program BUMN Targetnya sudah ditetapkan untuk bantuan bagi program PKBL yang dibagi menjadi PK (Program Kemitraan) yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman baik untuk modal usaha maupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri dan BL (Bina Lingkungan) merupakan hibah untuk pengentasan kemiskinan.

Dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan UKM melalui BUMN, pemerintah menuangkan kebijakannya pada awalnya bermula dari KepMen Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 tentang pedoman

pembinaan pengusaha lemah dan koperasi melalui BUMN dengan menyalurkan 1 s/d 5 % dari laba BUMN yang disisihkan. Kemudian disempurnakan dengan SK No 316 / KMK.016/1994 yang mewajibkan penyisihan laba untuk program PKBL (Program Keeltraan Bina Lingkungan) dimana PK merupakan program kemitbaan untuk pemberd`yaan UKM dengan bunga pinjaman 6% dan BL merupakan hibah untuk pengentasan kemiskinan. Kemtdian pada masa pasca reformasi diperbaharui dengan PerMen BUMN No: Per-216/P.BUMN/1999 dengan bunga pinjaman tetap 6%, kemudian diperbaharui melalui KepMen BUMN No: Kep-236/MBU/2003 yang memisahkan antara penyisihan program PK sebesar 3% dan BL sebesar 2%, namun PK dibuat dengan bunga pinjaman dibuat berjenjang antara 6% s/d 12% berdasarkan besaran jumlah pinjaman dan BL sebesar 2% dari laba masing-masing BUMN, selanjutnya disempurnakan lagi melalui PerMen BUMN No: Per-05/MBU/2007 dengan bunga pinjaman dikembalikan menjadi 6%, dikarenakan sistem bunga berjenjang tidak memberikan insentif bagi para pelaku UKM sehingga menurunkan jumlah peminjam dan penyaluran program PKBL kepada masyarakat yang semula dilakukan oleh masing-masing BUMN langsung saat ini dapat diwakilkan melalui LKM-LKM⁷.

Dana pembinaan Program Kemitraan berasal dari :

- Bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar 1% sampai dengan 5% dari laba setelah pajak.
- Pengembalian pinjaman & bunga dari mitra binaan.
- Hasil bunga dari penempatan dana yang belum tersalurkan.

Dana penyaluran Program Kemitraan terbagi atas :

- Pinjaman yang digulirkan pada masing-masing UK binaan.
- Hibah diklat (pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal lainnya).
- Biaya administrasi program kemitraan.

⁷ Yusuf Wibisono, *op. cit.* Hal 89

- Sisa saldo yang tidak tergulirkan.

Bantuan tersebut diberikan kepada usaha kecil minimal 50%, koperasi non karyawan BUMN bersangkutan maksimum 45% dan koperasi karyawan BUMN yang bersangkutan maksimum 5%.

Pemberian bantuan kepada mitra binaan berupa :

- Pinjaman modal kerja, investasi dan jaminan, ditetapkan minimal 70 % dari dana tersendiri tiap tahun dan untuk masing-masing mitra binaan maksimum 75% dari kebutuhan.
- Hibah Khusus membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, pengkajian & penelitian, ditetapkan maksimum 30% dari dana tersedia tiap tahun dan untuk masing-masing mitra binaan maksimum 75% dari kebutuhan.
- Penyertaan, diberikan hanya untuk perusahaan modal ventura dan besarnya penyertaan ditetapkan oleh menteri keuangan.

Pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi harus dilakukan BUMN Pembina secara langsung, dan pembinaan bersifat sementara, dalam jangka waktu maksimal 5 tahun. Tingkat bunga lebih rendah dari kredit komersial perbankan dengan bunga kredit 6 hingga 12 % yang memperhatikan batasan asset/ omset & kelayakan usaha yang dimiliki oleh mitra binaan. Bantuan pembinaan BUMN terhadap pengusaha kecil dan Koperasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pemagangan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen serta ketrampilan teknik produksi.
- Pinjaman modal kerja, investasi dengan tingkat bunga yang disesuaikan dengan kemampuan mitra binaan untuk meningkatkan produksi dan penjualan.
- Pemasaran dan promosi hasil produksi.
- Pemberian jaminan dalam rangka memperoleh kredit perbankan dan atau transaksi dengan pihak ketiga.

- Penyertaan pada perusahaan modal ventura di Daerah Tingkat 1 yang membantu permodalan dan pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi.

2.6 Definisi Usaha Kecil Mikro (UKM)

Berbeda dengan istilah industri dalam ilmu ekonomi yang berarti kumpulan perusahaan sejenis, maka UKM atau Industri kecil dalam penelitian ini menggunakan definisi BPS yakni perusahaan / usaha industri adalah suatu unit kesatuan produksi yang terletak di suatu tempat tertentu dan melakukan kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang jadi / setengah jadi atau dari barang bernilai rendah menjadi barang bernilai tinggi.

Pengertian industri kecil di Indonesia sangat beragam, diantaranya:

- Menurut Bank Indonesia definisi industri kecil berdasarkan nilai asetnya. Yang dimaksud industri kecil adalah usaha yang memiliki nilai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp 600 juta.
- Menurut Kadin yang dimaksud industri kecil adalah usaha industri yang memiliki modal kurang dari Rp 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp 600 juta.
- Menurut kategori BPS, usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu : (1) Industri rumah tangga dengan pekerja 1 s/d 4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5 s/d 19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.
- Menurut Departemen Perdagangan dan Perindustrian memberikan batasan usaha kecil dengan membedakannya menjadi kelompok industri kecil dan perdagangan kecil. Industri kecil adalah kelompok usaha yang mewakili investasi peralatan dibawah 70 juta, investasi pertenaga kerja maksimal Rp 625 ribu. Jumlah tenaga kerja 20 orang, serta memiliki aset perusahaan tidak lebih

dari Rp 100 juta. Perdagangan kecil digolongkan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp 200 juta.

- Berdasarkan UU No.9 Tahun 1999 batasan terhadap UKM yaitu usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset bersih Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp 1 miliar, milik warga Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan.

2.3.1 Permasalahan UKM

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UKM)⁸ antara lain meliputi :

A. Faktor Internal

1. Kurangnya Permodalan

Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya UKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup, yang mengandalkan pada modal si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta bank tidak dapat dipenuhi.

2. Sumber Daya Manusia yang Terbatas

Keterbatasan SDM Usaha Kecil Mikro baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengolahan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit berkembang secara optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDMnya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

⁸ Hafzah, 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Infokop. Nomor 25 TahunXX

3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Penetrasi Pasar

UKM yang umumnya merupakan unit usaha keluarga mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karenanya produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.

B. Faktor Eksternal

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijakan pemerintah untuk menumbuhkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Wilayah

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya.

3. Implikasi Otonomi Daerah

Perubahan sistem ini akan berimplikasi terhadap pelaku UKM berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan kepada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah tersebut.

4. Implikasi Perdagangan Bebas

Dalam Hal ini UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 9100), isu HAM dan isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan Perdagangan Non Tarif (*Non tariff barrier to trade*)

5. Sifat Produk dengan Lifetime Pendek

Sebagian besar produk UKM memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk busana dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.

6. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Mitzerg, Musselman dan Hughes (Sutojo, 1994:15) didapat kesimpulan bahwa ciri-ciri umum keterbelakangan industri kecil meliputi beberapa hal : Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang memiliki rencana usaha, struktur organisasinya bersifat sederhana, jumlah tenaga kerjanya terbatas dengan pembagian kerja yang longgar, kebanyakan tidak melakukan pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, sistem perhitungan akuntansinya kurang baik bahkan kadang tidak dimiliki sama sekali, skala ekonominya terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya, kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasarnya cenderung terbatas dan margin keuntungannya sangat tipis. Kesemua faktor tersebut tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor struktural hubungannya dengan akses ke dalam birokrasi.

2.3.2 Pengembangan Usaha Kecil Mikro

UKM merupakan mesin pertumbuhan ekonomi suatu Negara dimana kinerjanya perlu mendapat dukungan penuh dari Usaha Besar, khususnya pada masa transisi ekonomi dari system ekonomi tradisional menuju sistem ekonomi Negara maju. Kelemahan kinerja UKM pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor lemahnya kebijakan terhadap dukungan institusi, dimana UKM pada masa perekonomian transisi membutuhkan sumber input dan jaringan pasar yang actual yang merupakan potensi dari Usaha Besar⁹. Akibatnya kontribusi UKM

⁹ R.J. McIntyre; B. Dallago (Eds.); Palgrave; Basingstoke, 2003, Small and medium enterprises in transitional economies, 261 pp, Maison des Sciences Économiques, Université de Paris.

secara akumulatif terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi sangat kecil. UKM berdasarkan manajemennya terbagi menjadi dua, yaitu *proprietorship* atau pemilik usaha dan *entrepreneurship*. Manajemen berdasarkan konsep *proprietorship* hanya berpaku pada konsumsi internal dan akumulasi modal UKM, namun *entrepreneurship* lebih bersifat mengembangkan bisnis. Pada perekonomian tradisional konsep manajemen *proprietorship* cenderung lebih dominan namun untuk transisi menjadi perekonomian negara maju perlu perlu pengalihan kearah sistem *entrepreneurship* untuk meningkatkan daya saing secara global. Studi kasus yang terjadi di Rusia, Hongaria, China, Finlandia menunjukkan bahwa keberhasilan UKM perlu didukung secara institusi oleh Negara dengan pengaturan manajemen pendanaan dan kerjasama dengan BUMN, dimana UKM diposisikan dalam bertindak sebagai sub-unit dari BUMN.

Keberhasilan program pembiayaan dan pelaksanaan kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan UKM dapat ditemui juga pada contoh sukses negara-negara Jepang, Cina Taipe, Jerman dan Korea Selatan¹⁰. Dimana peran pemerintah adalah sebagai :

- Membangun struktur dan melakukan pendekatan komprehensif dalam pemberdayaan UKM melalui: Kebijakan, implementasi dan koordinasi, stabilitas dan dukungan infrastruktur jaringan antar sektor public dan swasta.
- Memfokuskan UKM kedalam kamar dagang tersendiri yang dihubungkan dengan asosiasi perdagangan dan perusahaan besar.
- Kemudahan akses permodalan.
- Memfokuskan pada pendidikan, pelatihan dan pemagangan dan dalam meningkatkan kualitas SDM.
- Meningkatkan budaya entrepreneur dan etika bisnis.

Dari contoh diatas menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya dalam menyalurkan modal, melihat potensi dan kendalanya

¹⁰ RAM Consultancy Service Sdn Bhd, (2005), SME Access to Financing: Addressing the Supply side of SME Financing, REPFS Project No. 04/003, 29-31.

pemerintah juga melakukan upaya yang lebih terintegrasi dalam meningkatkan kinerja skala usaha kecil.

Keberadaan UKM di Indonesia relatif lemah dan kurang efisien dalam menjalankan usahanya, maka dalam pelaksanaan program pengembangan ekonomi yang tertuang dalam perencanaan pembangunan, pemerintah selalu menyebutkan komitmen untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan UKM agar produktifitas dan daya saingnya dapat ditingkatkan.

Keberadaan UKM untuk negara berkembang dirasakan sangat perlu, hal ini didasarkan pada Berry, et al. (2001) yang dikarenakan tiga hal yaitu:

- Karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif.
- Sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai pertumbuhannya melalui investasi dan perubahan teknologi.
- UKM sering diyakini memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha besar.

Kuncoro (2000), juga menyebutkan bahwa UKM di Indonesia telah menanamkan peranan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jenis usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga. Strategi pengembangan yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan profesionalisme dan efisiensi perusahaan. Salah satu tindakannya yaitu dengan memilih bidang usaha tertentu sebagai usaha utamanya, setelah itu mereka akan menempuh langkah menggunakan Sumber Luar (outsourcing) dalam memenuhi kebutuhan internalnya. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang bagi industri kecil sebagai mitra binaan.

Menurut Sabirin (2001) aktifitas pembiayaan mikro dilakukan oleh lembaga pembiayaan mikro (LKM) yang dapat berbentuk lembaga swadaya masyarakat, koperasi simpan pinjam, bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau lembaga keuangan non Bank. Para nasabah lembaga pembiayaan mikro biasanya adalah pengusaha-pengusaha berpendapatan rendah baik di daerah

perkotaan maupun pedesaan, seperti pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil dan sejenisnya.

Beberapa alasan yang melatar belakangi pesatnya aktivitas pembiayaan mikro di banyak negara berkembang adalah :

- Aktivitas pembiayaan mikro dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin.
- Aktivitas pembiayaan mikro dapat membantu pembentukan kelompok-kelompok pembiayaan mandiri, bebas dari subsidi dan dikelola secara lokal.
- Aktivitas pembiayaan mikro seringkali menyerupai aktivitas lembaga pembiayaan tradisional seperti arisan tetapi dengan biaya yang lebih terjangkau dan permanen.
- Aktivitas pembiayaan mikro membantu memperkuat dan memperluas sistem keuangan formal yang ada melalui perluasan cakupan pasar tabungan dan kredit bagi lembaga keuangan formal.
- Tingkat keberhasilan dalam pengembangan lembaga pembiayaan mikro semakin meningkat di banyak negara.
- Berbagai hasil eksperimen dan inovasi telah menghasilkan produk-produk keuangan yang semakin baik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Penelitian Elias Sanidas pada 20 negara maju pada tahun 1960 hingga 1990, diantaranya kesimpulan yang cukup signifikan adalah perbedaan antara Negara Jepang dan US. Perusahaan Amerika mengandalkan *core business* pada perusahaan besar dengan diversifikasi produk yang tinggi, memiliki sistem usaha monopoli dan oligopoli serta sistem manajemen yang sentralistik. Sedangkan perusahaan Jepang adalah gabungan dari sejumlah konglomerat dengan sokongan usaha menengah dan kecil dibawahnya, dengan diversifikasi produk yang rendah serta sistem manajemen yang terdesentralisasi. Namun pertumbuhan ekonomi di negara Jepang dan Italia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

Amerika dan Jerman, hal ini menunjukkan bahwa faktor kompetisi yang terjadi di tingkat UK dengan tanpa sistem manajemen yang sentralistik mampu menghasilkan kualitas produksi yang memiliki nilai tambah yang terbaik pada akhirnya sehingga menghasilkan daya jual yang semakin tinggi di pasar internasional.

Tabel 2.3 Penelitian-penelitian terdahulu

No	Pengarang, Judul dan Sumber Data	Metodologi			Kesimpulan
		Jenis Data	Variabel	Metoda	
1	<i>Yudi Risman Hadianto (2007)</i> Peranan perdagangan luar negeri, faktor produksi dan kemitraan terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia	Data Panel	$Ln(Y) = Ln(XIG) + Ln(MBM) + Ln(K) + Ln(L)$ $Ln(Y) = Ln(XIG) + Ln(MBM) + Ln(NYB) + Ln(K) + Ln(L)$ Y : Nilai output riil masing-masing sub sektor UK dan UM K : Nilai investasi riil yang diserap oleh masing-masing subsektor UK dan UM L : Jumlah tenaga kerja masing-masing sub sektor UK dan UM XIG : Nilai ekspor riil sektor UK dan UM MBM : nilai impor barang modal riil NYB : Nilai output seluruh subsektor UB dikurangi ekspor riil UB	OLS	Terdapat hubungan positif antara ekspor, investasi, tenaga kerja, kemitraan UKM dengan usaha besar terhadap pertumbuhan UKM; Impor barang modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan UKM
2	<i>Rosalia Hawani Simanjuntak (1997)</i> Pengaruh penerimaan dana pembinaan BUMN terhadap perkembangan kegiatan usaha koperasi di kotamadya jakarta barat	Time Series	$SDM = DIK + LAT + LIT + GANG$ $JAR = PNJM + JAM$ $SHU = PNJLN + JAR + LAPKER$ $MDL = SHU$ $PERKOP = SAV$ SDM : Sumber daya manusia DIK : Pendidikan LAT : Pelatihan LIT : Penelitian GANG : Pemagangan JAR : Perluasan Jaringan Usaha PNJM : Pinjaman JAM : Jaminan pinjaman SHU : Sisa hasil usaha PNJLN : Nilai output penjualan JAR : Jaringan LAPKER : Lapangan kerja MDL : Modal PERKOP : Perkembangan koperasi SAV : Simpanan masing-masing UKM	OLS	Terdapat hubungan positif antara dana pembinaan BUMN terhadap perkembangan kegiatan koperasi di kodya jakarta barat
3	<i>Puspltowati (2001)</i> Kontribusi industri manufaktur Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor penentu yang mempengaruhi pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia	Time Series	$Y = C K \alpha L \beta e \log R$ Y = GDP C = Skala Parameter K = Kapital Stock L = Angkatan kerja e log R = menggambarkan tingkat produksi yang disamakan dengan perubahan produktivitas.	OLS	Terdapat hubungan positif antara pertumbuhan angkatan kerja, ekspor terhadap pertumbuhan industri manufaktur; Capital tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan industri manufaktur

4	<p>Gebremeskel H. Gebremerlam, Tesfa G. Gebremedhin and Randhall W. Jackson(2004) The Role of Small Bussiness in Economic Growth and Poverty Alleviation in West Vrginia: An Empirical Anaysis West Virginia (1980-2001)</p>	time Series	$LRGSPPC_t = \alpha + B1LSME_t + B2LUNEMP_t + B3LGTPC_t + B4CLCPI_t + B5T + 1t$ $LPVT_t = \alpha + B6LDRGSPPC_t + B7LDLPVT_t + B8LGTPC_t + B9CLCPI_t + B10T + 2t$ $LPVT_t = \alpha + B11LSME_t + B12LUNEMP_t + B13LGTPC_t + B14CLCPI_t + B15LDLPVT_t + B16T + 3t$ $LPVT_t = \alpha + B17LSME_t + B18LDRGSPPC_t + B19LGTPC_t + B20CLCPI_t + B21LDLPVT_t + B22T + 4t$ <p>LSME = Log of Small business employment LUNEMP = log of unemployment rate LGTPC = Log of gov't transfer to person per capita CPCPI = log of consumer price Index LDRGSPPC = one periode lag real gross state product per capita T = trend variable</p>	OLS dan GLS	<p>Terdapat hubungan positif antara usaha kecil dan pertumbuhan ekonomi; Terdapat hubungan terbalik antara kemiskinan dengan usaha kecil dan pertumbuhan ekonomi; Terdapat hubungan empiris antara usaha kecil, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan</p>
5	<p>Ellas Sanidas (2000) On the organization of SME and Economic Growth in the USA and Japan 20 negara maju (1960-1990)</p>	Data Panel	$RG = f(Y60, TOEST, PAT, EXDIV, HUCAP, INCTAX, AGRSEC)$ <p>RG : Growth of rate GDP Y60 : GDP perworker relative to the USA in 1960 POP : Population in 1990 PAT : patent granted during 1987 to 1990 (technological innovation) EXDIV : export market value HUCAP : human capital factor INCTAX : personal income tax AGRSEC : percentage of total employment in primary sector</p>	OLS	<p>Kompetisi dan SME memiliki peran yang menentukan dalam pertumbuhan ekonomi; Demand yang tidak terpenuhi berperan besar dalam menentukan pertumbuhan ekonomi; Pertumbuhan ekonomi USA dan Jepang dipengaruhi oleh peningkatan human capital, faktor kompetisi dan peningkatan teknologi.</p>
6	<p>Ratna Kusuma Ayu Nugroho (2006) Analisis pengaruh Jumlah unit usaha , nilai produksi dan modal terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil: studi kasus pada industri tahu di kabupaten kediri</p>	Time Series	$Y = \alpha + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$ <p>Y : jumlah penyerapan tenaga kerja X1 : Jumlah unit produksi X2 : nilai produksi X3 : jumlah modal</p>	OLS	<p>Jumlah unit usaha, peningkatan nilai produksi dan modal berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja</p>
7	<p>Yuji Kubo, Yong Sun Lee (1995) A Model of Endogenous Growth with a Tradeoff between Investments In Physical and Human Capital, 78 negara di dunia meliputi negara berkembang dan negara maju</p>	Data Panel	$G = \beta_0 + \beta_1sk + \beta_2sh + \beta_3n + \beta_4Y(O)$ <p>G = Tingkat pertumbuhan ekonomi Sk = Rasio investasi fisik terhadap PDB Sh = Investasi mutu modal manusia N = Tingkat pertumbuhan populasi Y(O) = Pendapatan perkapita pada awal tahun</p>	OLS	<p>Investasi fisik dan investasi kualitas modal manusia mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan pendapatan perkapita; Pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita awal tahun mempunyai hubungan negatif dengan pertumbuhan pendapatan perkapita</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2006). Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program Program Kemitraan BUMN terhadap pertumbuhan jumlah UKM binaannya dan pengaruhnya terhadap PDB riil Indonesia di sektor UKM yang dibagi berdasarkan dua puluh satu jenis subsektor dari sembilan sektor perekonomian berdasarkan pembagian definisi dari BPS dalam kurun waktu 1998 sampai dengan 2006

3.3 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dua buah model yang berbeda, model pertama menggunakan pendekatan kinerja PerMen BUMN No: Per-05/MBU/2007 untuk menganalisa pengaruh penyisihan laba BUMN dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah UKM binaannya. Sedangkan metode pemodelan yang kedua menggunakan pendekatan teori produksi Cobb-Dogias,

untuk melihat pengaruh Program Kemitraan (PK) BUMN sebagai bagian dari kapital bagi PDB riil UKM Indonesia.

Model Pertama : Model Pertumbuhan Unit UKM Binaan

Model pertama diberi nama model pertumbuhan unit UKM binaan BUMN, dengan pendekatan indikator kinerja dari program kemitraan berdasarkan PerMen BUMN No: Per-05/MBU/2007 sebagai faktor pengaruh internal bagi PKBL BUMN dan iklim investasi skala usaha kecil dengan indikator pertumbuhan GDP real (growth) pertahun sebagai faktor pengaruh eksternal bagi keberhasilan PK BUMN. Variabel internal diasumsikan bahwa jumlah dana masuk pada persamaan 3.1 (laba yang disisihkan, pengembalian pokok dan bunga pinjaman, serta bunga deposito dana PK) sama dengan jumlah dana keluar pada persamaan 3.2 (dana tersalur yang terdiri dari dana pinjaman bergulir, dana hibah diklat serta biaya administrasi dan sisa saldo yang tidak tersalur) merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah unit UKM binaan BUMN. Sedangkan iklim investasi UKM nasional secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan unit UKM binaan BUMN.

$$Unit_t = f(laba_t, pokok_t, bunga\ pinjaman_t, bunga_t\ giro, iklim\ investasi_t) \dots \dots \dots (3.1)$$

$$Unit_t = f(dana\ tersalur_t, sisa\ saldo_t, iklim\ investasi_t) \dots \dots \dots (3.2)$$

Alasan pemilihan model yang bertujuan untuk melihat kinerja bantuan program kemitraan berdasarkan penelitian Rosalia Simanjuntak (1997) maka penulis mencoba melihat dari sisi aliran dana masuk, dimana penyisihan 1% - 3% laba BUMN merupakan sumber pendanaan utama bagi program kemitraan BUMN, pengembalian pokok pinjaman sebagai indikator keberhasilan dari insentif yang dilakukan oleh program kemitraan BUMN dan bunga deposito merupakan tambahan pemasukan bagi program kemitraan BUMN khususnya berfungsi untuk menutup biaya administrasi dalam pelaksanaan program. Sedangkan aliran dana keluar (dana tersalur + sisa saldo yang tidak tersalur) tidak dipergunakan untuk mengestimasi

indikator kinerja program kemitraan karena dari nilainya dapat menimbulkan bias akibat dipengaruhi oleh penyisihan laba tahun berjalan, pengembalian pinjaman pokok dan bunga pinjaman, bunga deposito program kemitraan dan sisa saldo tidak tersalur tahun sebelumnya. Dengan demikian, maka aliran dana keluar lebih dipergunakan untuk melihat pengaruh yang dihasilkan oleh program kemitraan terhadap pertumbuhan PDB UKM pada model kedua. Apabila koefisien yang dihasilkan oleh faktor eksternal signifikan dan lebih besar dari koefisien yang dihasilkan dari penyisihan laba, pengembalian pokok dan bunga deposito, menandakan peningkatan jumlah unit UKM Program Kemitraan BUMN, lebih dipengaruhi oleh iklim investasi UKM nasional sehingga tanpa bantuan program kemitraan BUMN sekalipun unit UKM di sekitar lingkungan perusahaan BUMN akan tetap tumbuh.

Apabila persamaan dituliskan dengan model ekonometri dengan mengambil logaritma natural (\ln), untuk melihat elastisitas pertumbuhan model antar variable independen terhadap variable independen. Pada kedua sisi pada persamaan 3.3 maka diperoleh persamaan linier berikut :

$$\ln \text{Unit} = C + A * \ln \text{Laba} + B * \ln \text{Pokok} + C * \ln \text{BgaPK} + D * \text{GDPGW} \dots \dots \dots (3.3)$$

dimana semua koefisien adalah elastisitas konstan, c adalah besaran konstan dan et adalah error term yang menunjukkan semua pengaruh eksogen lainnya.

Model Kedua : Model Pertumbuhan PK Terhadap PDB UKM

Model kedua diberi nama model pertumbuhan program kemitraan BUMN terhadap PDB UKM. Pendekatan yang dipergunakan dengan mengikuti model pertumbuhan Solow (1956) pada persamaan 3.4 yang mengasumsikan bahwa output (Y) dipengaruhi oleh hasil interaksi antara tenaga kerja capital dan perkembangan teknologi maka diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan pada persamaan berikut :

$$Y_t = f(A_t, K_t, L_t) \dots \dots \dots (3.4)$$

Persamaan di atas tersebut merupakan fungsi produksi agregat dari perekonomian dalam kurun waktu t , sehingga jika dinyatakan dalam fungsi Cobb Douglas pada persamaan 3.5 maka menjadi persamaan berikut:

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^\beta \dots \dots \dots (3.5)$$

Alasan pemilihan model untuk melihat pengaruh Program Kemitraan BUMN terhadap pertumbuhan PDB riil UKM dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu. Variabel dana tersalur yang terbagi atas dana pinjaman bergulir, dana hibah diklat serta biaya administrasi sesuai dengan penelitian Yuji Kubo, Yong Sun Lee (1995), Yudi Risman Hadianto (2007) dan Retno kusuma Ayu (2006) merupakan faktor investasi diluar investasi fisik yang bertujuan meningkatkan modal kerja, pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal lainnya dalam upaya peningkatan produktifitas UK binaan. Penggunaan Variabel Investasi fisik riil dan tenaga kerja dipergunakan sesuai dengan penelitian terdahulu dari Yudi Risman Hadianto (2007) dan Pusopowati (2001) bahwa dalam mikroekonomi fungsi utama yang berpengaruh terhadap faktor produksi adalah faktor capital dan labor. Penggunaan variabel jumlah unit UK sebagai entrepreneur sesuai dengan penelitian terdahulu dari Elias Sanidas (2000) dan Gebremeskel H. Gebremeriam, Tesfa G. Gebremedhin and Randhall W. Jackson (2004) dimana peningkatan jumlah unit UKM memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan GDP, dikarenakan skala usaha ini lebih bersifat padat karya bukan padat modal.

Apabila persamaan dituliskan dengan model ekonometri dengan mengambil logaritma natural (\ln), untuk melihat elastisitas pertumbuhan model antar variable independen terhadap variable independen. Pada kedua sisi persamaan 3.6 maka diperoleh persamaan linier berikut :

$$\ln GDP = C + A * \ln Tersalur + B * \ln Inv + C * \ln Labor + D * \ln Unit + et. \dots \dots (3.6)$$

dimana semua koefisien adalah elastisitas konstan, c adalah besaran konstan dan et adalah error term yang menunjukkan semua pengaruh eksogen lainnya.

3.4 Data dan Sumber Data

Data dari table 3.1 yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Kementerian Negara BUMN (MenNeg BUMN) bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenNeg KUKM), Badan Pusat Statistik (BPS) serta data pendukung lain diperoleh dari Bank Indonesia.

Data GDP riil masing-masing subsektor UKM (usaha kecil mikro), nilai investasi riil masing-masing subsektor, jumlah tenaga kerja masing-masing sub sektor diperoleh dari Kementerian Negara KUKM yang merupakan hasil kerjasama dengan BPS. Data penyisihan laba BUMN, pembayaran pokok pinjaman, bunga deposito PK, dana tersalur dan jumlah unit binaan program kemitraan BUMN diperoleh dari Kementerian Negara BUMN.

Semua data yang disebutkan diatas dan digunakan dalam penelitian ini, ada yang langsung digunakan tetapi ada juga yang memerlukan pengolahan terlebih dahulu. Data PDB dan Investasi dari Meneg KUKM dapat langsung digunakan karena kedua data tersebut tersedia dalam nilai riil persubsektor ekonomi. Sedangkan untuk data lainnya, yaitu tenaga kerja, unit UKM pada masing-masing sub sektor ekonomi dan pengelompokan subsektor perusahaan BUMN masih perlu diolah terlebih dahulu sebelum dipergunakan dalam proses estimasi.

Data tenaga kerja masing-masing sub sektor diperoleh dari data tenaga kerja masing-masing sektor ekonomi, PDB riil masing-masing sektor ekonomi dan data PDB riil masing-masing subsektor ekonomi. Dengan asumsi antar subsektor ekonomi dalam satu sektor ekonomi yang sama memiliki produktivitas yang sama. Perhitungan untuk mendapatkan data tenaga kerja masing-masing subsektor ekonomi sebagai berikut :

$$TngK_{rj_Subsektor_{ij}} = TngK_{rj_Sektor_i} * \frac{PDB_{riil_UK_Subsektor_{ij}}}{PDB_{riil_UK_sektor_i}} \dots \dots \dots (3.7)$$

Dimana :

- i : sektor-sektor perekonomian di Indonesia (terdiri dari 9 sektor)
- j : subsektor-subsektor perekonomian dalam satu sektor ekonomi yang sama.

Berikut ini adalah contoh dimana, i = sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; j = subsektor tanaman dan bahan makanan. Tenaga kerja sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tahun 2006 adalah 37,965,878 orang; PDB riil sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tahun 2006 adalah sebesar 226,756.9 milyar rupiah; PDB riil subsektor tanaman bahan makanan tahun 2006 adalah 128,281.00 milyar rupiah, maka jumlah penyerapan tenaga kerja subsektor tanaman bahan makanan didefinisikan sebagai berikut :

$$TK_{tbn} = 37,965,878 * \frac{128,281.00}{226,756.90}$$
$$TK_{tbn} = 21,478,071$$

Dengan demikian tenaga kerja sub sektor tanaman bahan makanan tahun 2006 adalah 21,487,071 orang.

Begitu juga dengan data jumlah unit UKM nasional masing-masing sub sektor diperoleh dari data UKM masing-masing sektor ekonomi, PDB riil masing-masing sektor ekonomi dan data PDB riil masing-masing subsektor ekonomi.

$$UnitUK_{j_Subsektor_{ij}} = UnitUK_{j_Sektor_i} * \frac{PDB_{riil_UK_Subsektor_{ij}}}{PDB_{riil_UK_sektor_i}} \dots \dots \dots (3.8)$$

Dimana :

- i : sektor-sektor perekonomian di Indonesia (terdiri dari 9 sektor)
- j : subsektor-subsektor perekonomian dalam satu sektor ekonomi

Tabel 3.1 Data dan Sumber data Penelitian

No	Data yang digunakan	Satuan	Individu dan periodeobservasi	Sumber Data
1	Penyisihan laba PK	Juta Rupiah	21 subsektor BUMN periode 1998-2006	MENEG BUMN
2	Pengembalian pokok pinjaman PK	Juta Rupiah	21 subsektor BUMN periode 1998-2006	MENEG BUMN
3	Bunga giro dana PK	Juta Rupiah	21 subsektor BUMN periode 1998-2006	MENEG BUMN
4	Jumlah Unit UKM PK	Unit	1 unit (agregat) periode 1999-2006	MENEG BUMN
5	GDP riil UKM masing-masing subsektor	Milyar Rupiah	21 subsektor ekonomi periode 1998-2006	MENEG KUKM &BPS
6	Dana PK tersalur	Juta Rupiah	21 subsektor BUMN periode 1998-2006	MENEG BUMN
7	Nilai investasi riil UKM yang diserap masing-masing subsektor	Juta Rupiah	21 subsektor ekonomi periode 1998-2006	MENEG KUKM &BPS
8	Jumlah Tenaga Kerja UKM yang diserap masing-masing subsektor	Orang	9 sektor ekonomi periode 1998-2006	MENEG KUKM &BPS
9	Jumlah Unit UKM nasional masing-masing sub sektor	Unit	9 sektor ekonomi periode 1998-2006	MENEG KUKM &BPS

3.5 Metode Analisa Data Panel

Menurut Baltagi dalam Gujarati (2003) data panel memiliki beberapa kelebihan, yakni:

- a. Karena data panel berkaitan dengan laporan masing-masing perusahaan dari waktu ke waktu, dapat dipastikan terjadi heterogenitas pada unit-unit tersebut.
- b. Dengan menggabungkan data *time series* dengan *cross section*, data panel memberikan "data yang lebih informatif, lebih variabel, lebih sedikit kolinearitas antar variabel, lebih banyak *degree of freedom*, dan lebih efisien".
- c. Dengan mengkaji observasi *cross section* yang berulang, data panel lebih tepat digunakan untuk mempelajari dinamika perubahan (*dynamics of change*).

- d. Data panel lebih mampu mendeteksi dan mengukur efek-efek yang tidak mudah di observasi dalam *times series* dan *cross section* murni.
- e. Data panel memungkinkan untuk mengkaji model-model yang lebih kompleks.
- f. Dengan membuat data tersedia untuk beberapa ratus unit, data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin timbul jika kita mengagregasi individu-individu atau badan-badan ke dalam agregasi yang besar.

Menurut laboratorium Ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi UI (2005), data panel merupakan gabungan antara data lintas waktu (*time-series*) Dan data lintas individu (*cross section*). Data panel sangat bermanfaat karena dengan data panel peneliti dapat menganalisa efek ekonomi yang tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan data *time series* ataupun *cross section* saja. Disamping itu data panel dapat menurunkan tingkat *omitted variables* / kelengkapan variabel.

Dalam penelitian ini metode pengujian yang digunakan adalah metode estimasi ekonometri dengan data panel. Penggunaan metode data panel berdasarkan pertimbangan ketersediaan data yang terdiri dari 8 data *time series* tahunan dan data 21 individu subsektor usaha.

Secara garis besar langkah-langkah analisa ekonometri terdiri atas tiga langkah estimasi. Pertama, melakukan estimasi model dengan *Pooled Least Square Estimation* (PLS) atau estimasi dengan pendekatan kuadrat terkecil. Kedua, melakukan estimasi dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dan ketiga estimasi dilakukan dengan *Random Effect Model* (REM). Setelah melakukan tiga estimasi tersebut selanjutnya dilakukan proses pengujian untuk memilih metoda analisa data panel yang lebih tepat. Pertama dilakukan uji F untuk menentukan metode analisa apakah PLS atau FEM yang lebih baik. Jika metoda PLS yang terpilih maka proses analisa dilakukan dengan metode tersebut. Namun bila FEM yang terpilih maka proses pengujian dilakukan dengan melakukan Hausman Test.

Hausmant Test dilakukan untuk menentukan apakah FEM ataukah REM yang lebih tepat digunakan sebagai metoda analisa. Bila metoda REM yang terpilih maka analisa dilakukan dengan metode tersebut. Sedangkan jika FEM yang terpilih maka dilakukan uji LM. Uji LM dilakukan untuk menentukan apakah FEM bersifat heteroskedastisitas ataukah tidak. Jika model tidak bersifat heteroskedastisitas maka analisa dilakukan dengan FEM No Wighted, sedangkan jika model bersifat heteroskedastisitas maka analisa dilakukan dengan FEM cross Section Weights.

Pendekatan pertama, secara sederhana dilakukan dengan menggabungkan pooled seluruh data *time series* dan *cross section*. Selanjutnya melakukan estimasi model dengan menggunakan metode OLS.

Pendekatan kedua, memperhitungkan kemungkinan bahwa kita menghadapi masalah *omitted variables* dimana *omitted variables* mungkin membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross section*. Maka ada kemungkinan penggunaan model dengan *Fixed Effect* dengan menambahkan *Dummy Variables* atau yang dikenal dengan (LSDV) *Least Square Dummy Variables* yang memungkinkan adanya nilai intercept yang tidak konstan seperti pada model *Pooled Least Square Estimation* (PLS).

Pendekatan ketiga, memperbaiki efisiensi proses least square yang mungkin terjadi dengan memperhitungkan *error* dan *cross section* dan *time series* melalui REM, yang juga bertujuan untuk mengoreksi konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) pada FEM yang dapat mengurangi efisiensi dari masing-masing parameter. Dimana model *Random Effect* sudah tidak lagi menggunakan metode OLS namun menggunakan metode GLS (*Generalized least squares*).

3.5.1 Pendekatan Kuadrat Terkecil (Pooled Least Squares/PLS)

Dengan melakukan pooling seluruh data yang kita miliki sebanyak N data time series dan T data cross section kita dapat menulis permasalahan fungsi pertumbuhan yang akan dianalisa sebagai berikut :

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.9)$$

Untuk $i = 1, 2, \dots, N$ dan $t = 1, 2, \dots, T$

Dimana i adalah *cross section identifiers* dan t adalah *time series identifier*.

Pendekatan yang paling sederhana untuk melakukan estimasi pada persamaan di atas adalah dengan mengabaikan dimensi *cross-section* dan *time-series* dari data panel dan mengestimasi data dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) yang diterapkan dalam data yang berbentuk pool. Dengan menggunakan metode PLS maka model mengasumsikan bahwa nilai intercept adalah sama. Model juga mengasumsikan bahwa slope koefisien dari dua variable adalah identik untuk semua individu. Tentu ini merupakan asumsi yang sangat ketat. Sehingga, walaupun metode PLS menawarkan kemudahan, model mungkin mendistorsi gambaran yang sebenarnya dari hubungan antara Y dan X antara semua individu yang diteliti.

3.5.2 Pendekatan Pendekatan Efek Tetap (FEM) /Least Squares Dummy Variables (LSDV)

Sebagaimana telah kita ketahui, kesulitan terbesar dalam pendekatan metode kuadrat terkecil biasa adalah asumsi *intercept* dan *slope* dari persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar individu maupun antar waktu (*all coefficient constant across time and individuals*).

Suatu cara untuk memperhatikan kekhasan unit *cross-section* atau unit *time-series* adalah dengan memasukkan variable boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit *cross-section* maupun antar unit waktu.

Pendekatan yang paling sering dilakukan adalah mengizinkan intercept bervariasi antar unit *cross section* namun tetap mengasumsikan bahwa slope coefficient adalah konstan antar unit *cross-section*. Pendekatan ini menggunakan asumsi (*slope coefficient constant but intercept varies across individuals*) dimana dalam literatur juga dikenal dengan sebutan efek tetap (*Fixed Effect Model / FEM*). Kita dapat menuliskan pendekatan tersebut dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.10)$$

Kini *subscript* ditambahkan pada intercept untuk menandakan bahwa *intercept* seluruh individu yang diteliti mungkin berbeda. Untuk mengestimasi persamaan 3.8 diatas dapat dilakukan dengan teknik *Dummy Variable*. Sehingga secara umum dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \dots \alpha_N D_{Ni} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.11)$$

Dimana $D_{2i}=1$ jika observasi adalah individu kedua,) jika lainnya; $D_{3i} = 1$ jika observasi adalah individu ketiga, 0 jika lainnya; $D_{Ni} = 1$ jika observasi adalah individu ke-n, 0 jika lainnya. Maka α_1 merepresentasikan intercept individu pertama, α_2 , α_3 dan α_N adalah *differential intercept coefficients*; yaitu seberapa besar intercept individu kedua, individu ketiga dan individu ke-n berbeda dari intercept individu pertama. Dalam hal ini, individu pertama merupakan pembanding bagi individu lainnya. Untuk alasan penggunaan variable dummy inilah maka FEM juga biasa disebut dengan *Least Square Dummy Variable (LSDV) Model*, dimana perbedaan masing-masing *intercept* mencerminkan karakteristik khusus dari masing-masing individu yang diteliti.

Penggunaan LSDV model diatas dapat dilakukan jika kita memiliki sedikit unit *cross-section*. Namun jika unit *cross-section* ini besar, penggunaan LSDV model akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi.

Dari Persamaan 3.8

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.12)$$

Istilah fixed effect datang dari kenyataan bahwa walaupun intercept mungkin berbeda antar individu, namun intercept setiap individu tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu; dengan kata lain ia adalah time invariant. Jika kita menulis intercept sebagai α_{it} , ini berarti intercept setiap individu adalah time variant. Selain itu, seperti terlihat pada persamaan 3.8, FEM mengasumsikan bahwa koefisien dari regresor tidak bervariasi baik antara waktu maupun antar individu.

Ide dasar FEM dapat dimulai dari persamaan 3.8 tersebut, dimana nilai intercept untuk masing-masing unit cross section dapat dituliskan sebagai :

$$\alpha_i = \alpha + u_i \quad i=1,2, \dots, N$$

dimana u_i adalah *unobservable individual effects*. Persamaan 3.8 dapat juga ditulis sebagai :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_i + v_t + e_{it} \dots \dots \dots (3.13)$$

Dalam FEM, u_i dan v_t diasumsikan berkorelasi dengan regressor (x) atau dengan kata lain u_i bersifat tidak random. Dimana u_i adalah komponen error dari *cross section* dan v_t adalah komponen *time series*.

3.5.3 Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model/REM*)

Perbedaan mendasar FEM dengan REM adalah mengenai asumsi unobservable individual effects (u_i). Jika dalam FEM u_i diasumsikan berkorelasi dengan regresor (X) maka dalam REM, u_i diasumsikan tidak berkorelasi dengan regresor (X) atau dengan kata lain u_i diasumsikan bersifat random. Hal ini adalah ide dasar dari pendekatan dalam REM.

Ide dasar REM dapat dimulai dari persamaan berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + w_{it} \dots \dots \dots (3.14)$$

Error term kini adalah wit yang terdiri dari u_i , v_t dan e_{it} . u_i adalah *cross section random error component*, v_t adalah *time series random error component* keduanya dari masing-masing individu, sedangkan e_{it} adalah *error component* dari keseluruhan model. Untuk alasan inilah, REM sering juga disebut *error components model (ECM)*.

Persamaan 3.14 dapat dimodifikasi menjadi seperti persamaan 3.15 sehingga

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_i + v_t + e_{it} \dots \dots \dots (3.15)$$

Sekali lagi, perbedaan mendasar persamaan 3.12 dan 3.15 adalah asumsi mengenai *unobservable individual effects* (u_i dan v_t). Seperti yang telah dijelaskan pada persamaan 3.11, REM mengasumsikan u_i bersifat random atau tidak berkorelasi dengan regressor (X).

Ada beberapa hal sehubungan dengan estimasi model REM. Pertama, penjumlahan dari nilai random effect adalah nol. Kedua, nilai rata-rata dari random error component adalah intercept umum sehingga nilai random effect untuk suatu individu menyatakan seberapa besar *random error component* dari individu yang bersangkutan berbeda dari nilai *intercept* rata-rata. Jika model terdiri dari individu yang banyak maka model estimasi REM dapat memberikan hasil estimasi yang lebih efisien (*standard error* yang lebih kecil atau *t-stat* yang lebih besar) daripada FEM.

3.6 Pemilihan Metode Estimasi

3.6.1 Kuadrat Terkecil atau Efek Tetap

Model manakah yang lebih baik, PLS (Persamaan 3.9) ataukah FEM (Persamaan 3.11) ? Hasil estimasi FEM bila dibandingkan dengan hasil estimasi PLS umumnya memberikan hasil estimasi yang lebih baik, dimana koefisien signifikansi R^2 lebih tinggi dan DW-stat juga lebih tinggi. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa FEM lebih baik.

Namun, secara format, kita dapat menguji model terbaik antara FEM dan PLS. Bila dibandingkan relative terhadap FEM, PLS merupakan *restricted model* dimana ia menerapkan intercept yang sama untuk seluruh individu. Seperti yang kita ketahui, terkadang setiap unit cross section (individu) memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat sangat mungkin setiap unit cross section memiliki perilaku yang berbeda. Kita dapat menggunakan restricted F-test untuk menguji hipotesis :

Ho : Common / Pooled Least Square Model

Ha : Fixed Effect Model

Dimana restricted F-test dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{(RSS1 - RSS2)/m}{(RSS2)/(n-k)} \dots \dots \dots (3.16)$$

Dimana :

RSS1 : Residual Sum Square teknik tanpa variable dummy / PLS

RSS2 : Residual Sum Square teknik dengan variable dummy / FEM

m : numinator

(n-k) : denuminator

Jika nilai F Statistik (F Stat) hasil pengujian lebih besar dari F table, maka Ho ditolak sehingga model yang digunakan adalah model *Fixed Effect*, begitu juga sebaliknya.

3.6.2 Efek Tetap atau Efek Acak

Secara mendasar jawaban terpulang dari dua hal. Pertama, jawabannya tergantung dari asumsi yang kita buat tentang korelasi antara *cross section error component* (u_i), *time series error* (v_t) dan regressor X. Jika diasumsikan bahwa u_i dan regressor X adalah *uncorrelated*, maka REM lebih tepat. Namun jika diasumsikan bahwa ($u_i; v_t$) dan regresor X adalah *correlated*, maka FEM lebih tepat.

Selain prinsip utama diatas, terdapat beberapa pertimbangan teknis-empiris yang dapat dijadikan panduan untuk memilih antara fixed effect atau random effect yaitu :

1. Bila T (jumlah unit *time series*) besar sedangkan N (jumlah unit *cross section*) kecil, maka hasil FEM dan REM tidak jauh berbeda. Dalam hal ini pilihan umumnya akan didasarkan pada kenyamanan perhitungan, yaitu FEM.
2. Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan dapat berbeda secara signifikan. Jadi apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (random) maka REM harus digunakan. Sebaliknya apabila kita meyakini bahwa unit *cross section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita menggunakan FEM.
3. Apabila *cross-section error component* (e_1) berkorelasi dengan variable bebas X maka parameter yang diperoleh dengan REM akan bias sementara parameter yang diperoleh dengan FEM tidak bias.
4. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari REM dapat terpenuhi, maka REM lebih efisien dibandingkan FEM.

Keputusan pengambilan FEM atau REM dapat pula ditentukan dengan menggunakan Spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausmann. Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan nilai *Chi-square statistics* sehingga keputusan pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistic.

Pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut:

Ho : Random Effect Model

Ha : Fixed Effect Model

Hasil uji Hausman ini dibandingkan dengan *chi-square statistics* dengan $df=k$, dimana k adalah jumlah koefisien variable yang diestimasi. Jika hasil dari uji hausman signifikan, maka H_0 ditolak, yang berarti FEM digunakan. Sedangkan jika hasil uji Hausman Test tidak signifikan maka H_0 diterima berarti REM yang digunakan untuk analisa. Selanjutnya analisa dilakukan dengan menggunakan model yang terpilih.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan asumsi regresi linier klasik, model kuadrat terkecil (OLS) pada jenis data time series, cross section dan data panel memiliki sifat ideal yang dikenal dengan teorema Gauss-Markov yaitu dengan metode kuadrat terkecil akan menghasilkan estimator yang bersifat tidak bias, linier dan mempunyai varian yang minimum (Best Linier Unbiased Estimator = BLUE). Untuk memperoleh hasil yang bersifat BLUE, maka harus melalui serangkaian pengujian yaitu :

3.7.1 Pengujian Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan uji signifikansi melalui uji t dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen¹. Uji statistik yang dapat dilakukan adalah menggunakan pengujian Jarque-Bera. Adapun rumus untuk memperoleh nilai JB adalah sebagai berikut:

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right]$$

Di mana:

S = *skewness*

K = kurtosis

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : residual, μ_i berdistribusi normal

H_a : residual, μ_i tidak berdistribusi normal

Hasil uji JB ini dibandingkan dengan table distribusi normal, jika $JB_{hitung} > \chi^2_{hitung}$ maka H_0 ditolak jika berarti residual, namun jika $JB_{hitung} < \chi^2_{hitung}$ maka H_0 tidak dapat ditolak. Untuk penelitian yang melibatkan data besar (kurang lebih di atas 100 observasi), sebagai aturan kasar (*rule of thumb*) dapat mengasumsikan bahwa faktor

¹Agus Widarjono, *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ekonisia, Yogyakarta, 2007, hal. 53

gangguan terdistribusi normal. Hal ini dikenal dengan *Classical Normal Linear Regression Model*².

3.7.2 Pengujian Multikolinieritas

Salah satu penyimpangan di dalam asumsi model klasik adalah adanya multikolinieritas dalam model regresi yang dihasilkan. Multikolinieritas dapat didefinisikan sebagai adanya hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna, di antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi. Model yang mempunyai *standard error* besar dan nilai statistik t yang rendah merupakan indikasi awal adanya masalah multikolinieritas dalam model.

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam suatu model regresi dapat dilakukan diagnosa dengan menggunakan *variance inflation factor* (VIF)³. Menurut Mandala (2005), nilai VIF diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$VIF(b_i) = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

Di mana:

R_i^2 adalah koefisien determinasi majemuk antara variabel independen ke-n dan variabel-variabel independen lainnya. Jika nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinieritas di dalam model regresi.

Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen. Sebagai *rule of thumb*, jika koefisien korelasi cukup tinggi katakanlah di atas 0,85 maka diduga ada multikolinieritas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka diduga model tidak mengandung unsur multikolinieritas.

²Damodar N. Gujarati, *Basic Econometrics*, McGraw-Hill, 2003, hal. 110

³Agus Widarjono, *op. cit.*, hal. 114-115

3.7.3 Pengujian Heterokedastisitas

Masalah heteroskedastisitas sering ditemui dalam data *cross section* namun jarang ditemui dalam data *time series*. Sehingga dalam Pool data masalah heteroskedastisitas relatif sering tidak terjadi.

3.7.4 Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross-sectional*).

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji asumsi bahwa data haruslah bersifat bebas, dalam pengertian bahwa data pada periode tertentu, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi data pada periode sebelumnya atau pada periode sesudahnya. Pengujian terhadap asumsi autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau secara *cross sectional*, terjadi bahwa data di suatu tempat dipengaruhi atau mempengaruhi data di tempat lain, hal ini dapat mengakibatkan uji-F dan uji-t menjadi tidak tepat. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan dengan uji Durbin - Watson. Persamaan yang digunakan adalah :

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^T (\hat{\epsilon}_t - \hat{\epsilon}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^T \hat{\epsilon}_t^2}$$

Dengan ketentuan :

Null hypothesis	Decision	If
No positive autocorrelation	Reject	$0 < d < d_L$
No positive autocorrelation	No decision	$d_L \leq d \leq d_U$
No negative autocorrelation	Reject	$4 - d_L < d < 4$
No negative autocorrelation	No decision	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$
No autocorrelation, (+) or (-)	Do not reject	$d_U < d < 4 - d_U$

Sebagai aturan kasar (*rule of thumb*) jika nilai d adalah 2, maka kita bisa mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif. Jika $\rho = +1$, nilai $d \approx 0$, mengindikasikan adanya autokorelasi positif. Oleh karena itu, nilai d yang semakin mendekati nol menunjukkan semakin besar terjadinya autokorelasi positif. Jika $\rho = -1$, nilai $d \approx 4$ yang berarti ada autokorelasi negatif. Dengan demikian nilai d yang semakin besar mendekati 4 maka semakin besar terjadinya masalah autokorekasi negatif⁴.

Salah satu cara penyembuhan autokorelasi adalah dengan metode perbedaan tingkat pertama (*first difference method*). Metode ini bisa diaplikasikan jika koefisien autokorelasi cukup tinggi atau jika nilai statistik Durbin-Watson (d) sangat rendah. Sebagai *rule of thumb* jika $R^2 > d$, maka kita bisa menggunakan metode ini.

⁴ Agus Widarjono, *op. cit.*, hal. 160

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (MenNeg BUMN), Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (MenNeg KUKM), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang penyisihan Laba BUMN untuk program kemitraan BUMN, pembayaran pokok pinjaman oleh UKM Binaan, bunga deposito dari program kemitraan BUMN selama belum digulirkan, jumlah dana tersalur dari program kemitraan BUMN, jumlah unit UKM binaan yang berhasil dibina, GDP riil sektor UKM, investasi riil sektor UKM dan jumlah penyerapan tenaga kerja nasional yang bekerja di sektor UKM.

Secara nasional sektor dalam perekonomian terbagi kedalam 9 sektor, yang dibagi lagi ke dalam 30 subsektor perekonomian¹. Dari 30 subsektor yang didefinisikan oleh BPS tersebut hanya 3 subsektor yang tidak dikelola oleh sektor UK yaitu subsektor pertambangan dan penggalian migas, subsektor gas kota dan ketiga subsektor pemerintahan umum. Selain itu terdapat juga 6 subsektor lainnya

¹ **Sektor Pertama** Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terdiri dari 5 subsektor, yaitu a. Tanaman Bahan Makanan, b. Tanaman Perkebunan, c. Peternakan dan hasil-hasilnya, d. Kehutanan dan e. Perikanan.

Sektor Kedua Pertambangan dan penggalian, terdiri 3 sub sector yaitu a. Minyak dan Gas Bumi, b. Pertambangan tanpa Migas dan Penggalian.

Sektor Ketiga Sektor Industri pengolahan terdiri dari 2 subsektor yaitu a. Industri Migas dan Industri tanpa migas. Industri tanpa migas terdiri dari 9 subsektor yaitu i. Makanan, minuman dan tembakau, ii. Tekstil, barang Kulit dan alas kaki, iii. Barang kayu dan hasil hutan lainnya, iv. Kertas dan barang cetakan, v. pupuk, kimia dan barang karet, vi. Semen dan barang galian bukan logam, vii. Logam dasar Besi dan Baja, viii. Alat angkutan, mesin dan peralatannya, xi. Barang lainnya.

Sektor Keempat Listrik, Gas dan Air Bersih terdiri dari 3 subsektor, yaitu a. Listrik, b. gas kota dan c. air bersih;

Sektor Kelima Bangunan

Sektor Keenam perdagangan, Hotel dan Restoran terdiri dari 3 subsektor yaitu a. Perdagangan besar dan eceran, b. Hotel dan c. Restoran

Sektor Ketujuh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, terdiri dari 2 subsektor, yaitu a. Pengangkutan dan b. Komunikasi

Sektor Kedelapan Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan

Sektor Kesembilan Jasa-jasa Lain, terdiri dari 2 subsektor, yaitu : a. Pemerintahan Umum dan b. swasta.

yang tidak menjadi bagian yang dikelola BUMN². Data yang diolah dalam penelitian ini menggunakan data dari 132 BUMN yang dikelompokkan ke dalam 21 subsektor yang dikelola oleh semua perusahaan BUMN³.

Berdasarkan pengelompokan tersebut penulis melakukan pengolahan terhadap dua model regresi yang berbeda. Model pertama merupakan model yang mencoba mengukur keberhasilan dari kinerja

² (1) Sektor pertama sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, (2) sektor ke-2 subsektor penggalian, (3) sektor ke-3 subsektor industri non migas bidang tekstil barang kulit dan alas kaki dan (4) bidang kayu, hasil hutan dan lainnya, (5) sektor ke-4 subsektor gas kota serta (6) sektor ke-6 subsektor restoran.

³ Sektor Pertama Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

a. *Tanaman Bahan Makanan* : PT SHS, PT Pertani
b. *Tanaman Perkebunan* : PTPN I, PTPN II, PTPN III, PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIII, PTPN XIV, PT Rajawali Nusantara Ind.

d. *Kehutanan* : Inhutani I, Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, PT Inhutani V, Perum Perhutani

e. *Perikanan*: PT PSB, PT Tirta Raya Mina

Sektor Kedua Pertambangan dan penggalian

a. *Minyak dan Gas Bumi* : PT PGN, PT Pertamina

b. *Pertambangan tanpa Migas dan Penggalian*: PT AnTam Tbk, PT Timah Tbk, PT Batubara Bkt Asam

Sektor Ketiga Sektor Industri pengolahan Industri tanpa migas.

a. *Makanan, minuman dan tembakau* : PT Ind. Sandang Nusantara, PT PrimiSima

d. *Kertas dan barang cetakan* : PT KKA, PT Kertas Leces, PT Bafal Pustaka, Perum Peruri, Perum PNRI

e. *Pupuk, kimia dan barang karet* : PT Kimia Farma, Tbk PT Indofarma, Tbk PT Bio Farma, PT Pusri, PT AAF, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda

f. *Semen dan barang galian bukan logam* : PT Semen Gresik Tbk, PT Semen Kupang, PT Semen Baturaja, PT Petrokimia Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa

g. *Logam dasar Besi dan Baja* : PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra

h. *Alat angkutan, mesin dan peralatannya* : PT Dok Perkapalan Surabaya, PT PAL Indonesia

i. *Barang lainnya* : PT Industri Gelas, PT Industri Soda Indonesia, PT Garam

Sektor Keempat Listrik, Gas dan Air Bersih

a. *Listrik* : PT PLN

Sektor Kelima Bangunan: PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT PP, PT Wijaya Karya, PT Brantas Abipraya, PT Istaka Karya, Perum Perumnas, PT Virama Karya, PT Indah Karya, PT Yodya Karya, PT Bina Karya, PT Indra Karya, PT Amarta Karya, PT Pengerukan Indonesia

Sektor Keenam perdagangan, Hotel dan Restoran

a. *Perdagangan besar dan eceran*: PT PPI, PT Berdikari, PT Sarinah

b. *Hotel* : PT Hotel Indonesia Natour PT Bali Tourism & Devl. Corp. PT TWC BP&RB

Sektor Ketujuh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

a. *Pengangkutan* : PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, PT Pelindo IV, PT PELNI, PT Bahtera Adhiguna, PT ASDP, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Kereta Apl, Perum Damri, PT Pos Ind, PT Bhandha Ghara Reksa, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Garuda Indonesia

b. *Komunikasi* : PT Telkom Tbk

Sektor Kedelapan Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan : PT Bank Mandiri Tbk, PT BNI Tbk, PT PTMA, PT BEI, PT BNI 46 Tbk, PT PPA, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jasindo, PT Askes, PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, PT ASEI, PT Asuransi Jasa Rahardja, PT RUI, PT Danareksa, PT PNM, PT PANN, PT KBI, Perum Pegadaian, Perum SPU

Sektor Kesembilan Jasa-jasa Lain

b. swasta : PT Jasa Marga, PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, PT Biro Klasifikasi Indonesia, Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, PT KBN, PT Kawasan Industri Medan, PT KIMA, PT JIEP, PT Kaw Ind Wijayakusuma, PT Sby. indt. Estate Rungkut, PT PDI Pulau Batam, PT Koneba

program kemitraan BUMN terhadap peningkatan jumlah UKM binaannya. Model kedua merupakan model yang mencoba melihat pengaruh yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Kemitraan BUMN terhadap pertumbuhan PDB pada skala UK.

Model pertama terdiri dari 5 variabel dimana terdapat 1 variabel terikat dan 4 variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat adalah pertumbuhan unit UKM binaan pada masing-masing subsektor BUMN. Sedangkan variabel bebas terdiri dari laba yang disisihkan, angsuran pokok yang dibayarkan kembali oleh UK dan bunga deposito dana PK yang belum digulirkan dan pertumbuhan PDB (iklim investasi). Masing-masing variabel terdiri dari 9 data *time-series* (tahun 1998–2006) dan 21 data *cross-section* (21 subsektor BUMN).

Sedangkan model kedua terdiri dari 5 variabel, dengan 1 variabel terikat dan 4 variabel bebas. Variabel terikat adalah nilai PDB riil UKM pada masing-masing subsektor. Variabel bebas terdiri dari laba yang disisihkan, jumlah UK binaan, investasi riil dan jumlah tenaga kerja di sektor UKM. Seperti halnya model pertama, masing-masing variabel terdiri dari 9 data *time series* (tahun 1998-2006) dan 21 data *cross-section* (27 subsektor ekonomi).

Kedua model ini diolah dengan menggunakan software *e-views* 5.1. Hasil pengolahan selanjutnya akan dianalisa dengan fokus pembahasan dan analisa pada keberhasilan kinerja PK BUMN dan dampaknya terhadap pertumbuhan PDB usaha kecil dan mikro.

4.1 Pemilihan Model

4.1.1 Pemilihan dan Uji Model Pertumbuhan UK Binaan BUMN

Pool Least Square vs Individual effect

Untuk menentukan metode analisa data panel yang lebih tepat digunakan dalam model pertumbuhan unit UKM binaan, maka perlu dilakukan beberapa tahap pengujian. Pengujian pertama adalah melakukan uji F Test yang bertujuan untuk menentukan data panel

yang lebih tepat, yaitu menggunakan metoda *Pooled Least Square* atau *Individual Effect (Fix Effect)*.

Data pada table 4.1 berikut menunjukkan hasil uji F untuk menentukan apakah model *Pooled Least Squares* atau *Model Individual Effect* yang lebih cocok digunakan dalam menganalisa model pertumbuhan UKM binaan program BUMN. Nilai F-statistik (baik hasil F test maupun Chow Test) semuanya lebih besar dibandingkan dengan F table (baik pada $\alpha = 5\%$ dan $\alpha = 1\%$). Hal itu menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti terdapat efek individu dalam model yang dibuat. Dengan demikian model yang lebih tepat digunakan untuk menganalisa model pertumbuhan UKM tanpa kemitraan dalam penelitian ini adalah model yang menunjukkan adanya efek individu. Yaitu baik *Fixed Effect Model (FEM)* maupun *Random Effect Model (REM)*.

Ho = Common Effect	
Ha = Fixed Effect	
F hitung	F table
3.1797	$\alpha 1\% = 1.66$
	$\alpha 5\% = 1.48$
Kesimpulan :	Fhit > Ftabel; Tolak H_0

Tabel 4.1 Hasil Uji F pada Model Pertumbuhan UK Binaan BUMN

Dari table diatas maka diketahui bahwa nilai F statistik lebih tinggi dibandingkan dengan nilai F tabel, maka model persamaan panel yang lebih tepat untuk mengestimasi model pertumbuhan UKM binaan BUMN adalah model *Individual Effect* dibandingkan dengan model *common / pooled least square*.

Fixed Effect vs Random Effect

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian untuk menentukan metoda analisa yang lebih tepat apakah menggunakan *Fixed Effect* ataukah *Random Effect*. Menurut Nachrowi⁴ yang menyampaikan pendapat beberapa ahli ekonometrika bahwa:

⁴ Nachrowi; Usman, 2006. Ekonometrika Pendekatan Populer dan Praktis, FEUI, hal 318

- Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) yang lebih besar dibandingkan jumlah individu (N) maka disarankan menggunakan model Fixed Effect.
- Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) yang lebih kecil dibanding jumlah individu (N) maka disarankan menggunakan model random effect.

Disamping menggunakan kriteria diatas, keputusan penggunaan FEM atau REM dapat pula ditentukan dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausman yang dikenal dengan uji Hausman. Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan nilai *Chi-Squares Statistic* sehingga keputusan pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistik.

Uji Hausman untuk model pertumbuhan UKM binaan BUMN dapat diperoleh melalui e-views 5.1. Berikut ini hasil uji Hausman yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan model yang lebih cocok digunakan untuk menganalisa model pertumbuhan unit UKM binaan BUMN.

Ho = Random Effect	
Ha = Fixed Effect	
Chi-SqStat	Chi-Sqtabel
0.148506	α 1% = 13.2767
	α 5% = 9.43773
Kesimpulan :	Fhit < Ftabel α 1%; Terima H0

Tabel 4.2 Hasil uji Hausman pada Model Pertumbuhan UK Binaan BUMN

Data pada table 4.2 diatas menunjukkan hasil uji Hausman. Nilai Chi^2 statistik lebih kecil dibandingkan Chi^2 tabel (pada $\alpha=1\%$). Hal tersebut menunjukkan bahwa model *random effect* secara statistik tepat untuk mengestimasi model pertumbuhan UK binaan BUMN.

Dengan menggunakan kedua kriteria diatas baik kriteria yang disampaikan oleh Nachrowi tidak selalu sama dengan model *Hausman Test*, keduanya tidak menunjukkan hasil yang sama. Dengan demikian maka analisa yang lebih tepat digunakan untuk model pertumbuhan UKM binaan BUMN adalah dengan model *Random Effect* dibanding dengan model *Fixed Effect*.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas berdasarkan aturan kasar (*rule of thumb*) adalah apabila observasi melebihi angka sertus maka model dapat dikatakan terdistribusi normal. Berdasarkan *rule of thumb* tersebut dengan 21 data cross-section dan 9 data time-series maka menghasilkan 189 buah observasi maka penulis mengasumsikan bahwa model pertumbuhan unit UKM dan model pertumbuhan program PKBL terhadap PDB UKM binaan BUMN berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan estimasi koefisien korelasi yang diperoleh dari regresi parsial antar variabel independen dalam model pertumbuhan unit UKM binaan BUMN memiliki nilai terbesar 0.73. Nilai tersebut masih jauh di bawah nilai sebagaimana di atur dalam *rule of thumb*, yakni 0,85. Apabila diuji dengan metoda VIF (Variance Inflation Tolerance) maka hasil tertinggi adalah sebesar 3.83, dimana nilai tersebut masih berada jauh dibawah *rule of thumb* VIF sebesar 10. Berdasarkan hasil pengujian ini maka disimpulkan bahwa model terbebas dari permasalahan multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park, yaitu dengan meregres residual kuadrat dari model pertumbuhan unit UKM binaan BUMN terhadap seluruh variabel independen.

$$\begin{aligned} \text{LOG}(\hat{\epsilon}_i^2) = & C - 0.2831 \cdot \text{LOG}(\text{LABA}?) - 0.2938 \cdot \text{LOG}(\text{POKOK}?) + 0.3212 \cdot \text{LOG}(\text{BGAPK}?) \\ t & \quad \quad \quad (-1.716346) \quad \quad \quad (-1.715640) \quad \quad \quad (1.599677) \\ & + 0.1150 \cdot \text{GDPGW}? \\ & \quad \quad \quad (0.507377) \end{aligned}$$

Kemudian dengan mengestimasi nilai t-statistik masing-masing variabel dengan uji 2 sisi pada $\alpha=1\%$, $\alpha=5\%$ pada df $(184-5)=179$ masing-masing adalah sebesar 2.576, 1.960. Hasil regresi menunjukkan bahwa secara statistik semua variable independen tidak

signifikan mempengaruhi residual kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari permasalahan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Durbin-Watson (d) hitung dengan nilai d kritis / table. Berdasarkan *rule of thumb* apabila nilai d hitung mendekati nol maka terjadi autokorelasi positif, apabila mendekati empat maka terjadi autokorelasi negative, model dikatakan aman apabila d statistik mendekati angka dua. Pada regresi awal nilai statistik d hitung yang diperoleh adalah 0.844502 sedangkan nilai kritis d dengan $n=189$ dan $k=4$ untuk $\alpha=1\%$ adalah $dL=1.584$ dan $du=1.665$ dan $\alpha=5\%$ adalah $dL=1.693$ dan $du=1.774$. Dari hasil uji menyatakan bahwa model terdapat autokorelasi positif. Kemudian dilakukan penyembuhan dengan estimasi p berdasarkan dua langkah durbin watson.

Setelah dilakukan penyembuhan, nilai statistik d hitung menjadi 1.557967, jika dibandingkan dengan nilai d dengan $n=89$ dan $k=4$ untuk $\alpha=1\%$ adalah $dL=1.411$ dan $du=1.603$ dan $\alpha=5\%$ adalah $dL=1.550$ dan $du=1.747$. Maka dapat disimpulkan bahwa model tetap terdapat autokorelasi pada daerah ragu-ragu $\alpha=1\%$ maupun 5% .

4.1.2 Pemilihan dan Uji Model Pertumbuhan PKBL BUMN terhadap PDB UK

Pool Least Square vs Individual effect

Data pada table 4.3 berikut menunjukkan hasil uji F untuk menentukan apakah model *Pooled Least Squares* atau *Model Individual Effect* yang lebih cocok digunakan dalam menganalisa model pertumbuhan PKBL BUMN terhadap PDB UKM.

Ho = Common Effect	
Ha = Fixed Effect	
F hitung	F table
133.8379	α 1% = 2.03
	α 5% = 1.66,
Kesimpulan :	Fhit > Ftable; Tolak H0

Tabel 4.3 Hasil Uji F pada Model Pertumbuhan Program Kemitraan BUMN terhadap PDB UK

Dari table diatas maka diketahui bahwa nilai F statistik lebih tinggi dibandingkan dengan nilai F tabel, maka model persamaan panel yang lebih tepat untuk mengestimasi model pertumbuhan PKBL BUMN terhadap PDB UKM adalah model *Individual Effect* dibandingkan dengan model *Common / Pooled Least Square*.

Fixed Effect vs Random Effect

Data pada table 4.4 berikut menunjukkan hasil uji Hausman Test untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* atau model *Random Effect* yang lebih cocok digunakan dalam menganalisa model pertumbuhan PKBL BUMN terhadap PDB UKM.

Ho = Random Effect	
Ha = Fixed Effect	
Chi-SqStat	Chi-Sqtabel
24.804713	α 1% = 15.0863
	α 5% = 11.0705
Kesimpulan :	Fhit < Ftable α 1%; Terima H0

Tabel 4.4 Hasil uji Hausman pada Model Pertumbuhan program PKBL terhadap PDB UK

Data pada table 4.4 diatas menunjukkan hasil uji Hausman. Nilai Chi² statistik lebih besar dibandingkan Chi² tabel (pada α =1%). Hal tersebut menunjukkan bahwa model *Fixed effect* secara statistik tepat untuk mengestimasi model pertumbuhan program kemitraan BUMN terhadap PDB UKM.

Dengan menggunakan kedua kriteria diatas baik kriteria yang disampaikan oleh Nachrowi sesuai dengan statistik Hausman Test, dimana keduanya menunjukkan hasil yang sama. Dengan demikian maka analisa yang lebih tepat digunakan untuk model pertumbuhan PKBL BUMN terhadap PDB UKM adalah dengan model *Fixed Effect* dibanding dengan model *Random Effect*.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan estimasi koefisien determinasi yang diperoleh dari regresi parsial antar variabel independen dalam model pertumbuhan PKBL BUMN terhadap PDB UKM, beberapa variabel independen memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu 0.951961, 0.982068 dan 0.977274. Apabila diuji dengan metoda VIF (Variance Inflation Tolerance) maka hasilnya adalah sebesar 20.81642, 55.76623 dan 44.00246, baik dari nilai koefisien determinasi maupun VIF keduanya melewati batas toleransi yang diizinkan oleh *rule of thumb*.

Namun demikian apabila nilai koefisien determinasi parsial dibandingkan dengan nilai koefisien determinasi keseluruhan model, nilainya tidak ada yang melebihi 0.986879. Maka walau model dideteksi terjadi multikolinieritas tinggi namun masih dapat ditoleransi walau kemungkinannya model masih menghasilkan estimator yang BLUE tetapi memiliki varian yang besar.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park, yaitu dengan meregres residual kuadrat dari model pertumbuhan PKBL BUMN terhadap PDB UKM terhadap seluruh variabel independen.

$$\begin{aligned} \ln(\hat{\epsilon}_i^2) = & -3.7518 - 0.6836*\ln(TSLR?) + 0.7254*\ln(UNIT?) + 0.0803*\ln(INV?) \\ t & \quad \quad \quad (-2.450783)** \quad \quad \quad (2.475109)* \quad \quad \quad (0.810224)*** \\ & + 0.7108*\ln(LABOR?) - 0.7939*\ln(UK?) \\ & \quad \quad \quad (2.113300)* \quad \quad \quad (-2.585594)*** \end{aligned}$$

Kemudian dengan mengestimasi nilai t-statistik masing-masing variabel dengan uji 2 sisi pada $\alpha=1\%$, $\alpha=5\%$ pada df $(189-5)=184$ masing-masing adalah sebesar 2.617, 1.980. Hasil regresi menunjukkan bahwa secara statistik semua variabel independen tidak signifikan mempengaruhi residual kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari permasalahan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi pada regresi awal nilai statistik d hitung yang diperoleh adalah 0.978367 sedangkan nilai kritis d dengan $n=189$ dan $k=5$ untuk $\alpha=1\%$ adalah $dL=1.557$ dan $du=1.693$ dan $\alpha=5\%$ adalah $dL=1.665$ dan $du=1.802$. Dari hasil uji menyatakan bahwa model terdapat autokorelasi positif. Kemudian penyembuhan yang tepat dapat dilakukan dengan estimasi p berdasarkan dua langkah Durbin Watson.

Setelah dilakukan penyembuhan, nilai statistik d hitung menjadi 1.704290, jika dibandingkan dengan nilai kritis d dengan $n=156$ dan $k=5$ untuk $\alpha=1\%$ adalah $dL=1.557$ dan $du=1.693$ dan $\alpha=5\%$ adalah $dL=1.665$ dan $du=1.802$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari permasalahan autokorelasi pada $\alpha=1\%$.

4.2 Hasil Estimasi

4.2.1 Hasil Estimasi Model Pertumbuhan UK Binaan BUMN

Persamaan dibawah ini adalah rangkuman dari hasil estimasi pada model pertumbuhan unit UKM binaan BUMN. Berikut adalah hasil estimasi model pertama yang menggambarkan pengaruh laba, pengembalian pinjaman pokok, bunga deposito dan iklim investasi UKM terhadap peningkatan jumlah unit UKM binaan BUMN. Setelah dilakukan pemilihan model, pengujian dan pengobatan dari masalah heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi pada sub bab 4.1.1 maka diperoleh model yang BLUE (Best Linier Unbias Estimator).

$$\begin{aligned} \text{LOG}(\text{UNIT?}) = & -0.1946 + 0.3381 \cdot \text{LOG}(\text{LABA?}) + 0.3751 \cdot \text{LOG}(\text{POKOK?}) + 0.0918 \cdot \text{LOG}(\text{BGAPK?}) \\ t & \quad \quad \quad (5.440711)^{***} \quad \quad \quad (5.057913)^{***} \quad \quad \quad (1.511701) \\ & + 0.0985 \cdot \text{GDPGW?} \\ & \quad \quad \quad (1.589079) \end{aligned}$$

$$R^2 = 0.845367; \text{ Adjusted } R^2 = 0.838003$$

$$\text{Durbin-Watson stat} = 1.557967$$

$$F\text{-statistic} = 114.8050$$

Model pertumbuhan unit UKM binaan BUMN ini menunjukkan tingkat determinasi dan taraf signifikansi yang cukup baik. Dengan demikian model yang digunakan sudah dapat kita interpretasikan. Dari hasil estimasi dapat diketahui bahwa model pertumbuhan ukm

BUMN memiliki R^2 adjusted sebesar 0.838003. Dengan koefisien determinasi tersebut berarti model pertumbuhan unit UKM binaan BUMN dapat diterangkan 83 persen oleh variable-variabel penjelas pada model-model tersebut. Hasil Uji-F sebesar 114.8050 menunjukkan taraf yang signifikan menandakan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Hasil estimasi menunjukkan pengaruh positif antara penyisihan laba, pengembalian pokok terhadap peningkatan jumlah unit sesuai dengan hipotesa awal yang diharapkan. Sedangkan pertumbuhan bunga deposito dan iklim investasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah UK.

Bila kita memperhatikan taraf signifikansi maka terdapat dua variable penjelas yang berpengaruh cukup signifikan dan hanya variable bunga deposito yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dimana variable \ln laba dan \ln pokok berpengaruh pada taraf signifikan $\alpha=1\%$, hal ini menunjukkan kedua variable berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah unit UKM binaan BUMN. Koefisien $\ln(\text{laba})$ sebesar positif 0.3381 ini menunjukkan, bahwa pertumbuhan laba terhadap peningkatan jumlah unit UKM Binaan BUMN memiliki elastisitas sebesar 0.3381. Dengan demikian setiap kenaikan laba sebesar 1% atau Rp 216.48 juta ceteris paribus akan mempengaruhi kenaikan jumlah unit UKM binaan BUMN secara relatif sebesar 0.3381 % atau 5.99 unit. Maka kontribusi rata-rata laba per unit UKM binaan BUMN adalah sebesar Rp 36.15 juta/unit.

Koefisien $\ln(\text{pokok})$ sebesar positif 0.3751 menunjukkan bahwa pertumbuhan pengembalian pokok terhadap peningkatan jumlah unit UKM Binaan BUMN sebesar memiliki elastisitas sebesar 0.3751. Dengan demikian setiap kenaikan pengembalian pokok pinjaman sebesar 1% atau Rp 162.48 juta ceteris paribus akan meningkatkan jumlah unit UKM binaan BUMN secara relatif sebesar 0.3751 % atau 6.64 unit. Maka kontribusi rata-rata pengembalian pokok per unit UKM binaan BUMN adalah sebesar Rp 24.45 juta/unit.

Sedangkan variabel $\ln(\text{BgaPK})$ tidak memberikan pengaruh pada tingkat pertumbuhan unit UKM binaan BUMN walau pada $\alpha=10\%$ sekalipun. Dengan demikian adanya pertumbuhan yang meningkat ataupun menurun pada bunga deposito tidak akan berpengaruh bagi pertumbuhan jumlah unit UKM binaan BUMN. Alasan mengapa hal itu terjadi akan dijelaskan kemudian pada bagian pembahasan.

Sedangkan variabel GDPGW tidak memberikan pengaruh pada tingkat pertumbuhan unit UKM binaan BUMN walau pada $\alpha=10\%$ sekalipun. Dengan demikian adanya pertumbuhan yang meningkat ataupun menurun pada iklim investasi UKM tidak akan berpengaruh bagi pertumbuhan jumlah unit UKM binaan BUMN. Alasan akan dijelaskan kemudian pada bagian pembahasan.

Intercept pada regresi awal berbeda-beda antar masing-masing individu. Dalam model Random Effect memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan, sehingga intercept berbeda antar individu dan antar waktu. Dari hasil estimasi setelah dilakukan penyembuhan terhadap model pertumbuhan unit UKM binaan BUMN yang telah dilakukan, penulis memperoleh nilai koefisien sebagai efek individu dan waktu pada masing-masing subsektor ekonomi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan karakteristik pertumbuhan dari masing-masing sub-sektor ekonomi pada perusahaan BUMN terhadap peningkatan jumlah unit UKM binaan.

4.2.2 Hasil Estimasi Model Pertumbuhan PK BUMN terhadap PDB UK

Persamaan dibawah ini adalah rangkuman dari hasil estimasi pada model pertumbuhan PK BUMN terhadap PDB UK. Berikut adalah hasil estimasi model kedua yang menggambarkan pengaruh dana tersalur, investasi sektor UKM nasional, tenaga kerja sektor UK nasional dan jumlah unit UK nasional terhadap peningkatan GDP UK nasional. Setelah dilakukan pemilihan model, pengujian dan pengobatan dari masalah heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi pada sub bab 4.1.2 maka diperoleh model yang BLUE (Best Linier Unbias Estimator).

$$\begin{aligned} \ln(\text{GDP?}) = & -2.5707 + 0.0832 \cdot \ln(\text{TSLR?}) + 0.3409 \cdot \ln(\text{INV?}) + 0.3256 \cdot \ln(\text{LABOR?}) \\ t & \quad \quad \quad (2.625082)^{***} \quad (7.783050)^{***} \quad (4.294392)^{***} \\ & + 0.1522 \cdot \text{LOG}(\text{UK?}) \\ & \quad \quad \quad (2.409521)^{***} \end{aligned}$$

$$R^2 = 0.986879 ; \text{ Adjusted } R^2 = 0.984233$$

$$\text{Durbin-Watson stat} = 1.704290$$

$$\text{F-statistik} = 372.9402$$

Model pertumbuhan PK BUMN terhadap PDB UKM ini menunjukkan tingkat determinasi dan taraf signifikansi yang cukup baik. Dengan demikian model yang digunakan sudah dapat kita interpretasikan. Dari table hasil estimasi dapat diketahui bahwa model pertumbuhan PKBL BUMN terhadap PDB UKM memiliki R^2 adjusted sebesar 0.984233. Dengan koefisien determinasi tersebut berarti model pertumbuhan PK BUMN terhadap PDB UKM dapat diterangkan 98 persen oleh variable-variabel penjelas pada model-model tersebut. Hasil Uji F sebesar 372.9402 menunjukkan taraf yang signifikan menandakan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Hasil estimasi menunjukkan pengaruh positif antara dana tersalur, investasi sektor UKM nasional, tenaga kerja UKM nasional dan jumlah unit UKM nasional terhadap peningkatan GDP UKM nasional sesuai dengan hipotesa awal yang diharapkan.

Bila kita memperhatikan taraf signifikansi maka terlihat hampir semua variable penjelas yang berpengaruh signifikan pada $\alpha=1\%$ hanya jumlah unit UKM nasional yang berada pada taraf signifikansi $\alpha=5\%$. Hal ini menunjukkan keempat variable berpengaruh positif terhadap peningkatan PDB UKM nasional. Koefisien ln (tslr) sebesar positif 0.0832 ini menunjukkan, bahwa pertumbuhan dana tersalur terhadap peningkatan PDB UKM nasional memiliki elastisitas sebesar 0.0832. Dengan demikian setiap kenaikan dana tersalur sebesar 1% atau Rp 339.95 juta ceteris paribus akan mempengaruhi kenaikan PDB UKM nasional secara relatif sebesar 0.0832 % atau Rp 32.02 milyar.

Koefisien Ln(inv) sebesar positif 0.3409 menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi UKM nasional terhadap peningkatan GDP UKM nasional sebesar memiliki elastisitas sebesar 0.3409. Dengan demikian setiap kenaikan investasi UK nasional sebesar 1% atau Rp 49.22

milyar ceteris paribus akan meningkatkan PDB UKM nasional secara relatif sebesar 0.3409 % atau Rp 131.20 milyar.

Koefisien $\ln(\text{labor})$ sebesar positif 0.3256 menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja UKM nasional terhadap peningkatan GDP UKM nasional sebesar memiliki elastisitas sebesar 0.3256. Dengan demikian setiap kenaikan tenaga kerja UKM nasional sebesar 1% atau 31 orang ceteris paribus akan meningkatkan PDB UKM nasional secara relatif sebesar 0.3256 % atau Rp 125.32 milyar. Maka kontribusi rata-rata masing-masing tenaga kerja terhadap PDB UKM adalah sebesar Rp 3.96 juta.

Koefisien $\ln(\text{UK})$ sebesar positif 0.1522 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah unit UK nasional terhadap peningkatan GDP UKM nasional sebesar memiliki elastisitas sebesar 0.1522. Dengan demikian setiap kenaikan jumlah unit UKM nasional sebesar 1% atau 18 unit ceteris paribus akan meningkatkan PDB UK nasional secara relatif sebesar 0.1522 % atau Rp 58.58 milyar. Maka kontribusi rata-rata masing-masing unit UKM terhadap PDB UK adalah sebesar Rp 3.18 juta.

Sedangkan intercept berbeda-beda antar masing-masing individu. Dalam model Fixed Effect memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan, sehingga intercept berbeda antar individu dan antar waktu. Dari hasil estimasi terhadap model pertumbuhan PKBL BUMN terhadap PDB UKM yang telah dilakukan, penulis memperoleh nilai koefisien sebagai efek individu dan waktu pada masing-masing subsektor ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan nilai koefisien tersebut menunjukkan perbedaan karakteristik pertumbuhan dari masing-masing sub-sektor ekonomi bidang UKM terhadap PDB UKM nasional. Perbedaan koefisien untuk masing-masing subsektor dalam menunjukkan adanya karakteristik pertumbuhan PDB UKM yang berbeda-beda antara satu subsektor dengan subsektor yang lainnya.

Tabel 4.5 Efek individu pada model model pertumbuhan program kemitraan BUMN terhadap PDB UKM

	SubSektor BUMN	Intercep		SubSektor BUMN	Intercep
1	Tanaman Bahan Makanan	0.770924	12	Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0.221992
2	Tanaman Perkebunan	0.092091	13	Barang Lainnya	0.26764
3	Kehutanan	0.07411	14	Listrik	-3.23846
4	Perikanan	0.636068	15	Bangunan	2.23648
5	Minyak dan Gas Bumi	-0.65666	16	Perdagangan Besar dan Eceran	0.685785
6	Pertambangan Tanpa Migas.	0.589535	17	Hotel	-0.54095
7	Makanan, Minuman dan Tembakau	0.307898	18	Pengangkutan	-0.72199
8	Kertas dan Barang Cetakan	-0.08022	19	Komunikasi	-1.60058
9	Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	0.552592	20	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan.	0.214157
10	Semen & Brg. Galian Bukan Logam	0.321654	21	Swasta	-0.09272
11	Logam Dasar Besi & Baja	-1.96058			

Pada table 4.5 diatas secara spesifik dapat diketahui urutan tingkat pertumbuhan subsektor ekonomi pada peningkatan PDB UKM. Sepuluh subsektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah subsektor Bangunan, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Perikanan, Pertambangan Tanpa Migas, Pupuk, Kimia & Barang dari Karet, Semen & Brg. Galian Bukan Logam, Makanan, Minuman dan Tembakau, Barang Lainnya, Alat Angk., Mesin & Peralatannya. Sedangkan tigasubsektor dengan tingkat pertumbuhan terendah dari paling bawah adalah Listrik, Logam Dasar Besi & Baja, Komunikasi.

Sumbangan paling tinggi terhadap kontribusi GDP UKM adalah pada Subsektor bangunan, jika dilihat dari penyerapan jumlah tenaga kerja sector ini memungkinkan penyerapan tenaga kerja khususnya buruh yang cukup banyak pada periode waktu yang pendek selama masa pembangunan. Subsektor kedua dan keempat yang saling berkaitan adalah subsector hasil alam tanaman bahan makanan dan perikanan, dimana *multiplier effect* dari pembangunan selalu akan

memunculkan warung-warung makan, pasar tradisional dan pedagang asongan untuk konsumsi makanan sehari-hari yang ditunjang juga oleh subsektor perikanan sebagai bahan bakunya yang memiliki pasar yang mudah dan pasti. Selanjutnya Subsektor ketiga adalah Perdagangan Hotel dan Restoran Perdagangan Besar dan Eceran, dimana selain kebutuhan primer multiplier efek lain dari pembangunan adalah kebutuhan peralatan sehari-hari yang dapat dijumpai pada toko kelontong sebelum masuknya pasar-pasar swalayan dikemudian hari.

Sumbangan terendah terhadap kontribusi GDP UKM adalah pada subsector Listrik, logam dasar dan besi baja serta komunikasi dimana komoditas energi dan logam dasar merupakan sector yang cukup vital hanya dikuasai oleh Negara dengan teknologi tinggi dan padat modal maka pertumbuhan usaha kecil tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan jika harus bersaing dengan usaha-usaha besar. Sedangkan di sektor komunikasi usaha kecil hanya dapat memberikan nilai tambah dari sektor perdagangan alat-alat komunikasi.

4.3. Analisa dan Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melakukan estimasi REM dan FEM, selanjutnya akan dilakukan analisa pembahasan dengan mengacu pada analisis estimasi tersebut. Analisa dan pembahasan dilakukan pada sejauh mana keberhasilan program kemitraan BUMN dan peranan PKBL BUMN terhadap pertumbuhan PDB UKM nasional ditinjau dari perbedaan peranan masing-masing variabel.

4.3.1 Peran Laba Terhadap UKM Binaan BUMN

Hasil regresi model pertumbuhan unit UKM binaan BUMN menunjukkan bahwa penyisihan laba dan pengembalian pinjaman pokok memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UK binaan BUMN. Pengaruh positif dari laba terhadap peningkatan jumlah UK binaan BUMN menandakan bahwa tujuan dari program kemitraan yang dilakukan oleh kementerian BUMN relative meningkat sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam PerMen BUMN No: Per-05/MBU/2007. Antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 BUMN

sudah menyalurkan laba untuk program kemitraan BUMN sebesar Rp 3.39 trilyun, dimana perbandingan antara dana yang tersalurkan dengan penyisihan laba adalah 1.47 kali. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kinerja perguliran dana PK antara tahun 1998 hingga 2006 bertumbuh 1.47 kali. Walau demikian dalam implementasinya, penyisihan laba BUMN untuk program kemitraan sebesar 1 s/d 3 % secara rata-rata seringkali tidak tercapai, hal ini mengakibatkan terjadinya ketidak sesuaian antara aturan dan pelaksanaan dimana PK seringkali mengambil dana BL untuk menutupi defisit anggaran yang besarnya mencapai sepertiga dari dana BL yang dianggarkan.

Tabel 4.6 Proporsi Penyisihan Laba terhadap Laba total BUMN 2002-2006

	2002	2003	2004	2005	2006	rata2
Tanaman Bahan Makanan	-0.89%	0.23%	0.63%	-7.26%	2.10%	-1.04%
Tanaman Perkebunan	8.00%	3.86%	0.80%	1.08%	3.69%	3.49%
Kehutanan	-8.34%	-0.11%	0.68%	7.61%	6.26%	1.22%
Perikanan	-0.17%	-0.20%	0.03%	0.89%	0.00%	0.11%
Minyak dan Gas Bumi	2.11%	2.73%	0.89%	0.72%	0.53%	1.39%
Pertambangan Tanpa Migas.	4.21%	2.64%	0.80%	0.93%	0.67%	1.85%
Makanan, Minuman dan Tembakau	-0.69%	-0.09%	-0.03%	0.00%	-0.02%	-0.17%
Kertas dan Barang Cetakan	-14.15%	-1.93%	-14.45%	2.54%	-10.26%	-7.65%
Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	1.01%	0.91%	1.04%	0.81%	0.44%	0.84%
Semen & Brg. Galian Bukan Logam	2.91%	0.13%	0.23%	0.18%	0.28%	0.75%
Logam Dasar Besi & Baja	1.54%	5.01%	2.64%	1.04%	-0.77%	1.89%
Alat Angk., Mesin & Peralatannya	1.00%	2.02%	2.51%	2.76%	-1.14%	1.43%
Barang Lainnya	0.22%	-0.27%	-0.05%	-0.05%	-0.15%	-0.06%
Listrik	-0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.02%
Bangunan	1.63%	3.91%	2.91%	4.26%	6.22%	3.79%
Perdagangan Besar dan Eceran	-0.66%	-0.11%	-1.73%	3.01%	-48.31%	-9.56%
Hotel	4.06%	-2.92%	0.90%	2.39%	-5.46%	-0.21%
Pengangkutan	2.20%	5.98%	5.44%	2.16%	1.56%	3.47%
Komunikasi	0.53%	1.37%	0.46%	1.15%	0.73%	0.85%
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan.	0.65%	1.33%	1.16%	3.32%	2.18%	1.73%
Swasta	3.54%	1.39%	1.71%	1.95%	1.08%	1.94%
rata2	0.41%	1.23%	0.31%	1.40%	-1.92%	0.29%

Sumber Meneg BUMN (diolah)

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa penyisihan laba rata-rata keseluruhan adalah sebesar 0.29% dari total laba BUMN antara tahun 2002 hingga 2006. Laba yang paling besar dikucurkan oleh sektor Bangunan, Tanaman Perkebunan, Pengangkutan, Swasta. Rata-rata penyisihan laba terbesar terjadi pada tahun 2005, hal ini diakibatkan tekanan dari pemerintah pasca Pemilu 2004 yang mulai mulai mendorong pertumbuhan UKM dan CSR. Nilai negatif pada proporsi laba yang disisihkan dengan laba total BUMN, hal ini dikarenakan pelaksanaan penyisihan laba untuk program kemitraan baru dilaksanakan pada tahun berikutnya dimana belum tentu di tahun berikutnya BUMN pada sektor yang bersangkutan sedang berada dalam kondisi untung. Sedangkan nilai diatas tiga persen menunjukkan bahwa terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak langsung dapat menyalurkan penyisihan laba pada tahun berjalan akibat kondisi intern perusahaan, sehingga laba baru dapat disalurkan pada tahun-tahun selanjutnya.

Namun walaupun penyaluran laba tidak dilakukan setiap tahun, program kemitraan masih dapat terus berjalan dengan modal akumulasi dari sisa saldo laba terdahulu yang disimpan dalam bentuk deposito dan pengembalian pokok dan bunga. Oleh karena itu keberhasilan program kemitraan BUMN tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya persentase penyisihan laba, namun lebih pada manajemen pengelolaan dana yang telah tersalur.

4.3.2 Peran Pengembalian Pinjaman Pokok Terhadap UKM Binaan BUMN

Hasil regresi model pertumbuhan unit UKM binaan BUMN menunjukkan bahwa pengembalian pinjaman pokok juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UKM binaan BUMN sesuai dengan hipotesa yang diharapkan. Pengaruh positif dari pengembalian pinjaman pokok terhadap peningkatan jumlah UK binaan BUMN menandakan bahwa fungsi insentif dari program kemitraan BUMN dalam memberdayakan UKM mendapat tanggapan

positif dari masyarakat yang dibina. Hal ini memberikan gambaran bahwa peran BUMN dalam membina dan memberdayakan UK melalui program kemitraan mampu memberikan akses dan mendorong pertumbuhan perekonomian pada masyarakat binaan cukup menunjukkan peningkatan.

	rata-rata pertahun	growth YoY
1998	5.61016	
1999	5.828452	0.03891
2000	5.380817	-0.0768
2001	7.192947	0.336776
2002	7.509169	0.043963
2003	9.745991	0.297879
2004	13.26837	0.361418
2005	13.46703	0.014972
2006	13.79128	0.024077

Tabel 4.7 Proporsi pengembalian pokok rata-rata terhadap jumlah unit binaan 1998-2006

Sumber Meneg BUMN (diolah)

Dari table 4.7 terlihat pengembalian pinjaman pokok yang semakin tinggi, hal ini menunjukkan peningkatan nilai output dari hasil produksi masing-masing unit UK, maka apabila usaha yang dilakukan oleh masing-masing UK berhasil, maka mereka akan dapat melunasi pinjaman pokok berikut bunga atau bahkan dapat melakukan pinjaman baru dengan jumlah dana pinjaman yang lebih besar lagi. Namun walau demikian tidak semua sektor menunjukkan peluang keberhasilan yang sama.

Tabel 4.8 Proporsi Pengembalian Pokok Rata-rata Terhadap Jumlah Unit Binaan Masing-masing Subsektor 1998-2006

Pokok/unit	rata2	Pokok/unit	rata2
Tanaman Bahan Makanan	9.02	Alat Angk., Mesin & Peralatannya	10.50
Tanaman Perkebunan	9.88	Barang Lainnya	6.02
Kehutanan	4.67	Listrik	5.03
Perikanan	22.60	Bangunan	8.28
Minyak dan Gas Bumi	9.10	Perdagangan Besar dan Eceran	12.06
Pertambangan Tanpa Migas	5.88	Hotel	7.94
Makanan, Minuman dan Tembakau	11.88	Pengangkutan	9.67
Kertas dan Barang Cetak	9.95	Komunikasi	4.03

Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	- 7.87	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan.	8.81
Semen & Brg. Galian Bukan Logam	9.07	Swasta	13.24
Logam Dasar Besi & Baja	5.37	Rata2 seluruh Sektor	9.09

Sumber Meneg BUMN (diolah)

Dari tabel 4.8 diketahui bahwa proporsi pengembalian pokok terhadap jumlah unit binaan rata-rata keseluruhan adalah 9 juta/unit, paling besar terdapat pada sektor Perikanan, Swasta, Perdagangan Besar dan Eceran; Makanan, Minuman dan Tembakau serta Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya, sedangkan proporsi terkecil dari bawah berada pada sektor Komunikasi, Kehutanan dan Listrik.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor yang memiliki proporsi pengembalian pokok terhadap unit yang besar adalah sektor primer yang lebih memberikan nilai jual yang mudah (perikanan, jasa swasta, perdagangan besar dan eceran serta makanan minuman dan tembakau) namun hanya memiliki nilai tambah yang kecil, dibandingkan dengan sektor yang memiliki nilai tambah output yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa BUMN belum sepenuhnya berfungsi sebagai Mitra Pembina yang mampu meningkatkan kualitas SDM, transfer teknologi informasi serta perluasan jangkauan pasar bagi UKM binaannya sesuai dengan bidang yang ditekuni oleh masing-masing BUMN. Maka dalam jangka pendek UKM binaan belum dapat dijadikan sebagai mitra usaha yang berhubungan langsung atau menjadi bagian dari proses produksi BUMN. Paradigma ini yang perlu dirubah dalam jangka panjang, sehingga tidak hanya menganggap bahwa skala Usaha Kecil Mikro hanya sebagai kaum marginal yang senantiasa perlu disumbang tanpa mampu memberikan umpan balik yang signifikan.

4.3.3 Peran Deposito Terhadap UKM Binaan BUMN

Hasil regresi model pertumbuhan unit UKM binaan BUMN menunjukkan bahwa peranan bunga deposito sebagai bunga dari penyimpanan dana PK tersedia sebelum disalurkan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan UKM binaan BUMN. Pengaruh tidak signifikan ini menandakan bahwa pertumbuhan bunga

deposito sangat kecil sekali untuk dapat dijadikan sebagai kontribusi tambahan dana dalam meningkatkan jumlah dari UKM binaan BUMN. Sehingga besarnya hanya cukup untuk menutupi sebagian biaya administrasi pelaksanaan PK BUMN.

4.3.4 Peran Iklim Investasi terhadap UKM Binaan BUMN

Hasil regresi model pertumbuhan unit UKM binaan BUMN menunjukkan bahwa peranan iklim investasi dengan indikator pertumbuhan GDP pertahun sebagai faktor eksternal dari program PK BUMN memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan UKM binaan BUMN. Pengaruh tidak signifikan ini menandakan bahwa pertumbuhan UKM binaan BUMN yang berada disekitar kawasan perusahaan BUMN lebih besar dipengaruhi oleh program CSR yang dilakukan oleh BUMN melalui PKBL. Sehingga walaupun penawaran pasar terhadap suatu subsektor usaha cukup tinggi di suatu daerah, namun keterbatasan lembaga pembiayaan nampaknya menjadi permasalahan yang mendasar. Mengingat BUMN banyak terletak di daerah yang pengembangan lingkungan dan infrastrukturnya belum cukup baik, sehingga akses terhadap lembaga permodalan masih menjadi kendala utama bagi masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan BUMN.

4.3.5 Peran Dana Tersalur PK BUMN Terhadap PDB UKM

Hasil regresi model pertumbuhan PKBL BUMN terhadap PDB UKM menunjukkan bahwa peranan dana program kemitraan yang tersalur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB UKM. Pengaruh positif ini menandakan bahwa program CSR yang dilakukan melalui program PKBL pada perusahaan-perusahaan berhasil sesuai tujuannya dalam PerMen BUMN No: Per-05/MBU/2007 untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dari skala Usaha Kecil Mikro.

Tabel 4.9 Rata-rata Dana Tersalur Terhadap Total Saldo PK BUMN 1998-2006

	Rata-rata dana tersalur/totals saldo	Total saldo (Juta)	Growt total saldo
1998	0.56	19826.02	
1999	0.60	29167.13	0.47
2000	0.66	28783.60	-0.01
2001	0.68	37803.02	0.31
2002	0.67	44753.02	0.18
2003	0.68	51636.03	0.15
2004	0.74	56909.03	0.10
2005	0.72	57737.46	0.01
2006	0.71	73944.20	0.28
rata2	0.67	44506.61	

Sumber Meneg BUMN (diolah)

Berdasarkan table 4.9 terlihat bahwa dana tersalur memiliki rata-rata 67 persen dari tahun 1998 hingga 2006, dan penyalurannya dari tahun ketajun menunjukkan kinerja yang semakin baik dimana pada tahun 1998 hanya 56 persen dana yang tersalur dari seluruh dana program kemitraan yang tersedia dan pada tahun 2006 sudah dapat dioptimalkan hingga angka kisaran 70 persen. Hal ini menggambarkan kinerja program kemitraan BUMN semakin dibenahi dan cukup mendapat perhatian yang serius dari masing-masing perusahaan BUMN dalam upaya mendongkrak perekonomian nasional melalui pemberdayaan sektor UK.

Namun masalah yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah bukan hanya pada penyalurannya, namun juga pada nilai tambah yang dapat diperoleh UK binaan BUMN agar mampu meningkatkan kualitas SDM. Sehingga dampak dari PK BUMN tidak hanya sebagai bantalan pelindung bagi masyarakat ekonomi lemah di sekitar perusahaan BUMN, namun juga sebagai sarana pengembangan potensi usaha, peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat sekitar dan dalam jangka panjang mampu menjadi bagian dari faktor produksi yang terintegrasi dalam sistem produksi BUMN secara nasional.

4.3.6 Peranan Investasi terhadap PDB UKM

Hasil regresi menunjukkan bahwa investasi berperan positif dan signifikan terhadap PDB UKM. Hal itu sesuai dengan teori Mankiw (2003) yang menyampaikan bahwa terdapat dua faktor produksi yang paling penting yaitu modal (*capital*) dan tenaga kerja (*labor*). Pengaruh positif dari investasi terhadap UKM merupakan hal yang baik, karena adanya investasi fisik yang terjadi berarti menandakan adanya kepercayaan dari para investor pada sector UKM khususnya baik dari dalam maupun asing. Di samping itu juga dengan adanya investasi, terlebih investasi fisik mengakibatkan sarana untuk memproduksi mengalami peningkatan sehingga secara langsung akan berkorelasi positif terhadap output.

Bila diperhatikan nilai investasi UK terhadap UM dan UB, UKM memiliki tingkat investasi yang paling kecil secara absolut. Namun dalam beberapa sektor investasi UKM mampu menyaingi investasi yang dilakukan pada UB, namun investasi UKM hampir disemua sektor belum mampu untuk menyaingi investasi pada sektor UM. Selama pada periode penelitian investasi yang diserap UM selalu lebih besar, dimana prosentase rata-ratanya adalah sebesar 24.21 persen sedangkan investasi yang diserap oleh UK adalah sebesar 19.49 persen dibandingkan total investasi nasional.

Tabel 4.10 Proporsi Investasi Terhadap Unit Usaha 2000-2006

Investasi /unit	UK (juta)	UM (juta)	UB (juta)	Total	Growth		
					UK	UM	UB
1998	0.78	736.78	59,660.16	4.78			
1999	1.06	955.83	72,160.14	5.96	0.36	0.30	0.21
2000	1.30	781.21	28,688.27	6.93	0.22	-0.18	-0.60
2001	1.59	932.18	31,275.30	8.10	0.23	0.19	0.09
2002	1.55	997.94	33,292.46	8.44	-0.02	0.07	0.06
2003	1.71	1,076.08	34,458.25	9.04	0.10	0.08	0.04
2004	2.26	1,389.34	42,675.18	11.51	0.32	0.29	0.24
2005	2.90	1,734.26	52,147.35	13.96	0.28	0.25	0.22
2006	3.38	1,918.30	59,725.16	16.35	0.17	0.11	0.15
<i>rata2</i>	1.84	1,169.10	46,009.14	9.45	0.18	0.12	0.04

Sumber BPS dan DepKop (diolah)

Dari table 4.10 terlihat bahwa pada tahun 1998 s/d 2006 investasi rata-rata yang diserap oleh UKM adalah sebesar 1.84 juta rupiah perunit usaha, UM sebesar 1.65 Milyar rupiah perunit usaha, dan UB sebesar 46 Milyar rupiah perunit usaha. Jika diperhatikan proporsi investasi terhadap unit usaha terlihat bahwa prosentase pertumbuhan investasi YoY terhadap unit usaha pada UKM relatif lebih besar dibanding pertumbuhan investasi YoY pada UM dan UB, hal ini menunjukkan peluang yang mampu dikembangkan dari sektor UKM cukup besar karena nilai investasinya relatif lebih kecil dibanding investasi UM dan UB.

Kecilnya proporsi nilai investasi terhadap jumlah unit usaha UK dikarenakan begitu banyak UK yang ada merupakan entitas yang ada tidak berbadan hukum. Berdasarkan data BPS (2004) jumlah UKM yang tidak berbadan hukum (diluar sektor pertanian) mencapai 17,145,244 unit usaha. Dibandingkan dengan jumlah unit usaha diluar sektor pertanian pada tahun 2004 sebesar 18,977,481, maka jumlah unit usaha yang tidak berbadan hukum adalah 90.35 persen dan hanya 9.65 persen saja yang berbadan hukum atau sejumlah 1,832,237 unit usaha. Investasi yang diperlukan oleh UKM tidak hanya berfokus pada faktor investasi permodalan, apabila masalah legalitas dan permodalan sudah teratasi maka masalah berikutnya yang terjadi adalah masalah akses pasar dan keterbatasan teknologi informasi yang terkini. Hal ini yang perlu mendapat perhatian dari perusahaan-perusahaan besar untuk merangkul dan menjalin jaringan yang terputus dari UKM-UKM yang potensial untuk berkembang dalam jangka panjang.

4.3.7 Peranan Tenaga Kerja terhadap PDB UKM

Hasil regresi menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB UKM, hal ini sesuai dengan hipotesa yang diharapkan dimana teori mengatakan bahwa output produksi dipengaruhi oleh faktor produksi yang salah satunya adalah

tenaga kerja. Disamping itu juga karena tenaga kerja merupakan faktor yang terlibat langsung dengan proses produksi.

Penyerapan tenaga kerja pada UKM lebih tinggi dibandingkan dengan UM dan UB karena di sektor ini jenis pekerjaannya lebih bersifat unskill dan berpendidikan rendah dimana demand bagi tenaga kerja seperti ini sangat banyak tersedia. Kondisi itu mengakibatkan posisi tawar tenaga kerja menjadi sangat lemah karena mudah diperoleh penggantinya. Selain jenis pekerjaannya relatif tidak membutuhkan pendidikan tinggi dan tidak memerlukan modal yang besar maka seorang pekerja yang semula bekerja pada suatu lapangan usaha UKM juga akan mudah keluar dari pekerjaannya dan dia dapat menjadi pengusaha kecil pada bidang yang pernah digelutinya.

Sektor perokonomian UK diluar sektor pertanian yang tidak berbadan hukum mencapai 90.35 persen, memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 30.55 juta pekerja. Sayangnya pada skala usaha tersebut, pendidikan bukanlah menjadi masalah utama. Hal tersebut terbukti dari banyaknya pengusaha yang tidak tamat SD sebanyak 18.62 persen, berpendidikan SD mencapai 39.92 persen, berpendidikan SMP sebanyak 23,55 persen, berpendidikan SMTA/DI/DII sebanyak 16.26 persen dan berpendidikan DIII keatas hanya 1.65 persen.

Dari table 4.11 diketahui bahwa total pekerjaan yang diserap di semua sektor pada tahun antara tahun 1998 s/d 2006, pada UK sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Jasa Lain-lain. Pada UM adalah Sektor Industri Pengolahan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan. Sedangkan pada perusahaan besar penyerapan terbesar terdapat pada sektor Industri pengolahan, yang sisanya hanya menyerap kurang dari 30 persen total dari tenaga kerja UB.

Tabel 4.11 Penyerapan Tenaga Kerja Rata-rata Antar Sektor 1998-2006

	UK		UM		UB	
	Pekerja	Pangsa	Pekerja	Pangsa	Pekerja	Pangsa
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	36,038,960	0.50	746,716	0.16	40,803	0.02
Pertambangan dan penggalian	363,388	0.01	43,133	0.01	50,555	0.02
Sektor Industri pengolahan	6,589,189	0.11	2,104,357	0.44	1,923,691	0.78
Listrik, Gas dan Air Bersih	126,141	0.00	46,121	0.01	42,442	0.02
Bangunan	387,313	0.01	119,679	0.03	17,542	0.01
Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,041,028	0.29	765,557	0.16	117,009	0.05
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	2,698,895	0.04	150,514	0.03	56,219	0.02
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	376,938	0.01	201,529	0.04	115,916	0.05
Jasa-jasa Lain	6,895,732	0.11	552,194	0.12	94,731	0.04
<i>rata2</i>	7,946,398		525,533		273,212	

Sumber BPS dan DepKop (diolah)

Dalam hal produktivitas kerja, UKM memiliki variasi untuk masing-masing sektornya. Hal ini ditunjukkan selengkapnya dalam table 4.14. Dari tabel 4.12 juga dapat dilihat produktivitas rata-rata antara tahun 1998 hingga 2006 pada skala usaha UKM paling tinggi disumbang oleh sektor bangunan, Keuangan, Persewaan dan Jasa Lainnya serta pertambangan dan penggalian.

Tabel 4.12 Produktivitas Tenaga Kerja UK rata-rata antar sektor 1998-2006

Sektor	<i>rata2</i>
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	0.007
Pertambangan dan penggalian	0.035
Sektor Industri pengolahan	0.010
Listrik, Gas dan Air Bersih	0.004
Bangunan	0.107
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.012

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	0.013
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.069
Jasa-jasa Lain	0.011

Sumber BPS dan DepKop (diolah)

Dari table 4.12 terlihat bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia antara 1998 hingga 2006 masih didominasi oleh sektor yang belum memberikan nilai tambah yang tinggi bagi perekonomian yaitu industri pengolahan. Sedangkan sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan serta Perdagangan Hotel dan Restoran yang menyerap Tenaga kerja paling banyak tidak memberikan nilai tambah yang tinggi bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu peningkatan pembinaan SDM merupakan faktor penentu utama bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional melalui transformasi tenaga kerja ke sektor sekunder yang lebih memiliki nilai tambah yang tinggi.

4.3.8 Peranan Jumlah Unit UKM terhadap PDB UKM

Hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah unit UKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB UKM, hal ini sesuai dengan hipotesa yang diharapkan yang dalam teori menyatakan bahwa output produksi dipengaruhi oleh faktor produksi yang salah satunya adalah *entrepreneur*. *Entrepreneur* merupakan salah satu fungsi produksi yang mampu menciptakan *supply*, sehingga keputusan untuk meningkatkan maupun menurunkan *capital* maupun *labor* total ditentukan oleh jumlah *entrepreneur* yang terjun ke pasar.

Tabel 4.13 Proporsi Tenaga Kerja / Unit Antar Sektor 1998-2006

Sektor	<i>rata2</i>
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1.458
Pertambangan dan penggalian	2.125
Sektor Industri pengolahan	2.485
Listrik, Gas dan Air Bersih	6.682
Bangunan	3.811
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.759
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	1.270
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8.541
Jasa-jasa Lain	3.311

Sumber BPS dan DepKop (diolah)

Dari tabel 4.13 dapat dilihat produktivitas rata-rata tenaga kerja yang dapat diserap masing-masing unit UKM antara tahun 1998 s/d 2006 pada skala usaha UKM paling tinggi disumbang oleh sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Listrik, Gas dan Air Bersih serta Bangunan. Sedangkan tingkat inefisiensi yang cukup besar yang ditunjukkan dengan tingkat penyerapannya tenaga kerja perunit yang rendah berada pada sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan serta perdagangan, hotel dan restoran. Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja persektor, kedua sektor skala UKM ini menyerap tenaga kerja dengan jumlah terbanyak.

Hal ini menggambarkan bahwa usaha pada sektor primer dengan kemampuan SDM dan nilai tambah yang rendah masih merupakan sector yang menjanjikan pada skala usaha kecil. Sedangkan sektor industri pengolahan belum banyak mendapat perhatian dari pengusaha UKM, yang diakibatkan juga minimnya kebijakan pemerintah untuk mendorong dan memberdayakan industri hingga ke skala UKM. Hal ini dalam jangka panjang diperlukan pembenahan agar Indonesia semakin memiliki daya saing industri terhadap dunia internasional, yang diharapkan mampu menggeser pasar kerja UKM menjadi UM, sehingga mampu meningkatkan pendapatan perkapita dan tingkat kesejahteraan nasional secara tidak langsung.

BAB V

KESIMPULAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Penelitian

1. Penyisihan laba BUMN berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah unit UKM binaan BUMN, dengan elastisitas pertumbuhan Unit UKM binaan terhadap penyisihan laba BUMN adalah sebesar 0.3381. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penyisihan laba BUMN sebesar 1% akan meningkatkan jumlah unit UKM binaan BUMN sebesar 0.33% atau setara dengan peningkatan penyisihan laba BUMN sebesar Rp 36.15 juta akan meningkatkan jumlah unit UKM binaan BUMN sebesar satu unit.
2. Pengembalian pinjaman pokok berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah unit UKM binaan BUMN, dengan elastisitas pertumbuhan unit UKM binaan BUMN terhadap jumlah pengembalian pinjaman pokok adalah sebesar 0.3751. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengembalian pinjaman pokok sebesar 1% akan meningkatkan jumlah unit UKM binaan BUMN sebesar 0.37% atau setara dengan peningkatan pengembalian pinjaman pokok sebesar Rp 24.45 juta akan meningkatkan jumlah unit UKM binaan BUMN sebesar satu unit.
3. Bunga Deposito tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah unit UKM binaan BUMN.
4. Iklim Investasi UKM antara tahun 1998 hingga 2006 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah unit UKM binaan BUMN.
5. Jumlah dana tersalur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB UKM, dengan elastisitas pertumbuhan PDB UKM terhadap jumlah dana tersalur PKBL BUMN adalah sebesar 0.0832. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dana tersalur sebesar 1% akan meningkatkan PDB UKM sebesar 0.08% atau setara dengan

peningkatan jumlah dana tersalur sebesar Rp 339.95 juta akan meningkatkan PDB UKM sebesar Rp 32.02 milyar.

6. Investasi UKM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB UKM, dengan elastisitas pertumbuhan PDB UKM terhadap Investasi UKM adalah sebesar 0.3409. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi UKM sebesar 1% akan meningkatkan PDB UKM sebesar 0.34% atau setara dengan peningkatan Investasi UKM sebesar Rp 49.22 milyar akan meningkatkan PDB UKM sebesar Rp 131.20 milyar.

7. Jumlah Tenaga Kerja UKM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB UKM, dengan elastisitas pertumbuhan PDB UKM terhadap jumlah Tenaga Kerja UKM adalah sebesar 0.3256. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja UKM sebesar 1% akan meningkatkan PDB UKM sebesar 0.32% atau setara dengan peningkatan jumlah tenaga kerja UKM sebesar satu orang akan meningkatkan PDB UKM sebesar Rp 3.96 juta.

8. Jumlah unit UKM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB UKM, dengan elastisitas pertumbuhan PDB UKM terhadap jumlah Tenaga Kerja UKM adalah sebesar 0.1522. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah unit UKM sebesar 1% akan meningkatkan PDB UKM sebesar 0.15% atau setara dengan peningkatan jumlah unit UKM sebesar satu unit akan meningkatkan PDB UKM sebesar Rp 3.18 juta.

5.2 Rekomendasi dan Kebijakan

Untuk meningkatkan peranan UKM dalam perekonomian nasional, maka pemerintah dapat melakukan beberapa kebijakan berikut :

1. Mengingat efisiensi BUMN yang sudah cukup meningkat dalam melakukan penyisihan laba, namun belum cukup optimal terhadap besaran 1 hingga 3% laba. Maka diperlukan peningkatan efektifitas dalam penyisihan laba sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penunjang PK (Administrasi, Diklat, Pengembangan jaringan, dll) dapat berjalan lebih optimal, sehingga tidak berlaku tumpang tindih dengan pelaksanaan program BL.
2. Keberhasilan program PKBL tidak hanya ditentukan oleh besaran dana yang digulirkan. Banyak kasus BUMN yang tidak melakukan pembinaan terhadap UKM binaannya sesuai dengan sektor yang ditekuninya, sehingga terjadi ketidak sesuaian (*dismatch*) yang mengakibatkan UKM binaannya tidak mampu memberikan nilai tambah secara langsung bagi BUMN. Maka dengan demikian pemerintah perlu membuat kebijakan melalui Meneg BUMN agar semakin mengoptimalkan lembaga-lembaga penyalur pinjaman yang berfungsi selain sebagai penyalur modal juga sebagai pembina yang menghubungkan pasar produk UKM binaan dengan kebutuhan BUMN pembina untuk mengefektifkan kinerja PKBL dalam memberikan bantuan kredit skala usaha UKM sekaligus mewadahi transfer teknologi informasi dari BUMN pembina pada UKM Binaan.
3. Indikator kinerja program PKBL saat ini hanya dilihat dari peningkatan jumlah unit yang mampu dibina, namun metode tersebut memiliki kelemahan karena dengan banyaknya jumlah unit kemungkinan dipengaruhi oleh besaran pinjaman yang dikucurkan oleh masing-masing lembaga penyalur, oleh karena itu diperlukan pendataan yang lebih akurat sebagai pelaporan atas kinerja dari masing-masing unit binaan BUMN, sehingga peningkatan keberhasilan program PKBL semakin terlihat selain dari jumlah unit yang dapat

dibina juga dari sisi, omzet, output pangsa domestik maupun ekspor dan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh masing-masing unit binaan BUMN.

4. Perbandingan investasi UK dan UB adalah 1:2, namun perbandingan jumlah tenaga kerja yang dihasilkan 30 : 1. Dari proporsi itu dapat dilihat kecilnya nilai tambah bagi pendapatan perkapita pada UK, dengan demikian diperlukan investasi modal lain untuk meningkatkan mutu SDM terhadap perkembangan informasi, teknologi serta celah pasar sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan menggeser proporsi tenaga kerja ke skala UM.

5. Proporsi jumlah tenaga kerja dan jumlah unit 2 : 1, hal ini menunjukkan inefisiensi secara rata-rata pada skala Usaha Kecil. Sehingga diperlukan partisipasi selain dari pemerintah yaitu usaha-usaha besar dalam merangkul UK sebagai jaringan usaha yang lebih terintegrasi. Dengan demikian konsep *power house* perindustrian nasional dapat dicapai seperti contoh kasus pada industri Negara Jepang.

5.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Akibat keterbatasan data dan waktu penelitian, maka penelitian ini hanya difokuskan pada mengukur keberhasilan program kemitraan BUMN melalui indikator jumlah unit yang dihasilkan dan pengaruhnya terhadap PDB, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas agar mampu menjelaskan kinerja program PKBL terhadap pertumbuhan PDB UKM yang lebih signifikan dari sisi output ataupun omzet produksi, jumlah tenaga kerja yang mampu dihasilkan dan program Bina lingkungan. Dengan jumlah variable yang lebih banyak diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik serta komprehensif.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh sektor swasta melalui perusahaan-perusahaan swasta, sebagai pembanding dari program CSR yang telah dilakukan Pemerintah melalui PKBL yang dijalankan oleh BUMN.
3. Pengaruh keberhasilan pelaksanaan program CSR hendaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menerima bantuan saja, namun pihak perusahaan hendaknya juga turut merasakan dampak balik (*feedback*) dari pelaksanaan program CSR, yang dalam kasus perusahaan terbuka (Tbk) adalah peningkatan harga saham. Maka pada selanjutnya perlu dilakukan penelitian untuk melihat dampak keberhasilan Program Kemitraan terhadap BUMN Pembina, untuk melihat pengaruh program CSR BUMN dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi M. Kuartono, 2007. Analisis Usaha Kecil dan Menengah, Andi, Yogyakarta.
- Agus Widarjono, 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Ans Kolk, Rob van Tulder, Esther Kostwinder, 2008. Business and partnerships for development, *European Manajemen Journal* 26.
- Blanchard Olivier, 2006. *Macroeconomics*, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Church Jeffrey, Roger Ware, 2000. *Industrial Organization: A Strategik Approach*, Mc Graw-Hill, Singapore.
- WWW.fiskal.depkeu.go.id. BUMN Incorporated : Sebuah Wacana Menuju Indonesia Baru.
- Hamzah Fahri, 2007. *Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat*, Yayasan Faham Indonesia.
- Gebremeskel H. Gebremeriam, Tesfa G. Gebremedhin and Randhall W. Jackson, 2004. *The Role of Small Bussiness in Economic Growth and Poverty Alleviation in West Vrginia: An Empirical Anaysis West Virginia*.
- Gujarati Damodar , 1995. *Basic Econometrics*. New York : MacGraw-Hill.
- Kubo, Yuji and Yong-sun Lee, 1995. " A Model Of Endogenous Growth With A Trade-off Between Investment in Phisical and Human Capital", *Asian Economic Journal* volume 9 (2).
- Mc Mahon, Walter W. dan Boediono. 1992. "Universal Basic Education : An Overall Strategy of Investment Priorities for Economic Growth", *Economic of Education Review* Volume 11 (2).
- Nugroho Riant D., Siahaan Ricky, 2005. *BUMN Indonesia : isu, kebijakan dan strategi*, Gramedia, Jakarta.

- Nachrowi D. Nachrowi, Usman Hardius, 2006. Pendekatan pouter dan praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, FEUI, Jakarta.
- Rahardja Pratama, Manurung Mandala, 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi, FEUI, Jakarta.
- Romer, David, 1996. Advance Macroeconomics. University of California, New York : The McGraw-Hill Companies.
- Sarwoko M., 2005. Dasar-dasar Ekonometrika, Andi, Yogyakarta.
- Sugiharto, 2007. Peran Strategis BUMN: Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Hari Ini dan Masa Depan, Gramedia, Jakarta.
- Tambunan Mangara, Ubaidilah. Memposisikan usaha kecil dan menengah dalam Persaingan Pasar Global : Membangun kekuatan Usaha Menengah sebagai work horse. www.smecda.com.
- Todaro Michael P. Ekonomi Untuk Negara-negara Berkembang : Suatu Pengantar tentang Prinsip-prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan, (penerjemah: Agustinus Subekti), Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Yusuf Wibisono, 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Fascho Publishing.

LAMPIRAN

Persamaan 1

Dependent Variable: LOG(UNIT?)
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/27/08 Time: 18:00
Sample: 1998 2006
Included observations: 9
Cross-sections included: 21
Total pool (unbalanced) observations: 169

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.855641	0.451521	-1.895019	0.0601
LOG(LBRL?)	0.225893	0.050204	4.499472	0.0000
LOG(POKOK?)	0.560284	0.051700	10.83725	0.0000
LOG(GIRO?)	0.122832	0.056782	2.163235	0.0322
GDPGW?	0.030003	0.048838	0.614330	0.5400
Fixed Effects (Cross)				
_HATBM-C	0.292823			
_HATP-C	-0.106262			
_HAK-C	0.494956			
_HAP-C	-0.018219			
_TGMGB-C	-0.465277			
_TGPTM-C	-0.048987			
_INMMMT-C	-0.017514			
_INMKBC-C	0.083356			
_INMPKBK-C	0.102350			
_INMSBG-C	-0.404588			
_INMLDB-C	0.324391			
_INMAAM-C	-0.030776			
_INMBL-C	0.116163			
_LGAL-C	0.418342			
_BGN-C	-0.004742			
_PHRPBE-C	-0.568663			
_PHRH-C	0.039310			
_PKP-C	0.042301			
_PKK-C	0.118694			
_KJS-C	-0.046810			
_JLS-C	-0.145120			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.934008	Mean dependent var	6.171835
Adjusted R-squared	0.923010	S.D. dependent var	1.782710
S.E. of regression	0.494651	Akaike info criterion	1.565843
Sum squared resid	35.23384	Schwarz criterion	2.028846
Log likelihood	-107.3138	F-statistic	84.92054
Durbin-Watson stat	0.938675	Prob(F-statistic)	0.000000

Persamaan 1

Regresi Awal Metode Random Effect

Dependent Variable: LOG(UNIT?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/27/08 Time: 19:54
 Sample: 1998 2006
 Included observations: 9
 Cross-sections included: 21
 Total pool (unbalanced) observations: 169
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.771689	0.263984	-2.923245	0.0040
LOG(LBRL?)	0.219275	0.039158	5.599807	0.0000
LOG(POKOK?)	0.560674	0.045735	12.25926	0.0000
LOG(GIRO?)	0.117021	0.048885	2.393775	0.0178
GDPGW?	0.028042	0.047536	0.589918	0.5561
Random Effects (Cross)				
_HATBM-C	0.155456			
_HATP-C	-0.056214			
_HAK-C	0.322791			
_HAP-C	-0.044070			
_TGMGB-C	-0.239087			
_TGPTM-C	-0.020488			
_INMMMT-C	-0.029740			
_INMKBC-C	0.043587			
_INMPKBK-C	0.073042			
_INMSBG-C	-0.266142			
_INMLDB-C	0.191007			
_INMAAM-C	-0.026128			
_INMBL-C	0.047813			
_LGAL-C	0.196111			
_BGN-C	-0.007712			
_PHRPBE-C	-0.384522			
_PHRH-C	0.009006			
_PKP-C	0.044434			
_PKK-C	0.088422			
_KJS-C	-0.008837			
_JLS-C	-0.088730			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.226021	0.1727
Idiosyncratic random		0.494651	0.8273

Weighted Statistics			
R-squared	0.856125	Mean dependent var	3.750762
Adjusted R-squared	0.852616	S.D. dependent var	1.274316
S.E. of regression	0.489218	Sum squared resid	39.25089
F-statistic	243.9693	Durbin-Watson stat	0.844502
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.914106	Mean dependent var	6.171835
Sum squared resid	45.86004	Durbin-Watson stat	0.722796

Persamaan 1

Regresi Final Metode Random Effect

Dependent Variable: LOG(UNITQ1?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/27/08 Time: 22:18
 Sample (adjusted): 1999 2006
 Included observations: 8 after adjustments
 Cross-sections included: 21
 Total pool (unbalanced) observations: 89
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.194622	0.374893	-0.519140	0.6050
LOG(LBRLQ1?)	0.338103	0.062143	5.440711	0.0000
LOG(POKOKQ1?)	0.375195	0.074180	5.057913	0.0000
LOG(GIROQ1?)	0.091890	0.060786	1.511701	0.1344
GDPGWQ1?	0.098514	0.061994	1.589079	0.1158
Random Effects (Cross)				
_HATBM-C	0.000000			
_HATP-C	0.000000			
_HAK-C	0.000000			
_HAP-C	0.000000			
_TGMGB-C	0.000000			
_TGPTM-C	0.000000			
_INMMMT-C	0.000000			
_INMKBC-C	0.000000			
_INMPKBK-C	0.000000			
_INMSBG-C	0.000000			
_INMLDB-C	0.000000			
_INMAAM-C	0.000000			
_INMBL-C	0.000000			
_LGAL-C	0.000000			
_BGN-C	0.000000			
_PHRPBE-C	0.000000			
_PHRH-C	0.000000			
_PKP-C	0.000000			
_PKK-C	0.000000			
_KJS-C	0.000000			
_JLS-C	0.000000			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		0.686564	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.845367	Mean dependent var	5.568477
Adjusted R-squared	0.838003	S.D. dependent var	1.727111
S.E. of regression	0.695142	Sum squared resid	40.59070
F-statistic	114.8050	Durbin-Watson stat	1.557967
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.845367	Mean dependent var	5.568477
Sum squared resid	40.59070	Durbin-Watson stat	1.557967

Persamaan 2

Regresi Awal Metode Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(GDPT?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 07/28/08 Time: 12:59
 Sample: 1998 2006
 Included observations: 9
 Cross-sections included: 21
 Total pool (balanced) observations: 189

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.351294	0.673723	-9.427166	0.0000
LOG(TSLR?)	0.022121	0.026565	0.832694	0.4062
LOG(INV?)	0.152087	0.032847	4.630116	0.0000
LOG(LABOR?)	0.128530	0.067419	1.906431	0.0583
LOG(UK?)	1.109187	0.089753	12.35815	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_HATBM-C	-4.666181			
_HATP-C	-3.990456			
_HAK-C	-1.782757			
_HAP-C	-3.978641			
_TGMGB-C	10.45439			
_TGPTM-C	5.860178			
_INMMMT-C	-1.448449			
_INMKBC-C	-0.233429			
_INMPKBK-C	-0.880198			
_INMSBG-C	-1.314592			
_INMLDB-C	6.027550			
_INMAAM-C	0.730630			
_INMBL-C	-1.060593			
_LGAL-C	3.667509			
_BGN-C	1.041463			
_PHRPBE-C	-3.596630			
_PHRH-C	-0.836668			
_PKP-C	-3.289223			
_PKK-C	0.452342			
_KJS-C	1.885338			
_JLS-C	-3.041586			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.968627	Mean dependent var	10.65087
Adjusted R-squared	0.964036	S.D. dependent var	1.198793
S.E. of regression	0.227340	Akaike info criterion	-0.002071
Sum squared resid	8.476083	Schwarz criterion	0.426731
Log likelihood	25.19573	F-statistic	210.9795
Durbin-Watson stat	0.989512	Prob(F-statistic)	0.000000

Persamaan 2

Regresi Awal Metode Random Effect

Dependent Variable: LOG(GDPT?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/28/08 Time: 13:01
 Sample: 1998 2006
 Included observations: 9
 Cross-sections included: 21
 Total pool (balanced) observations: 189
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.687888	0.596057	-2.831757	0.0051
LOG(TSLR?)	0.115630	0.025100	4.606821	0.0000
LOG(INV?)	0.175251	0.031901	5.493541	0.0000
LOG(LABOR?)	0.112847	0.066913	1.686467	0.0934
LOG(UK?)	0.640790	0.079851	8.024814	0.0000
Random Effects (Cross)				
_HATBM-C	-2.217468			
_HATP-C	-2.668029			
_HAK-C	-1.296829			
_HAP-C	-2.139082			
_TGMGB-C	7.040509			
_TGPTM-C	4.015486			
_INMMMT-C	-0.434955			
_INMKBC-C	-0.361859			
_INMPKBK-C	-0.504165			
_INMSBG-C	-1.117470			
_INMLDB-C	3.421369			
_INMAAM-C	0.786905			
_INMBL-C	-1.203638			
_LGAL-C	1.713357			
_BGN-C	0.984467			
_PHRPBE-C	-1.610975			
_PHRH-C	-0.943114			
_PKP-C	-2.366618			
_PKK-C	-0.070717			
_KJS-C	0.967798			
_JLS-C	-1.994972			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.074438	0.9571
Idiosyncratic random		0.227340	0.0429

Weighted Statistics			
R-squared	0.628583	Mean dependent var	0.749343
Adjusted R-squared	0.620508	S.D. dependent var	0.488978
S.E. of regression	0.301224	Sum squared resid	16.69545
F-statistic	77.84990	Durbin-Watson stat	0.418902
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	-2.995205	Mean dependent var	10.65087
Sum squared resid	1079.407	Durbin-Watson stat	0.006479

Persamaan 2

Regresi Final Metode Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(GDPQ2?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 06/19/08 Time: 12:58
 Sample (adjusted): 1999 2006
 Included observations: 8 after adjustments
 Cross-sections included: 21
 Total pool (unbalanced) observations: 144

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.570783	0.787895	-3.262850	0.0014
LOG(TSLRQ2?)	0.083290	0.031729	2.625082	0.0098
LOG(INVQ2?)	0.340972	0.043810	7.783050	0.0000
LOG(LABORQ2?)	0.325665	0.075835	4.294392	0.0000
LOG(UKQ2?)	0.152286	0.063202	2.409521	0.0175
Fixed Effects (Cross)				
_HATBM-C	0.770924			
_HATP-C	0.092091			
_HAK-C	0.074110			
_HAP-C	0.636068			
_TGMGB-C	-0.656656			
_TGPTM-C	0.589535			
_INMMMT-C	0.307898			
_INMKBC-C	-0.080220			
_INMPKBK-C	0.552592			
_INMSBG-C	0.321654			
_INMLDB-C	-1.960577			
_INMAAM-C	0.221992			
_INMBL-C	0.267640			
_LGAL-C	-3.238455			
_BGN-C	2.236480			
_PHRPBE-C	0.685785			
_PHRH-C	-0.540949			
_PKP-C	-0.721986			
_PKK-C	-1.600575			
_KJS-C	0.214157			
_JLS-C	-0.092721			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.986879	Mean dependent var	7.848658
Adjusted R-squared	0.984233	S.D. dependent var	2.652440
S.E. of regression	0.333058	Akaike info criterion	0.795534
Sum squared resid	13.20042	Schwarz criterion	1.311127
Log likelihood	-32.27848	F-statistic	372.9402
Durbin-Watson stat	1.704290	Prob(F-statistic)	0.000000

Sub-sektor	Perusahaan	Jml
1a HA Tanaman Bahan Makanan	PT SHS	1
	PT Pertani	2
1b HA Tanaman Perkebunan	PTPN I	3
	PTPN II	4
	PTPN III	5
	PTPN IV	6
	PTPN V	7
	PTPN VI	8
	PTPN VII	9
	PTPN VIII	10
	PTPN IX	11
	PTPN X	12
	PTPN XI	13
	PTPN XII	14
	PTPN XIII	15
	PTPN XIV	16
1d HA Kehutanan	PT Rajawali Nusantara Ind.	17
	Inhutani I	18
	Inhutani II	19
	PT Inhutani III	20
	PT Inhutani IV	21
	PT Inhutani V	22
	Perum Perhutani	23
	PT PSB	24
1e HA Perikanan	PT Tirta Raya Mina	25
	PT PGN	26
2a TG Minyak dan Gas Bumi	PT Pertamina	27
2b TG Pertambangan Tanpa Migas.	PT Aneka Tambang Tbk	28
	PT Timah Tbk	29
3b1 Ind non Mgs Makanan, Minuman dan Tembakau	PT Batubara Bukit Asam	30
	PT Ind. Sandang Nusantara	31
3b4 Ind non Kertas dan Barang Cetak	PT Primissima	32
	PT Kertas Kraft Aceh	33
	PT Kertas Lece	34
	PT Balai Pustaka	35
	Perum Peruri	36
	Perum PNRI	37
	3b5 Ind non Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	PT Kimia Fama, Tbk
PT Indofarma, Tbk		39
PT Bio Farma		40
PT Pupuk Sriwidjaja		41
PT Asean Aceh Fertilizer		42
PT Pupuk Kujang		43
PT Pupuk Kalimantan Timur		44
3b6 Ind non Semen & Brg. Galian Bukan Logam	PT Pupuk Iskandar Muda	45
	PT Semen Gresik Tbk	46
	PT Semen Kupang	47

	PT Semen Baturaja	48
	PT Petrokimia Gresik	49
	PT Semen Padang	50
	PT Semen Tonasa	51
3b7 Ind non Logam Dasar Besi & Baja	PT Krakatau Steel	52
	PT Boma Bisma Indra	53
3b8 Ind non Alat Angk., Mesin & Peralatannya	PT Dok Perkapalan Surabaya	54
	PT PAL Indonesia	55
3b9 Ind non Barang Lainnya	PT Industri Gelas	56
	PT Industri Soda Indonesia	57
	PT Garam	58
4a LGA Listrik	PT PLN	59
5 Bangunan	PT Adhi Karya	60
	PT Waskita Karya	61
	PT Utama Karya	62
	PT Nindya Karya	63
	PT PP	64
	PT Wijaya Karya	65
	PT Brantas Abipraya	66
	PT Istaka Karya	67
	Perum Perumnas	68
	PT Virama Karya	69
	PT Indah Karya	70
	PT Yodya Karya	71
	PT Bina Karya	72
	PT Indra Karya	73
	PT Amarta Karya	74
	PT Pengerukan Indonesia	75
6a PHR Perdagangan Besar dan Eceran	PT PPI	76
	PT Berdikari	77
	PT Sarinah	78
6b PHR Hotel	PT Hotel Indonesia Natour	79
	PT Bali Tourism & Devl. Corp	80
	PT TWC BP&RB	81
7a PK Pengangkutan	PT Pelindo I	82
	PT Pelindo II	83
	PT Pelindo III	84
	PT Pelindo IV	85
	PT PELNI	86
	PT Bahtera Adhiguna	87
	PT ASDP	88
	PT Angkasa Pura I	89
	PT Angkasa Pura II	90
	PT Kereta Api	91
	Perum Damri	92
	PT Pos Indonesia	93
	PT Bhanda Ghara Reksa	94
	PT Varuna Tirta Prakasya	95

7b PK Komunikasi
8 Keuangan, Jasa dan Sewa

PT Garuda Indonesia	96
PT Telkom Tbk	97
PT Bank Mandiri Tbk	98
PT BRI Tbk	99
PT BTN	100
PT BEI	101
PT BNI 46 Tbk	102
PT PPA	103
PT Asuransi Jiwasraya	104
PT Asuransi Jasindo	105
PT Askes	106
PT Jamsostek	107
PT Taspen	108
PT Asabri	109
PT ASEI	110
PT Asuransi Jasa Rahardja	111
PT RUI	112
PT Danareksa	113
PT PNM	114
PT PANN	115
PT KBI	116
Perum Pegadaian	117
Perum SPU	118
PT Jasa Marga	119
PT Sucofindo	120
PT Surveyor Indonesia	121
PT Biro Klasifikasi Indonesia	122
Perum Jasa Tirta I	123
Perum Jasa Tirta II	124
PT KBN	125
PT Kawasan Industri Medan	126
PT KIMA	127
PT Kaw. Indt. Wijayakusuma	128
PT Sby. Indt. Estate Rungkut	129
PT JIEP	130
PT PDI Pulau Batam	131
PT Koneba	132

9b Jasa Swasta

Lampiran
Data Variabel Regresi 1998 s/d 2006

Sektor	Tahun	laba(juta) PK	pokok(juta) PK	tslr(juta) PK	unit PK	GDP(milyar) UKM	GDPGW(%) UKM	Inv(milyar) UKM	Tenaga kerja UKM	unit UKM
HATBM	1998	205	185	254	174	90,665	0.75	1,980,358	20,758,783	14,279,195
HATBM	1999	249	248	357	179	115,448	0.27	2,392,687	19,882,353	14,471,665
HATBM	2000	246	218	373	184	111,564	-0.03	2,805,016	20,104,831	13,990,265
HATBM	2001	550	182	1,074	177	129,588	0.16	3,029,502	21,494,229	14,192,056
HATBM	2002	28	272	177	66	145,275	0.12	3,222,792	22,013,392	14,697,453
HATBM	2003	26	268	199	9	156,624	0.08	3,390,945	22,545,225	14,832,171
HATBM	2004	104	264	229	11	164,482	0.05	4,306,881	21,097,212	14,758,723
HATBM	2005	83	60	333	12	180,159	0.10	5,393,260	21,580,405	14,897,736
HATBM	2006	45	170	391	14	212,143	0.18	6,428,178	21,544,692	14,872,201
HATP	1998	23431	17,358	30,749	1366	23,095	1.04	840,304	5,287,808	3,637,287
HATP	1999	58876	14,070	61,799	2279	25,069	0.09	1,017,686	4,317,414	3,142,493
HATP	2000	27842	18,910	35,625	1696	24,514	-0.02	1,195,068	4,417,662	3,074,100
HATP	2001	7585	22,263	27,404	1835	28,987	0.18	1,154,535	4,808,006	3,174,596
HATP	2002	8447	20,158	30,034	1862	32,937	0.14	1,198,268	4,990,896	3,332,220
HATP	2003	10962	18,936	23,090	1507	35,626	0.08	1,100,565	5,128,235	3,373,790
HATP	2004	5000	15,313	31,330	1956	37,898	0.06	1,851,590	4,860,993	3,400,547
HATP	2005	13509	17,795	43,529	2673	43,095	0.14	2,086,828	5,162,113	3,563,594
HATP	2006	36966	27,541	40,641	3094	47,820	0.11	2,306,878	4,856,450	3,352,385
HAK	1998	6615	4,200	8,594	1234	2,003	0.33	56,466	458,544	315,415
HAK	1999	9813	4,641	7,557	1071	2,354	0.18	67,211	405,430	295,098
HAK	2000	7613	4,894	15,099	1562	3,680	0.56	77,956	663,208	461,504
HAK	2001	3220	4,978	12,037	1259	3,842	0.04	82,480	637,238	420,751
HAK	2002	2734	5,867	7,230	834	3,985	0.04	95,399	603,873	403,182

_HAK	2003	210	4,972	6,386	777	4,237	0.06	74,514	609,923	401,259
_HAK	2004	913	3,664	7,445	739	4,634	0.09	85,784	594,403	415,820
_HAK	2005	1917	3,221	6,021	717	5,151	0.11	106,962	617,002	425,939
_HAK	2006	2778	3,245	6,028	749	6,842	0.33	153,317	694,865	479,662
_HAP	1998	131	42	63	11	18,240	0.91	401,576	4,176,369	2,872,769
_HAP	1999	243	88	361	67	22,809	0.25	467,101	3,928,196	2,859,196
_HAP	2000	89	165	281	45	26,890	0.18	532,626	4,845,822	3,372,042
_HAP	2001	53	179	268	35	31,673	0.18	646,115	5,253,371	3,468,658
_HAP	2002	39	168	361	46	35,609	0.12	628,529	5,395,842	3,602,586
_HAP	2003	35	248	436	36	40,244	0.13	806,666	5,792,857	3,811,035
_HAP	2004	6	106	110	2	46,798	0.16	1,044,496	6,002,509	4,199,103
_HAP	2005	11	351	277	5	52,441	0.12	1,307,122	6,281,686	4,336,476
_HAP	2006		222	300	4	64,429	0.23	1,613,551	6,543,246	4,516,772
_TGMGB	1998	7498	8,704	29,602	1008	8	0.50	234	252	140
_TGMGB	1999	28156	9,483	20,285	781	7	-0.15	278	208	117
_TGMGB	2000	100199	6,245	29,394	1635	12	0.69	322	401	189
_TGMGB	2001	153243	9,206	48,981	2541	12	-0.02	393	422	203
_TGMGB	2002	78741	17,461	157,328	4133	9	-0.19	406	285	124
_TGMGB	2003	97056	32,125	129,902	5969	10	0.10	395	305	135
_TGMGB	2004	141711	41,905	308,919	5504	13	0.25	526	368	153
_TGMGB	2005	124001	49,219	59,321	2077	19	0.46	616	462	203
_TGMGB	2006	110620	40,547	63,465	3171	20	0.05	707	378	179
_TGPTM	1998	7417	2,133	3,534	349	143	2.04	988	4,438	2,462
_TGPTM	1999	17344	2,386	4,840	412	124	-0.14	1,135	3,708	2,092
_TGPTM	2000	14675	3,156	9,154	893	156	0.26	1,282	5,341	2,522
_TGPTM	2001	13062	4,024	19,559	1445	231	0.48	1,937	8,485	4,070
_TGPTM	2002	15520	6,378	18,221	1367	210	-0.09	1,768	6,433	2,797
_TGPTM	2003	12476	7,445	16,988	1174	215	0.03	1,764	6,440	2,849

_TGPTM	2004	11312	8,971	27,406	1318	257	0.19	2,289	7,432	3,092
_TGPTM	2005	13187	9,389	26,196	1252	419	0.63	3,447	10,396	4,563
_TGPTM	2006	15063	11,130	33,378	1187	516	0.23	3,998	9,997	4,744
_JNMMMT	1998	316	277	1,845	33	22,911	0.85	1,091,620	2,962,984	1,250,794
_JNMMMT	1999	449	410	2,342	34	29,187	0.27	1,641,327	4,260,156	1,589,196
_JNMMMT	2000	1036	506	2,049	144	19,376	-0.34	2,191,034	2,522,312	986,410
_JNMMMT	2001	1201	5,684	7,548	176	23,501	0.21	1,953,935	2,298,069	917,635
_JNMMMT	2002	645	1,526	1,910	202	26,611	0.13	2,389,650	2,421,666	1,011,582
_JNMMMT	2003	100	1,785	2,266	220	29,459	0.11	3,003,739	2,462,455	989,238
_JNMMMT	2004	11	1,754	1,667	85	31,713	0.08	3,082,521	2,477,238	1,006,680
_JNMMMT	2005		1,584	1,883	177	34,289	0.08	3,327,470	2,511,253	980,804
_JNMMMT	2006	8	1,436	1,977	267	40,199	0.17	3,858,981	2,591,324	1,103,332
_JNMKBC	1998	1218	3,374	8,492	620	1,174	0.23	398,808	151,796	64,079
_JNMKBC	1999	1760	4,429	7,273	614	1,316	0.12	287,669	192,149	71,679
_JNMKBC	2000	1736	3,072	5,035	669	2,528	0.92	176,530	329,031	128,675
_JNMKBC	2001	888	4,293	4,804	700	2,538	0.00	240,748	248,136	99,083
_JNMKBC	2002	519	3,792	4,160	273	3,111	0.23	252,436	283,066	118,243
_JNMKBC	2003	1269	3,080	4,180	275	3,505	0.13	308,296	292,947	117,685
_JNMKBC	2004	1081	2,884	3,688	206	3,920	0.12	291,598	306,199	124,431
_JNMKBC	2005	1455	2,185	3,966	196	4,340	0.11	339,648	317,860	124,144
_JNMKBC	2006	695	2,612	3,614	164	5,097	0.17	485,630	328,541	139,886
_JNMPKBK	1998	6437	6,584	14,662	925	4,674	0.32	84,126	604,466	255,169
_JNMPKBK	1999	23267	6,291	28,849	1834	6,335	0.36	113,448	924,649	344,928
_JNMPKBK	2000	12807	6,617	22,887	1777	8,426	0.33	142,770	1,096,953	428,989
_JNMPKBK	2001	18577	11,080	27,372	2375	9,621	0.14	92,478	940,786	375,662
_JNMPKBK	2002	10548	10,399	21,165	1784	10,096	0.05	131,847	918,753	383,783
_JNMPKBK	2003	6380	10,874	21,109	1710	11,551	0.14	105,421	965,529	387,878
_JNMPKBK	2004	8854	12,236	22,197	1093	12,931	0.12	143,467	1,010,053	410,457

_JNMPKKBK	2005	7811	14,003	22,584	1071	15,729	0.22	191,829	1,151,921	449,899
_JNMPKKBK	2006	4457	13,638	21,350	884	19,177	0.22	237,398	1,236,221	526,357
_JNMSBG	1998	2312	814	1,457	101	2,026	0.31	260,047	262,056	110,624
_JNMSBG	1999	1764	1,166	2,331	126	2,284	0.13	190,978	383,404	124,372
_JNMSBG	2000	1805	1,363	3,380	171	3,319	0.45	121,909	432,095	168,981
_JNMSBG	2001	3851	1,596	4,951	235	5,467	0.65	158,515	534,605	213,472
_JNMSBG	2002	3957	2,102	4,635	191	6,254	0.14	207,285	569,108	237,729
_JNMSBG	2003	500	2,990	4,366	333	6,626	0.06	162,127	553,821	222,485
_JNMSBG	2004	1231	3,629	5,087	380	7,323	0.11	219,159	572,013	232,450
_JNMSBG	2005	1804	4,439	5,714	445	8,590	0.17	295,453	629,128	245,715
_JNMSBG	2006	3662	5,053	6,123	502	10,108	0.18	376,575	651,583	277,430
_JNMLDB	1998	2020	980	5,069	540	11	0.27	41,844	1,429	603
_JNMLDB	1999	1617	1,481	3,964	305	10	-0.07	32,810	1,507	562
_JNMLDB	2000	1186	1,423	4,479	472	11	0.07	23,776	1,432	560
_JNMLDB	2001	4798	1,751	7,081	867	15	0.32	14,742	1,418	566
_JNMLDB	2002	3291	2,055	2,492	357	17	0.17	16,737	1,538	642
_JNMLDB	2003	1783	1,851	3,780	503	16	-0.05	13,591	1,346	541
_JNMLDB	2004	10904	2,964	15,809	1008	20	0.22	12,937	1,539	625
_JNMLDB	2005	2279	4,762	8,021	455	23	0.15	20,552	1,555	646
_JNMLDB	2006	1185	5,141	8,100	374	25	0.12	26,122	1,631	694
_JNMAAM	1998	825	1,316	2,950	312	1,121	0.28	29,092	144,956	61,192
_JNMAAM	1999	3791	2,076	6,328	573	1,091	-0.03	48,096	159,272	59,414
_JNMAAM	2000	4478	6,799	11,114	781	3,301	2.03	67,100	429,752	168,065
_JNMAAM	2001	2203	4,741	6,915	466	4,888	0.48	80,630	477,996	190,867
_JNMAAM	2002	3114	5,208	8,726	536	5,210	0.07	92,037	474,155	198,065
_JNMAAM	2003	1103	5,573	7,711	406	5,897	0.13	109,429	492,909	198,016
_JNMAAM	2004	1807	6,185	9,232	457	6,963	0.18	145,679	543,892	221,023
_JNMAAM	2005	1214	6,948	8,856	483	8,857	0.27	180,948	648,668	253,346

_INMAAM	2006	914	6,564	7,653	401	10,778	0.22	216,213	694,779	295,823
_INMBL	1998	253	169	701	69	350	0.15	18,440	45,324	19,133
_INMBL	1999	274	274	756	63	347	-0.01	23,091	50,695	18,911
_INMBL	2000	642	241	1,004	83	1,412	3.07	27,742	183,802	71,880
_INMBL	2001	389	261	375	47	2,176	0.54	27,347	212,747	84,951
_INMBL	2002	136	290	259	38	1,773	-0.19	34,195	161,349	67,399
_INMBL	2003	123	312	415	48	2,139	0.21	41,207	178,797	71,828
_INMBL	2004	20	288	274	22	2,527	0.18	39,074	197,410	80,222
_INMBL	2005	21	235	274	33	2,921	0.16	54,922	213,935	83,555
_INMBL	2006	101	195	253	43	3,586	0.23	64,817	231,189	98,436
_LGAL	1998	5332	12,131	17,294	2310	20	0.41	41,972	11,086	1,952
_LGAL	1999	5243	10,627	20,684	3110	24	0.21	66,464	17,545	1,281
_LGAL	2000	5153	9,756	20,161	2467	12	-0.51	90,956	20,106	2,973
_LGAL	2001	5064	9,679	15,995	1875	15	0.29	91,027	18,913	3,366
_LGAL	2002	4974	9,545	10,705	1244	22	0.41	128,998	17,295	2,983
_LGAL	2003		8,938	10,948	1501	28	0.30	112,522	20,174	3,461
_LGAL	2004		8,505	21,028	1750	35	0.25	151,013	22,199	3,848
_LGAL	2005		8,889	13,699	2876	38	0.09	150,257	21,153	3,782
_LGAL	2006		11,737	14,180	2000	43	0.11	181,710	20,747	3,846
_BGN	1998	1490	2,096	4,219	696	27,473	0.34	408,247	397,653	122,945
_BGN	1999	1556	2,379	3,347	372	30,096	0.10	355,518	235,468	102,332
_BGN	2000	1792	2,773	3,847	363	34,123	0.13	302,789	503,063	124,769
_BGN	2001	1316	2,682	4,869	406	41,981	0.23	339,136	491,510	114,721
_BGN	2002	2357	3,035	5,029	409	48,986	0.17	379,438	505,582	105,730
_BGN	2003	4122	3,550	6,195	434	55,888	0.14	510,244	608,183	151,489
_BGN	2004	9256	4,766	8,703	493	66,564	0.19	731,174	605,471	158,388
_BGN	2005	9535	5,938	9,937	491	86,742	0.30	889,300	629,281	159,081
_BGN	2006	9753	6,607	11,305	490	110,108	0.27	1,099,557	627,595	162,135

_PHRPBE	1998	219	138	171	22	87,325	0.55	4,024,883	1,038,906	6,464,310
_PHRPBE	1999	457	272	453	35	105,044	0.20	5,232,363	11,670,316	6,767,491
_PHRPBE	2000	446	386	1,249	64	136,286	0.30	6,439,843	14,288,836	7,858,096
_PHRPBE	2001	598	641	1,396	73	162,253	0.19	7,306,575	14,241,297	7,800,817
_PHRPBE	2002	711	964	1,743	96	177,515	0.09	7,747,601	13,706,671	7,471,808
_PHRPBE	2003	499	1,254	1,888	85	188,190	0.06	9,129,281	14,206,684	7,505,426
_PHRPBE	2004	582	1,649	2,231	96	207,096	0.10	11,537,961	14,848,442	8,176,363
_PHRPBE	2005	547	1,951	3,575	129	246,582	0.19	17,265,941	15,621,124	9,220,073
_PHRPBE	2006	855	2,667	6,716	119	284,437	0.15	20,580,806	16,120,396	9,978,369
_PHRH	1998	232	587	966	103	1,091	0.41	231,172	12,984	80,788
_PHRH	1999	1106	677	1,503	72	1,224	0.12	266,052	135,973	78,849
_PHRH	2000	1206	732	1,993	131	1,864	0.52	300,932	195,430	107,476
_PHRH	2001	1259	945	2,210	156	2,064	0.11	358,671	181,118	99,209
_PHRH	2002	1305	1,368	3,032	256	2,161	0.05	337,701	166,875	90,967
_PHRH	2003	971	2,070	2,927	145	2,358	0.09	382,503	177,971	94,022
_PHRH	2004	534	1,393	1,747	176	2,640	0.12	560,392	189,269	104,222
_PHRH	2005	766	1,924	2,987	203	3,079	0.17	788,464	195,082	115,143
_PHRH	2006	845	1,628	3,851	212	3,582	0.16	924,906	202,992	125,650
_PKP	1998	29984	23,908	46,785	3343	20,186	0.43	6,333,536	1,899,117	1,481,766
_PKP	1999	58795	25,453	96,355	5776	20,953	0.04	9,509,676	2,147,154	1,673,811
_PKP	2000	74824	43,839	113,262	6759	22,008	0.05	12,685,816	2,310,042	1,818,421
_PKP	2001	60238	48,905	117,038	6363	26,432	0.20	16,234,812	2,247,484	1,733,358
_PKP	2002	41256	51,170	100,355	5762	31,082	0.18	13,116,371	2,395,281	1,881,042
_PKP	2003	51974	55,070	103,088	5672	36,865	0.19	16,404,324	3,062,114	2,406,846
_PKP	2004	27108	60,233	92,893	4387	39,465	0.07	24,151,075	3,080,518	2,452,408
_PKP	2005	23373	64,521	107,863	4300	49,479	0.25	34,220,452	3,109,879	2,475,046
_PKP	2006	22339	69,954	104,631	4998	65,691	0.33	40,204,912	3,198,623	2,570,915
_PKK	1998	3440	18	270	14	352	0.44	1,586,959	33,148	25,863

_PKK	1999	10757	57	844	44	425	0.21	2,105,872	43,553	33,951
_PKK	2000	18073	96	1,418	75	600	0.41	2,624,785	62,946	49,550
_PKK	2001	25390	135	1,992	105	697	0.16	3,342,588	59,230	45,681
_PKK	2002	42501	5,782	52,477	4497	1,000	0.44	2,322,999	77,079	60,531
_PKK	2003	83453	23,314	68,910	6256	1,197	0.20	2,788,267	99,410	78,137
_PKK	2004	30436	51,682	108,236	7797	1,885	0.58	4,088,158	147,163	117,157
_PKK	2005	91728	66,630	122,482	10160	2,549	0.35	6,201,362	160,205	127,501
_PKK	2006	79936	77,973	102,369	6031	3,226	0.27	7,018,511	157,086	126,259
_KJS	1998	21261	24,728	39,660	4037	12,341	0.39	8,600,039	145,917	18,519
_KJS	1999	36937	29,690	60,415	3863	12,441	0.01	10,451,958	106,001	24,143
_KJS	2000	36570	33,728	60,932	4583	20,766	0.67	12,303,877	483,589	50,068
_KJS	2001	50666	41,522	79,296	5439	24,455	0.18	13,020,914	494,641	50,692
_KJS	2002	68617	57,722	111,079	6,349	27,653	0.13	15,283,861	508,912	51,356
_KJS	2003	133280	71,698	173,926	9,619	30,002	0.08	19,395,377	537,695	54,358
_KJS	2004	156354	100,089	211,867	8,817	33,426	0.11	27,416,420	541,777	58,950
_KJS	2006	289605	101,011	179,861	7,759	39,135	0.17	33,112,694	536,633	61,322
_KJS	2006	268158	134,284	320,186	14,080	45,375	0.16	40,908,466	531,427	71,431
_JLS	1998	10312	9,936	19,822	1,025	33,671	0.74	26,701	2,631,800	1,439,915
_JLS	1999	34626	11,801	47,454	1,942	38,973	0.16	3,086,698	3,572,842	1,499,206
_JLS	2000	22594	26,509	41,529	1,934	47,793	0.23	6,146,695	6,967,812	1,699,416
_JLS	2001	6642	26,032	46,487	2,248	55,798	0.17	11,639,567	7,061,080	1,692,876
_JLS	2002	5066	24,152	32,739	2,006	65,288	0.17	14,480,961	7,757,675	1,931,364
_JLS	2006	4470	24,828	36,835	1,867	77,358	0.18	12,953,128	8,971,402	2,426,388
_JLS	2004	5395	25,773	34,952	1,443	92,123	0.19	16,383,700	8,076,990	2,249,640
_JLS	2005	7642	26,439	37,643	1,676	112,875	0.23	23,921,239	8,125,759	2,707,261
_JLS	2006	6237	27,309	33,541	1,426	136,111	0.21	31,212,753	8,896,225	2,956,434